



Pemantauan

DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2024

Deforestasi Indonesia Tahun 2023

Penulis	: Meniy Ratnasari, S.Hut, M.Sc Iid Itsna Adkhi, S.Hut Fareza Ditya Aryanto, S.Hut Dewi Rahma Nur Afifah, A. Md
Pembina	: Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)
Penanggung Jawab	: Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES. (Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan)
Ketua Tim	: Judin Purwanto, S.Hut, M.Si (Kasubdit Pemantauan Sumber Daya Hutan)
Editor	: Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si Dr. Riva Rovani, S.Hut, M.Agr
Layout dan Peta	: Dewi Rahma Nur Afifah, A. Md
Kontributor Data	: Badan Riset dan Inovasi Nasional Badan Informasi Geospasial Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Jaringan Informasi Geospasial Kementerian LHK
Diterbitkan oleh	: Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sitasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. *Deforestasi Indonesia Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

© Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Alamat surat:

Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 7
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270
Email simontana@menlhk.go.id
Telp. (021) 5730335-5730292
Fax. (021) 5730335

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penyusunan buku Deforestasi Indonesia Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Penghitungan deforestasi Indonesia telah dilakukan secara periodik, dengan menggunakan data dan informasi sejak tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya konsisten dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam rangka mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Sumberdaya Hutan Nasional yang berkualitas. Penyajian data dan Informasi yang baik dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.

Buku ini menyajikan Luas Deforestasi Tahunan baik Deforestasi Bruto maupun Deforestasi Netto pada Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan data penafsiran Citra Landsat LDCM (*The Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2022 dan 2023 untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengapa informasi deforestasi bruto dan deforestasi netto perlu disampaikan? Hal itu agar dapat memberikan informasi perubahan kondisi hutan secara lengkap, didukung oleh data yang memadai. Namun demikian penggunaan angka apakah angka deforestasi bruto atau netto saja, atau semua kelas hutan atau hutan alam saja, tentu disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Perhitungan Deforestasi Netto lebih ditujukan untuk memberikan informasi perubahan/pengurangan luas penutupan lahan hutan/berhutan pada periode tertentu dengan mempertimbangkan hasil penghitungan reforestasi. Lebih lanjut perhitungan juga dibedakan atas yang hanya terjadi pada hutan alam, maupun secara keseluruhan dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman. Hal ini untuk membedakan kejadian yang terjadi secara alami, dengan kejadian sebagai akibat aktivitas manusia. Data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, diagram, serta peta untuk seluruh wilayah Indonesia guna mempermudah penyerapan informasi dan data.

Dengan memperhatikan hasil pemantauan perubahan tutupan hutan dari tahun 2021 dan 2022, dapat dilihat bahwa Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2023 mengalami deforestasi Indonesia tahun 2023 terjadi kenaikan 16,4 %. Secara umum luas deforestasi yang dinamis setiap tahunnya disebabkan oleh perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan pengurangan maupun penambahan penutupan hutan. Selain itu, sebagaimana periode sebelumnya, dinamika penutupan hutan di kawasan hutan juga menunjukkan sebaran yang bervariasi pada berbagai fungsi kawasan hutan.

Akhir kata segala masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Semoga data dan informasi pada buku ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan kehutanan.

Jakarta,

2024

Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan



Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Keterkaitan Deforestasi Indonesia dengan Dunia Internasional	2
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran.....	6
E. Ruang Lingkup	6
F. Batasan Istilah	7
BAB II METODOLOGI.....	10
A. Sumber Data	10
B. Analisis dan Penyajian Data	13
BAB III HASIL PENGHITUNGAN DEFORESTASI INDONESIA	17
A. Deforestasi Indonesia	17
(1) Deforestasi Bruto Indonesia	17
(2) Reforestasi Indonesia	20
(3) Deforestasi Netto Indonesia	22
B. Deforestasi Indonesia per Provinsi	28
(1) Deforestasi Bruto Indonesia per Provinsi.....	28
(2) Reforestasi Indonesia per Provinsi	29
(3) Deforestasi Netto Indonesia per Provinsi	31
C. Deforestasi Indonesia per Fungsi Kawasan Hutan	32
(1) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK)	33
(2) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)	35
(3) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Produksi	38
(4) Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL).....	47
BAB IV SEBARAN DAN PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA.....	51
A. Sebaran Deforestasi Indonesia	51
B. Perkembangan Deforestasi Indonesia.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran dan Rekomendasi	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Sistem Klasifikasi Penutupan Lahan (23 Kelas) disertai kode layer dan kode toponimi.....	10
Tabel II. 2 Logika penentuan suatu poligon hasil analisis perubahan penutupan lahan termasuk sebagai H, NH, DEF, atau REF	14
Tabel III. 1 Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribu Ha) Tahun 2023.....	23
Tabel III. 2 Deforestasi Netto pada Fungsi Kawasan Hutan (Ribu Ha) Tahun 2023	26
Tabel III. 3 Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribu Ha) Tahun 2023	26
Tabel III. 4 Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribu Ha) Tahun 2023.....	27
Tabel III. 5 Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) per Provinsi (Ha) Tahun 2023.....	33
Tabel III. 6 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha	34
Tabel III. 7 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran <100,0 ha	34
Tabel III. 8 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) per Provinsi (Ha) Tahun 2023.....	36
Tabel III. 9 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran >1 ribu ha	37
Tabel III. 10 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran 100,0 – <1.000,0 ha.....	37
Tabel III. 11 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran <100,0	38
Tabel III. 12 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per Provinsi (Ha) Tahun 2023	39
Tabel III. 13 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran >1.000 ha	40
Tabel III. 14 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran 100,0-1.000,0 ha	40
Tabel III. 15 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT di bawah 100 ha	41
Tabel III. 16 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per Provinsi (Ha) Tahun 2023.....	42
Tabel III. 17 Luas Deforestasi pada Kawasan HP >1.000 ha	43
Tabel III. 18 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dalam kisaran 100–1000 ha	43
Tabel III. 19 Luas Deforestasi pada Kawasan HP < 100 ha	44
Tabel III. 20 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dengan angka negatif	44
Tabel III. 21 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per Provinsi (Ha) Tahun 2023	45
Tabel III. 22 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK >1.000 ha	46
Tabel III. 23 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha	46
Tabel III. 24 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK kurang dari 100 ha	46
Tabel III. 25 Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per Provinsi (Ha) Tahun 2023	48
Tabel III. 26 Luas Deforestasi pada APL > 1.000 ha	49
Tabel III. 27 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran 100,0–1000,0 ha	49
Tabel III. 28 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran kurang dari 100,0 ha	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Proses Perhitungan Deforestasi Indonesia.....	16
Gambar 2. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2023 (Ribuan ha) pada Hutan Primer, Sekunder dan Tanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	18
Gambar 3. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2023 (Ribuan Ha)	18
Gambar 4. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia tahun 2023 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan.....	19
Gambar 5. Diagram Deforestasi Bruto Hutan Alam tahun 2023 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	20
Gambar 6. Diagram Reforestasi Indonesia Tahun 2023 (Ribuan Ha).....	21
Gambar 7. Diagram Reforestasi tahun 2023 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	22
Gambar 8. Diagram Reforestasi Hutan Alam tahun 2023 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	22
Gambar 9. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2023.....	23
Gambar 10. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2023 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (APL).....	24
Gambar 11. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2023 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	25
Gambar 12. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2023 di Dalam Kawasan Hutan	25
Gambar 13. Diagram Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2023	27
Gambar 14. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2023	28
Gambar 15. Grafik Deforestasi Bruto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2023	29
Gambar 16. Grafik Deforestasi Bruto Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2023	29
Gambar 17. Grafik Reforestasi per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2023	30
Gambar 18. Grafik Reforestasi Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2023.....	31
Gambar 19. Grafik Deforestasi Netto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2023	32
Gambar 20. Grafik Deforestasi Netto Hutan Alam per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2023.....	32
Gambar 21. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2023.....	51
Gambar 22. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023 ...	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Deforestasi Bruto dan Reforestasi Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2023
- Lampiran 2 Deforestasi Indonesia dan Deforestasi per Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2023
- Lampiran 3 Deforestasi dan Peta Deforestasi per Provinsi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang keberadaannya perlu dipertahankan sebaik-baiknya, untuk menjamin keberlangsungan penyediaan fungsi dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hutan itu sendiri memiliki fungsi dan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan, berdasarkan pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 2 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

Upaya untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan menghadapi tantangan yang sangat besar. Penutupan hutan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan sangatlah dinamis. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi kondisi hutan di beberapa tempat di Indonesia semakin menurun kualitasnya atau berkurang luasnya. Untuk memastikan bahwa setiap perubahan luasan hutan di seluruh Indonesia diketahui, maka pemantauan perubahan penutupan hutan serta terjadinya deforestasi dan reforestasi di seluruh wilayah Indonesia terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut untuk menjamin terjadinya perubahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat di lapangan.

Menjawab kebutuhan kedinamisan perubahan tutupan hutan Indonesia tersebut, dan guna menjamin bahwa tersedia sebuah informasi perubahan tutupan lahan secara berkesinambungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah membangun sebuah sistem pemantauan hutan nasional sejak tahun 2000, untuk melakukan penghitungan deforestasi Indonesia secara periodik dengan menggunakan data pengamatan dari tahun 1990.

Dengan menggunakan sistem tersebut, informasi yang lebih konsisten yang mencakup hasil perhitungan deforestasi sebagai berikut dapat disajikan. Sebagai gambaran umum, kami menyajikan informasi deforestasi sebagai berikut, tahun 1990-1996 terjadi deforestasi yaitu sebesar 1,87 juta ha/tahun, tahun 1996-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun, tahun 2000-2003 sebesar 1,08 juta ha/tahun, tahun 2003-2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun, tahun 2006-2009 sebesar 0,83 juta ha/tahun, tahun 2009-2011 sebesar 0,45 juta ha/tahun, tahun 2011-2012 sebesar 0,61 juta ha, tahun 2012-2013 sebesar 0,73 juta ha, tahun 2013-2014 sebesar 0,40 juta ha, tahun 2014-2015 sebesar 1,09 juta ha, tahun 2015-2016 sebesar 0,63 juta ha, tahun 2016-2017 sebesar 0,48 juta ha, tahun 2017-2018 sebesar 0,44 juta ha,

tahun 2018-2019 sebesar 0,46 juta ha, tahun 2019-2020 sebesar 0,12 juta ha dan tahun 2020-2021 sebesar 0,11 juta ha. Deforestasi pada periode penghitungan terakhir yaitu tahun 2021-2022 diperoleh nilai sebesar 0,10 juta ha. Dalam setiap periode pengamatan, besaran deforestasi dapat mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, diketahui beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya deforestasi dari tahun ke tahun, antara lain konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain, (misalnya untuk perkebunan dan permukiman; pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal logging*); aktivitas pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain secara legal; pertambangan, perambahan dan penguasaan lahan ilegal (*illegal land-occupation*); kebakaran hutan), serta bencana alam. Di sisi lain, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang belum optimal mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis. Seiring dengan meningkatnya deforestasi, kerusakan lingkungan pun dapat dirasakan meningkatannya.

B. Keterkaitan Deforestasi Indonesia dengan Dunia Internasional

Saat ini, deforestasi bukan hanya menjadi perhatian tingkat nasional tetapi juga telah menjadi perhatian di dunia internasional. Hal tersebut karena dampak dari terjadinya deforestasi dirasakan cukup meluas. Untuk mengatasi dampak tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan pada tingkat nasional tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kesepakatan pengurangan deforestasi. Keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan pengurangan deforestasi dilandasi dengan Komitmen Indonesia secara Internasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, antara lain ditandai dengan terbitnya kesepakatan *Bali Action Plan* pada *The Conferences of Parties (COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Bali, dilanjutkan dengan pembahasannya pada COP-15 di Copenhagen, COP-16 di Cancun dan COP-21 di Paris. Penandatanganan komitmen ini dipicu oleh munculnya ketidakseimbangan daya dukung lingkungan hidup yang diindikasikan oleh berbagai bencana alam di seluruh dunia. Banyaknya kejadian bencana alam tersebut disinyalir salah satunya merupakan akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan, yang kemudian mengakibatkan perubahan suhu bumi. Hal tersebut memberikan dampak negatif dari berbagai aktivitas kehidupan manusia. Usaha untuk menurunkan deforestasi adalah salah satu upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang saat ini makin dirasakan dampaknya bagi kehidupan manusia di muka bumi.

Tahun 2016 Indonesia menyampaikan laporan ke dunia Internasional secara transparan melalui *3rd National Communication* tentang angka emisi Indonesia dari sektor lahan yang mencakup emisi dari deforestasi dan emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu, Indonesia juga memberikan komitmen yang tinggi kepada dunia dalam pengendalian perubahan iklim, termasuk penurunan emisi dari sektor lahan, yang dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia untuk menandatangani dan kemudian me-ratifikasi *Paris Agreement*. Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang RI No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework*

Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Undang-undang tersebut dilengkapi pengajuan secara formal ambisi Indonesia yang lebih dikenal sebagai *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia ke UNFCCC pada tahun yang sama. Di dalam NDC-nya, Indonesia menyampaikan target komitmen penurunan emisi sampai dengan tahun 2030 dari sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya sebesar 29% (dengan kemampuan sendiri) sampai dengan 41% (dengan dukungan internasional) dari emisi *Business As Usual* (BAU) (NDC Indonesia, 2016). Dalam dokumen NDC tersebut, dua sektor unggulan mempunyai target penurunan yang cukup signifikan, yaitu sektor kehutanan termasuk *Land Use Land Cover Change* dan Lahan Gambut dengan target sebesar 17,2% s.d. 23% serta sektor energi dengan target sebesar 11% s.d. 14%. Pada tahun 2022, Indonesia telah meningkatkan ambisi penurunan emisi menjadi sebesar 31,89% (dengan kemampuan sendiri) dan 43,20% (dengan dukungan internasional) dari emisi BAU (Enhanced NDC Indonesia, 2022).

Pelaporan terkait pengendalian perubahan iklim dan NDC membutuhkan pengamatan berkelanjutan terhadap kondisi sumber daya hutan, termasuk deforestasi. Pengamatan terjadinya deforestasi di seluruh Indonesia, selain dilakukan secara mandiri oleh Indonesia, juga telah dilakukan oleh beberapa institusi lain di seluruh dunia. Penelitian dan studi oleh berbagai institusi dunia yang pernah dilakukan terkait deforestasi di Indonesia memberikan informasi dinamika penutupan hutan. Penelitian-penelitian tersebut didasarkan pada studi yang terpisah, menggunakan metode, data, dan informasi yang heterogen, sehingga tidak mudah dibandingkan antara satu dengan lainnya. Walaupun begitu, penelitian tersebut tetap mampu memberikan informasi secara indikatif dinamika penutupan hutan Indonesia.

Terkait dengan paragraf di atas, berikut kami sajikan beberapa contoh hasil penelitian terkait dinamika penutupan hutan Indonesia:

- i. Revilla (1993) melakukan penelitian berdasarkan analisis pada **62 pasangan citra** Landsat cetak seluruh wilayah Indonesia (yang meliputi $\pm 32\%$ wilayah darat Indonesia) perolehan tahun 1972 - 1990. Citra tersebut berupa cetakan hitam putih saluran 5 Landsat MSS periode 1972 – 1982 skala 1: 1.000.000 (liputan 1) dan cetakan paduan warna semu (*false color composite*) Landsat MSS periode 1986 – 1990 skala 1:1.000.000 (liputan 2). Kedua liputan citra tersebut dianalisis secara manual dengan plastik transparan, kemudian luas perubahan hutannya dihitung dengan *dot grid* 2mm (mewakili luasan ~ 400 ha). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung dengan regresi untuk mendapatkan nilai kehilangan hutan seluruh Indonesia selama tahun 1972 – 1990 yang diperkirakan seluas **840 ribu ha/tahun**, atau total sebesar **10 – 14 juta ha** selama periode **18 tahun**. Perlu dicatat juga bahwa data liputan citra yang dipergunakan sangat tidak mencukupi, antara lain Kalimantan Tengah hanya tersedia 1 *scene* dan Papua hanya tersedia 2 *scene*;
- ii. Di sisi lain, penaksiran (sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO (1993) melalui kegiatan *Forest Resources Assessment* 1990 dilaksanakan berdasarkan analisis digital pada **31 pasangan citra** Landsat digital seluruh wilayah Asia Pasifik (yang meliputi $\pm 10\%$ wilayah darat Asia Pasifik, di mana sekitar **8 pasangan citra** meliputi Indonesia) perolehan tahun ~ 1981 (liputan 1) dan tahun ~ 1990 (liputan 2). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung dengan regresi untuk mendapatkan nilai kehilangan hutan Indonesia selama tahun 1981 – 1990 yang diperkirakan mencapai seluas **1,212 juta ha/ per tahun**, atau mencapai total sebesar **10,9 juta ha** selama **9 tahun**. Besaran tersebut merupakan nomor dua di dunia setelah Brazil;

- iii. Sedangkan berdasarkan penaksiran sumberdaya hutan lanjutan yang dilakukan oleh FAO (2002) melalui kegiatan *Forest Resources Assessment* 2000 dilaksanakan berdasarkan analisis pada **117 pasangan citra** Landsat (atau citra SPOT/IRS, yang meliputi sekitar 10% luasan areal tropis seluruh dunia) perolehan tahun ~1980 (liputan 1), tahun ~1990 (liputan 2), dan tahun ~2000 (liputan 3). Penafsiran dilakukan secara manual dengan plastik transparan, kemudian luas perubahan hutannya dihitung dengan *dot grid* 2 x 2 km² (mewakili luasan ~400ha). Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung dengan regresi untuk mendapatkan nilai kehilangan hutan seluruh Indonesia selama tahun 1990 – 2000 yang diperkirakan seluas **1,312 juta ha/tahun**, atau sebesar **13,12 juta ha** selama **10 tahun**;
- iv. Pengurangan luas penutupan hutan juga dilaporkan oleh Holmes (2000, 2002) berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Badan Planologi, Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun) atas permintaan World Bank sebagai salah satu persyaratan pencairan bantuan keuangan. Analisis dilakukan dengan perhitungan peta digital (Sistem Informasi Geografis – SIG) antara **Peta RePPPProT** (*Regional Physical Planning Program for Transmigration*) terbitan **tahun 1985** (liputan 1 yang bersumber dari citra penginderaan jauh tersedia pada masa itu) dengan **Peta Penutupan Hutan** hasil analisis Dephutbun (liputan 2 mencakup citra Landsat hampir seluruh Indonesia tahun **1994 – 1997**). Hasil perhitungan menunjukkan terjadinya kehilangan hutan di Indonesia sebesar **1,670 juta ha/tahun**, atau sebesar **20,042 juta ha** selama **~12 tahun**. Berdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa antara tahun 1985 sampai 1997 total areal hutan di Sumatera berkurang dari semula 23,3 juta ha menjadi hanya sekitar 16,6 juta ha. Sementara itu, di Kalimantan total areal hutan berkurang dari semula ~40 juta ha menjadi sekitar 31,5 juta ha. Sedangkan tingkat deforestasi di Sulawesi sebesar 11,3 juta ha berkurang menjadi 9 juta ha.

Hasil penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia terjadi dengan sangat dinamis. Hal tersebut mendorong upaya untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menjamin informasi yang disajikan sesuai dengan keadaan terkini di lapangan dan dapat dijadikan dasar yang akurat dalam pengambilan kebijakan.

Sehubungan hal tersebut, berbagai upaya pengendalian terus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan serta seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang berlaku selama dua tahun.

Inpres 10 Tahun 2011 kemudian telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan inpres dimaksud, serta untuk perwujudan peningkatan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, maka diterbitkan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) sebagai implementasi Inpres dimaksud. Pada Tahun 2021, setelah melalui penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan dimaksud ditindaklanjuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPIB). Berdasarkan kebijakan dimaksud, maka pada areal PIPIB tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan penundaan/penghentian izin baru merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Setelah kebijakan PIPIB, Pemerintah kemudian mengupayakan seluruh kebijakan untuk mengurangi laju deforestasi dapat dilaksanakan dengan lebih terintegrasi. Proses integrasi tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan Indonesia FOLU NetSink 2030. Kebijakan ini dibatasi hanya pada sektor FOLU (*Forest and Other Land Use*) untuk menyelaraskan dengan kewenangan KLHK. Kebijakan secara terintegrasi ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat emisi akibat deforestasi atau sebab lain terkait *FOLU* yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat sekuestrasi yang dihasilkan pada tahun 2030. Untuk mendukung kebijakan *FOLU* ini, pemantauan dan analisis terkait deforestasi secara berkelanjutan perlu dipertahankan.

C. Tujuan

Buku ini dimaksudkan untuk mengetahui tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan yang telah mendorong dilakukannya kegiatan pemantauan sumber daya hutan secara periodik dan berkelanjutan.

Secara umum buku ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil pemantauan secara periodik dan diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui antara lain:

1. **Laju perubahan penutupan hutan** sebagai bahan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan;
2. **Sebaran Perubahan penutupan hutan** sebagai bahan pendukung dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan;
3. **Kecenderungan perubahannya** di masa yang akan datang sehingga dapat diantisipasi perubahan ke arah yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dilakukan penghitungan deforestasi yaitu perubahan penutupan lahan berhutan menjadi tidak berhutan. Periode penghitungan deforestasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil penafsiran Citra Landsat resolusi sedang, dan menghasilkan angka deforestasi per tahun.

Secara khusus buku ini bertujuan melakukan penghitungan deforestasi di Indonesia dan untuk menyajikan data deforestasi atau perubahan penutupan lahan dari berhutan menjadi tidak berhutan tahun 2023 sebagai bahan pendukung dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*).

D. Sasaran

Tersedianya data dan informasi deforestasi Indonesia tahun 2023, meliputi luas deforestasi per tahun dan sebarannya menurut fungsi Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat di-Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk seluruh Indonesia baik yang hanya terjadi pada hutan alam maupun dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman.

E. Ruang Lingkup

Data deforestasi Indonesia pada tahun 2023 dalam buku ini disajikan dalam bentuk informasi lengkap, baik di dalam Kawasan Hutan maupun di luar kawasan hutan (APL), dan yang terjadi baik pada hutan alami (tipe hutan primer dan hutan sekunder) maupun pada hutan buatan (tipe hutan tanaman).

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Penyusunan data deforestasi, tidak hanya semata merujuk pada data tutupan lahan, namun juga merujuk pada data Kawasan Hutan. Dengan demikian angka deforestasi yang dihasilkan pada buku ini juga sudah menyesuaikan dengan kondisi (data) dan luas baik dalam Kawasan Hutan maupun Areal Penggunaan Lain (APL), terutama luas daratan.
- Istilah deforestasi menyangkut pemahaman deforestasi bruto dan netto. Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan, baik terjadi pada hutan alam maupun hutan tanaman. Sementara deforestasi netto artinya sudah memperhitungkan adanya perubahan tutupan dari tidak berhutan menjadi berhutan. Angka deforestasi netto merupakan angka deforestasi bruto dikurangi reforestasi.
- Perlu dipahami pengertian hutan alami dan hutan buatan (*man-made*), dimana pemisahan informasi hutan alami dan hutan buatan tersebut ditujukan untuk membedakan situasi dimana hutan terbangun secara alami (*natural*) atau disebabkan oleh aktivitas manusia secara intensif (*man-made*). Hutan alami meliputi tipe hutan primer (*intact*) dan sekunder (*degraded atau logged-over*), sementara hutan buatan berupa hutan tanaman, baik hutan tanaman untuk produksi maupun hasil reboisasi.
- Berkenaan dengan urusan pelaporan mengenai isu perubahan iklim dan implementasi REDD+, maka deforestasi bruto dibedakan atas deforestasi bruto secara keseluruhan (hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman) serta deforestasi bruto di hutan alam saja (hutan primer dan hutan sekunder). Dengan pendekatan ini, maka pelaporan terkait REDD+ menggunakan angka deforestasi bruto di hutan alam (pada saat ini lebih sering disebut *gross deforestation*) saja.
- Sejalan dengan angka deforestasi bruto, maka perhitungan angka reforestasi dan deforestasi netto juga dibedakan atas yang hanya terjadi pada hutan alam saja, maupun secara keseluruhan dengan memasukkan perubahan pada hutan tanaman. Hal ini untuk membedakan kejadian pertumbuhan alami dengan kejadian akibat penanaman baru oleh aktivitas manusia (termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah teridentifikasi menjadi hutan)
- Terdapat angka deforestasi netto yang bernilai negatif artinya terjadi reforestasi yang lebih besar dibandingkan deforestasi bruto. Dalam hal ini secara umum pada provinsi dimaksud terdapat penambahan luas areal penutupan berhutan.

F. Batasan Istilah

Beberapa batasan pengertian istilah di dalam Penghitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan yang untuk selanjutnya disebut sebagai KH adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
2. Penutupan lahan adalah penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang dapat berupa areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air;
3. Kondisi penutupan lahan tersaji sesuai dengan sumber data, pendekatan dan metodologi yang dipakai untuk menghasilkan informasi penutupan lahan dimaksud;
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah salah satu kondisi penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman;
5. Non Hutan adalah bentuk penutupan lahan berupa semak/belukar, belukar rawa, savana/padang rumput, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, transmigrasi, sawah, tambak, tanah terbuka, pertambangan, permukiman, rawa dan pelabuhan udara/laut;
6. Hutan konservasi (HK) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
7. Hutan Lindung (HL) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; Hutan Produksi terdiri atas Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Kroduksi yang dapat Dikonversi;
9. Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
10. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan produksi dengan pertimbangan faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan masih dapat memproduksi hasil hutan secara terbatas;
11. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan HP;
12. Hutan Alam adalah kondisi penutupan lahan alami yang berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder;
13. Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik hutan tanaman yang berada di areal IUPHHK-HTI maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam Kawasan Hutan maupun di APL;

- terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.
14. Deforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan).
 15. Deforestasi Bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan), tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi.
 16. Deforestasi Bruto Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (hanya) Alam menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan). Deforestasi Bruto Hutan Alam dipakai untuk memisahkan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan Hutan menjadi kelas penutupan lahan Non Hutan, yang terjadi tidak sebagai akibat pemanenan hutan tanaman (*harvesting*).
 17. Reforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan).
 18. Reforestasi Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan, sebagai akibat adanya pertumbuhan (*growth*) secara alami.
 19. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 1 PP No. 26 Tahun 2020), yang dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH.
 20. Deforestasi Netto yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi.
 21. Deforestasi Netto Hutan Alam, yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan alam pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto hutan alam dikurangi dengan luas reforestasi yang terjadi pada hutan alam.
 22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 23. Perizinan di bidang kehutanan adalah perizinan berusaha di bidang kehutanan yang meliputi perizinan berusaha pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, perizinan berusaha pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan/atau bukan kayu, izin pemungutan Hasil Hutan kayu/atau bukan kayu, izin pinjam pakai Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau pelepasan Kawasan Hutan.
 24. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
 25. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.
 26. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan adalah perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

Catatan (*Disclaimer*)

- Deforestasi tahun 2023 didasarkan pada perhitungan data geospasial hasil penafsiran penutupan lahan tahun 2022 dan tahun 2023. Masing-masing data penutupan lahan tersebut mempergunakan periode pengamatan dari tanggal 1 Juli tahun T-1 sampai dengan 30 Juni tahun T. Catatan ini menegaskan bahwa kejadian deforestasi pada suatu lokasi misal terjadi pada 30 September 2022, baru akan teridentifikasi pada periode pengamatan tahun 2023;
- Perhitungan luas deforestasi Indonesia tahun 2023 dilakukan dengan sistem proyeksi Mercator, dengan pertimbangan cakupan seluruh wilayah Indonesia (46 derajat bujur dan 17 derajat lintang). Hal ini untuk menegaskan bahwa perhitungan luas dapat berbeda dengan hasil perhitungan lapangan, khususnya pada lokasi yang jauh dari khatulistiwa, seperti Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, atau Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Satuan pemetaan minimum pada data geospasial penutupan lahan berukuran 6,25 ha. Hal ini menegaskan bahwa perubahan penutupan lahan yang terjadi dengan ukuran kurang dari 6,25 ha kemungkinan tidak dapat teridentifikasi pada citra sehingga tidak terpetakan. Khusus untuk deforestasi, luasan sebesar 1 ha masih dipetakan;
- Luas hasil identifikasi deforestasi dan reforestasi yang disajikan dalam narasi dan tabel adalah yang berukuran lebih dari 100 ha (0,1 ribu ha). Luasan yang kurang dari ukuran tersebut akan disebutkan secara khusus, akan tetapi besarnya tidak akan ditampilkan (dinyatakan NDP). Perkecualian dilakukan pada Bab III, yang menyediakan beberapa tabel khusus untuk menyajikan informasi besaran deforestasi yang sangat kecil (NDP). Basis data spasial untuk poligon berukuran kurang dari 100 ha (NDP) tetap akan dipertahankan dalam berkas *Geodatabase*;
- Luasan deforestasi netto yang disajikan dapat bernilai positif atau negatif. Deforestasi netto bernilai positif berarti luasan hutan suatu wilayah telah berkurang dari tahun sebelumnya. Deforestasi netto bernilai negatif berarti luasan hutan suatu wilayah bertambah dari tahun sebelumnya (terjadi reforestasi lebih besar dari deforestasi);
- Khusus untuk objek berupa hutan tanaman hanya dihitung deforestasi sekali pada saat terjadi perubahan dari Hutan Alam menjadi Hutan Tanaman, dan untuk kegiatan pemanenan dianggap sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan deforestasi;
- Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto adalah seluruh perubahan hutan tanaman, baik di dalam maupun di luar area konsesi, menjadi penutupan lahan lain secara permanen. Perubahan permanen maksudnya adalah dimana tidak ada jaminan areal tersebut akan ditanam (menjadi hutan tanaman) kembali. Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi netto adalah hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto dikurangkan dengan reforestasi;
- Hutan tanaman yang dihitung untuk reforestasi adalah bertambahnya tanaman hasil reforestasi baik di dalam maupun di luar Konsesi Hutan Tanaman Industri;
- Khusus untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan akan dimasukkan dalam perhitungan reforestasi, apabila hasil identifikasi pada citra penginderaan jauh menunjukkan bahwa lokasi rehabilitasi hutan dan lahan tersebut sudah layak dikelaskan sebagai hutan;

BAB II

METODOLOGI



BAB II METODOLOGI

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan deforestasi adalah data geospasial (format digital) yang tersedia pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tingkat ketelitian skala 1:250.000. Data geospasial tersebut meliputi:

1. Data geospasial penutupan lahan hasil penafsiran Citra *Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI periode pengamatan tahun 2022 dan tahun 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Data geospasial Dasar Indonesia (Rupa Bumi Indonesia - RBI) skala 1:50.000 per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK (Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Data geospasial Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK;
4. Data geospasial Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

Data geospasial Penutupan lahan berasal dari hasil penafsiran citra citra satelit secara visual dengan cara mendelineasi penampakan objek pada citra satelit yang disajikan di layar komputer (digitasi *on-screen*) dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000, sehingga unit terkecil yang dapat dipetakan adalah seluas 6,25 hektar. Hasil penafsiran berupa 23 kelas penutupan lahan yang dikelompokkan menjadi Kategori Hutan dan Non-Hutan, selengkapnya tersaji pada tabel II.1 berikut:

Tabel II. 1 Sistem Klasifikasi Penutupan Lahan (23 Kelas) disertai kode layer dan kode toponimi

No	Kelas	Kode layer /toponimi	Keterangan
A.	HUTAN		
	A.1 HUTAN ALAM		
1	Hutan lahan kering primer	Hp/2001	Seluruh kenampakan hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan pegunungan (dataran tinggi dan subalpin), hutan kerdil, hutan kerangas, hutan di atas batuan kapur, hutan di atas batuan ultra basa, hutan daun jarum, hutan luruh daun dan hutan lumut (ekosistem alami) yang tidak menampakkan gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll.) Ekosistem alami yang mengikuti pengetahuan lokal sebagai hutan, tetap diklasifikasikan hutan (bukan belukar) sebagai contoh Tipe Hutan Alam di Pulau Flores, Sumbawa, Rote, Maluku Tenggara dan pulau lainnya dalam garis Wallacea dan Webber; hutan karst di Maros, Muna, dan Kalimantan Timur; serta hutan alam kerapatan rendah.

No	Kelas	Kode layer /toponi mi	Keterangan
2	Hutan lahan kering sekunder	Hs/2002	Hutan lahan kering primer yang mengalami gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan, dll.), termasuk yang tumbuh kembali dari bekas tanah terdegradasi.
3	Hutan rawa primer	Hrp / 2005	Seluruh kenampakan hutan yang berada pada daerah tergenang air tawar dan di belakang hutan payau yang tidak menampakkan gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll.) termasuk hutan sagu.
4	Hutan rawa sekunder	Hrs/20051	Hutan rawa primer yang mengalami gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan, dll). Bekas tebangan parah jika tidak memperlihatkan tanda genangan (liputan air) secara permanen dikelaskan sebagai lahan terbuka, sedangkan jika memperlihatkan bekas genangan atau tergenang secara temporal dikelaskan sebagai rawa.
5	Hutan mangrove primer	Hmp/2004	Seluruh kenampakan hutan (bakau, nipah dan nibung) yang berada di lingkungan perairan payau yang tidak menampakkan gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), tidak termasuk gangguan alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dll.).
6	Hutan mangrove sekunder	Hms/ 20041	Hutan mangrove primer yang mengalami gangguan manusia (bekas penebangan, bekas kebakaran, jaringan jalan dll.), termasuk yang tumbuh/ditanam pada tanah sedimentasi.
	A.2 HUTAN TANAMAN		
7	Hutan tanaman	Ht/2006	Seluruh kenampakan hutan yang seragam (monokultur) yang dapat berasal dari kegiatan reboisasi/reklamasi/penghijauan/industri. Catatan: Lahan terbuka pada kelas Hutan Tanaman karena rotasi panen dan penanaman secara temporal tetap dikelaskan sebagai kelas Hutan Tanaman. Tanaman Karet di dalam/di luar areal IUPPHK-HT diklasifikasikan sebagai kelas Perkebunan.
B.	NON HUTAN		
8	Perkebunan	Pk/2010	Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman keras yang termasuk kelompok perkebunan, antara lain sawit, karet, kelapa, coklat, kopi, teh. Catatan: Perkebunan dengan jenis tanaman tahunan yang dapat dibedakan secara homogen; Ukuran blok yang dikelaskan sebagai perkebunan (sawit) sekitar 30 ha (300 m x 1000 m); Lahan terbuka pada kelas Perkebunan karena peremajaan/pergantian komoditas secara temporal tetap dikelaskan sebagai Perkebunan.
9	Semak belukar	B/2007	Seluruh kenampakan areal/kawasan yang didominasi oleh vegetasi rendah yang berada pada lahan kering. Catatan: Semak belukar yang didominasi oleh vegetasi rendah (di bawah 5 m), berpotensi untuk regenerasi menjadi hutan.
10	Semak belukar rawa	Br/20071	Seluruh kenampakan areal/kawasan yang didominasi oleh vegetasi rendah dan berada pada daerah tergenang air tawar serta di belakang hutan payau.

No	Kelas	Kode layer /toponimi	Keterangan
11	Savanna / Padang rumput	S/3000	Seluruh kenampakan vegetasi rendah alami dan permanen yang berupa padang rumput. Kenampakan ini merupakan kenampakan alami di sebagian Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan bagian Selatan Papua, juga dapat ditemukan di Jawa. Pada beberapa savanna terdapat sedikit semak atau pohon. Savanna bisa terdapat pada lahan kering ataupun rawa (rumput rawa, misalnya rumput rawa di Wasur).
12	Pertanian lahan kering	Pt/20091	Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman semusim di lahan kering seperti tegalan dan ladang.
13	Pertanian lahan kering campur	Pc /20092	Seluruh kenampakan yang merupakan campuran areal pertanian, perkebunan, semak dan belukar. Kelas ini sering muncul pada areal perladangan berpindah, dan rotasi tanam lahan karst. serta memasukkan kelas yang dipahami sebagai kebun campuran, hutan rakyat atau agroforestry.
14	Sawah	Sw/ 20093	Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman semusim di lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang. Pertanian lahan basah dikelaskan sebagai sawah, termasuk areal pertanian yang pada penggunaan awalnya sawah dan pada musim kemarau ditanami tanaman semusim tetap dikelaskan sebagai sawah. Yang perlu diperhatikan oleh penafsir adalah fase rotasi tanam yang terdiri atas fase penggenangan, fase tanaman muda, fase tanaman tua dan fase bera. Kelas ini juga memasukkan sawah musiman, sawah tadah hujan, sawah irigasi. Khusus untuk sawah musiman di daerah rawa membutuhkan informasi tambahan dari lapangan.
15	Tambak	Tm /20094	Seluruh kenampakan perikanan darat (ikan/udang) atau penggaraman yang tampak dengan pola pematang, biasanya berada di sekitar pantai. Di beberapa lokasi dapat berasal dari hutan rawa, rawa atau belukar rawa.
16	Permukiman	Pm/2012	Kawasan permukiman, baik perkotaan, perdesaan, industri dll.
17	Permukiman transmigrasi	Tr/20122	Kawasan permukiman di wilayah transmigrasi serta terdapat di dalam areal izin transmigrasi. Lahan garapan dipisahkan dari permukiman.
18	Lahan terbuka	T/2014	Seluruh kenampakan lahan terbuka tanpa vegetasi, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia (singkapan batuan puncak gunung, puncak bersalju, kawah vulkan, gosong pasir, pasir pantai, endapan sungai, pembukaan lahan serta areal bekas kebakaran). Kenampakan lahan terbuka untuk pertambangan dikelaskan pertambangan, sedangkan lahan terbuka bekas pembersihan lahan / land clearing diklasifikasikan sebagai lahan terbuka. Lahan terbuka dalam rangka rotasi tanam sawah / tambak tetap dikelaskan sebagai sawah / tambak.
19	Pertambangan	Tb/20141	Lahan terbuka yang digunakan untuk aktivitas pertambangan terbuka- <i>open pit</i> (seperti batubara, timah, tembaga dll.), serta lahan pertambangan tertutup skala besar yang dapat diidentifikasi dari citra berdasar asosiasi kenampakan objeknya, termasuk <i>tailing ground</i> (penimbunan limbah penambangan). Lahan pertambangan tertutup skala kecil atau yang tidak teridentifikasi dikelaskan menurut kenampakan permukaannya.

No	Kelas	Kode layer /toponi mi	Keterangan
20	Tubuh air	A/5001	Semua kenampakan perairan, termasuk laut, sungai, danau, waduk, terumbu karang, padang lamun dll. Kenampakan tambak, sawah dan rawa-rawa telah digolongkan tersendiri.
21	Rawa	Rw/50011	Kenampakan lahan rawa (tergenang air tawar serta di belakang hutan payau) yang sudah tidak berhutan. Rawa biasanya berada di daerah cekungan atau dataran yang lebih rendah dibanding daerah sekitarnya.
22	Awan	Aw/2500	Kenampakan awan yang menutupi lahan suatu kawasan dengan ukuran lebih dari 4 cm ² pada skala penyajian. Jika liputan awan tipis masih memperlihatkan kenampakan di bawahnya dan memungkinkan ditafsir tetap didelineasi.
23	Bandara / Pelabuhan	Bdr/Plb / 20121	Kenampakan bandara dan pelabuhan yang berukuran besar dan memungkinkan untuk didelineasi tersendiri.

Sumber :

- SNI 8033:2014 tentang Metode penghitungan Perubahan Tutupan Hutan berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik secara Visual.
- Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional Nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020 (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan)

B. Analisis dan Penyajian Data

Penghitungan deforestasi dilaksanakan melalui analisis data penutupan lahan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis. Tahapan penghitungan dan penyajian data deforestasi adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan data geospasial penutupan lahan hasil penafsiran (interpretasi) *Citra Landsat 8 OLI/LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* liputan tahun 2022 dan 2023 beserta data geospasial terkait berupa RBI, batas wilayah administrasi pemerintahan, dan kawasan hutan. Kegiatan penyiapan data geospasial termasuk verifikasi kelengkapan berupa atribut dan topologi spasial.
2. Analisis geospasial, yang terdiri atas tahapan:
 - a. Tumpang susun (*overlay*) data geospasial penutupan lahan tahun 2022 dan 2023 dengan data geospasial kawasan hutan;
 - b. Identifikasi data geospasial hasil tumpang susun yang mengalami perubahan penutupan lahan pada setiap fungsi kawasan hutan dan areal penggunaan lain.
3. Penghitungan besaran deforestasi pada setiap fungsi kawasan hutan serta APL. Catatan: Tubuh air (danau, sungai besar, laut (termasuk kawasan konservasi perairan)) tidak dimasukkan dalam penghitungan. Penyajian hasil analisis geospasial berupa luas dan sebaran deforestasi pada kawasan hutan dan APL dalam bentuk peta, diagram dan tabel. Proses selengkapanya disajikan pada Gambar 1.
4. Proses analisis dilakukan dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Deforestasi diperhitungkan dengan batasan sebagai berikut
 - i. Penghitungan deforestasi dan reforestasi dilakukan **SECARA SPASIAL** dengan beberapa langkah sebagai berikut:
 - (1) Mengidentifikasi setiap poligon yang termasuk kelompok penutupan lahan **berhutan** (H) atau kelompok penutupan lahan **bukan hutan** (NH)

pada setiap periode pengamatan, yaitu 2022 (t) atau 2023 ($t+1$). Rincian kelompok H dan NH adalah sebagaimana uraian pada butir I.F.4 dan I.F.5;

- (2) Mengidentifikasi setiap poligon sebagaimana butir II.B.4.a.i.(1) pada periode pengamatan berbeda menjadi poligon **deforestasi** (DEF) (*tahun 2022 H dan tahun 2023 NH*), poligon **tetap berhutan** (H) (*tahun 2022 H dan tahun 2023 H*), poligon **tetap tidak berhutan** (NH) (*tahun 2022 NH dan tahun 2023 NH*), serta poligon **reforestasi** (REF) (*tahun 2022 NH dan tahun 2023 H*), yang diuraikan secara detil dengan formula sebagai berikut:

$$L_t \rightarrow L_{t+1} \begin{cases} \frac{L_t = H; L_{t+1} = H; (F)}{L_t = H; L_{t+1} = NH; (DEF)} & \frac{L_t = NH; L_{t+1} = NH; (NF)}{L_t = NH; L_{t+1} = H; (REF)} \end{cases} \quad \text{Formula (1)}$$

di mana:

L_t : luas penutupan lahan y pada tahun 2022, *pada poligon x*

L_{t+1} : luas penutupan lahan y pada tahun 2023, *pada poligon x*;

y: variable kelompok penutupan lahan, dapat berupa H atau NH;

H: kelompok penutupan lahan berupa hutan, *pada poligon x*;

NH: kelompok penutupan lahan berupa bukan hutan, *pada poligon x*;

F: kelompok perubahan penutupan lahan (tetap berhutan);

NF: kelompok perubahan penutupan lahan (tetap bukan hutan);

DEF: kelompok perubahan penutupan lahan (yang mengalami deforestasi);

REF: kelompok perubahan penutupan lahan (yang mengalami reforestasi);

atau dengan Tabel II.2 berikut:

Tabel II. 2 Logika penentuan suatu poligon hasil analisis perubahan penutupan lahan termasuk sebagai H, NH, DEF, atau REF

Perubahan Penutupan lahan		L_{t+1}	
		H	NH
L_t	H	$\sum_t^{t+1} H$	$\sum_t^{t+1} DEF$
	NH	$\sum_t^{t+1} REF$	$\sum_t^{t+1} NH$

- (3) Formula (1) atau Tabel II.2 kemudian menjadi dasar dalam memperhitungkan besaran akumulasi dari penjumlahan setiap poligon yang teridentifikasi sebagai **deforestasi** (DEF) (*tahun 2022 sebagai hutan dan tahun 2023 sebagai bukan hutan*), **reforestasi** (REF) (*tahun 2022 sebagai bukan hutan dan tahun 2023 sebagai hutan*), **tetap berhutan** (H) (*tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai hutan*), atau **tetap tidak berhutan** (NH) (*tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai bukan hutan*) yang diuraikan secara detil dengan formula sebagai berikut:

$$\sum_t^{t+1} DEF = \sum_t^{t+1} (L_t = H \rightarrow L_{t+1} = NH) \quad \text{Formula (2)}$$

$$\sum_t^{t+1} REF = \sum_t^{t+1} (L_t = NH \rightarrow L_{t+1} = H) \quad \text{Formula (3)}$$

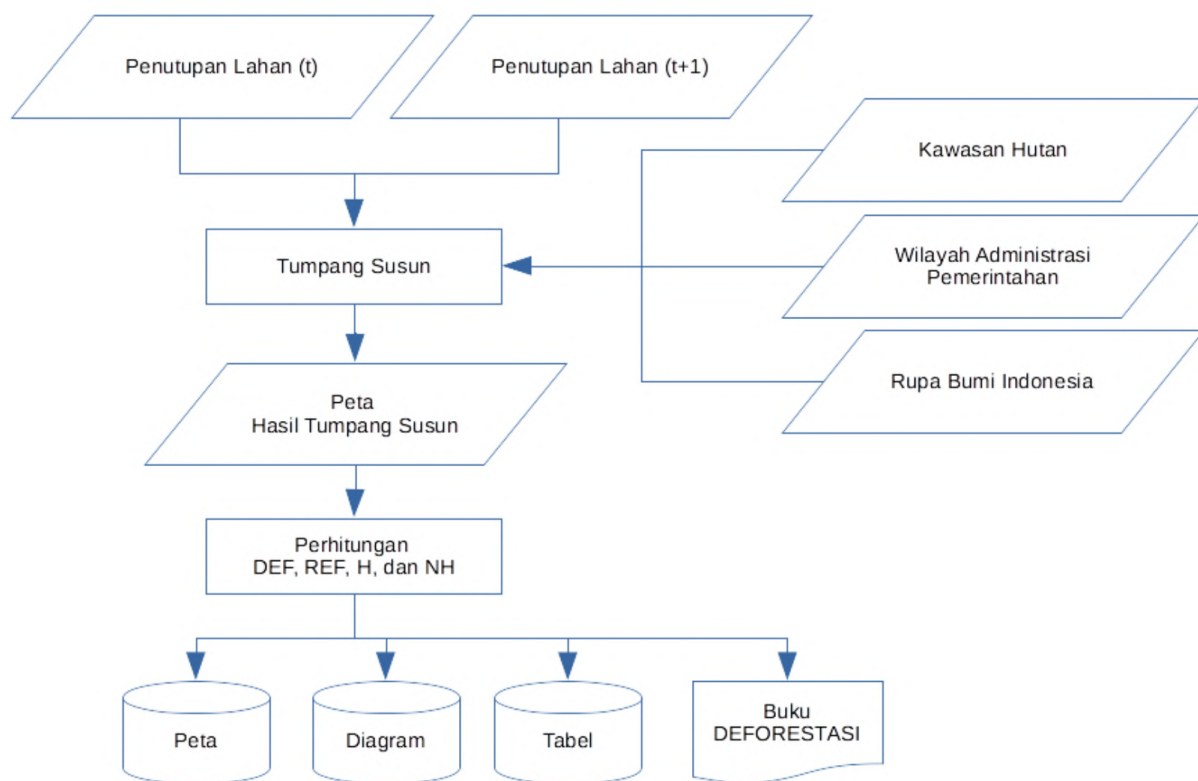
$$\sum_t^{t+1} H = \sum_t^{t+1} (L_t = H \rightarrow L_{t+1} = H) \quad \text{Formula (4)}$$

$$\sum_t^{t+1} NH = \sum_t^{t+1} (L_t = NH \rightarrow L_{t+1} = NH) \quad \text{Formula (5)}$$

- ii. Penghitungan deforestasi **TIDAK** dilakukan dengan menghitung (pada tabel) selisih jumlah luas areal berhutan tahun 2022 dengan jumlah luas areal berhutan tahun 2023;
- iii. Penghitungan Deforestasi Netto dilakukan pada kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2022 merupakan Hutan sedangkan pada liputan tahun 2023 mengalami perubahan menjadi Tidak Berhutan (Non Hutan) [mengalami Deforestasi], dikurangi kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2022 merupakan Tidak Berhutan (Non Hutan) dan pada liputan tahun 2023 merupakan penutupan Berhutan [mengalami Reforestasi], yang diuraikan secara detil dengan formula sebagai berikut:

$$\Delta DEF_{Netto} = \sum_t^{t+1} DEF - \sum_t^{t+1} REF \quad \text{Formula (6)}$$

- iv. Penghitungan Deforestasi Netto Hutan Alam dilakukan pada kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2022 merupakan Hutan Alam sedangkan pada liputan tahun 2023 mengalami perubahan menjadi Tidak Berhutan (Non Hutan) [mengalami Deforestasi], dikurangi kondisi penutupan lahan yang pada liputan tahun 2022 merupakan Tidak Berhutan (Non Hutan) sedangkan pada liputan tahun 2023 mengalami perubahan menjadi Berhutan Alam [mengalami Reforestasi].
- b. Perhitungan besaran deforestasi dilakukan dengan parameter sebagai berikut:
 - i. Proyeksi Mercator
 - ii. Sistem koordinat lintang dan bujur;
 - iii. Datum WGS84;
 - iv. Satuan luas (dalam berkas Geodatabase) hektar (disajikan dalam buku dalam satuan ribuan hektar).



Gambar 1. Bagan Alur Proses Perhitungan Deforestasi Indonesia

BAB III HASIL PENGHITUNGAN DEFORESTASI INDONESIA



BAB III

HASIL PENGHITUNGAN DEFORESTASI INDONESIA

Berikut ini akan disajikan hasil perhitungan deforestasi Indonesia pada periode pengamatan tahun 2023 dengan urutan deforestasi seluruh wilayah Indonesia (dianalisis pada setiap kelompok pulau), disusul kemudian deforestasi pada setiap provinsi, dan terakhir deforestasi pada setiap fungsi kawasan hutan. Untuk deforestasi Indonesia dan deforestasi pada setiap provinsi akan diuraikan lebih detil lagi dengan deforestasi bruto, reforestasi, dan kemudian deforestasi netto.

A. Deforestasi Indonesia

Deforestasi yang dihitung dalam buku ini meliputi deforestasi bruto, reforestasi, dan deforestasi netto. Deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan deforestasi bruto dengan reforestasi (Formula 6). Oleh karena itu, sebelum menyajikan deforestasi netto maka terlebih dahulu perlu disajikan deforestasi bruto dan reforestasi Indonesia, yang disajikan untuk setiap kelompok pulau, dan setiap provinsi. Perhitungan deforestasi dan reforestasi juga dilakukan secara kelompok hutan (hutan alam dan hutan tanaman) maupun maupun kelompok hutan alam saja

(1) Deforestasi Bruto Indonesia

Deforestasi bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori non-hutan (tidak berhutan). Perubahan tersebut berdasarkan perhitungan data geospasial (digital) hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI* liputan tahun 2022 dan 2023. Deforestasi bruto dalam hal ini juga mencakup deteksi perubahan tutupan dari hutan tanaman menjadi penutupan lahan hutan lain secara permanen (misal untuk pertambangan)

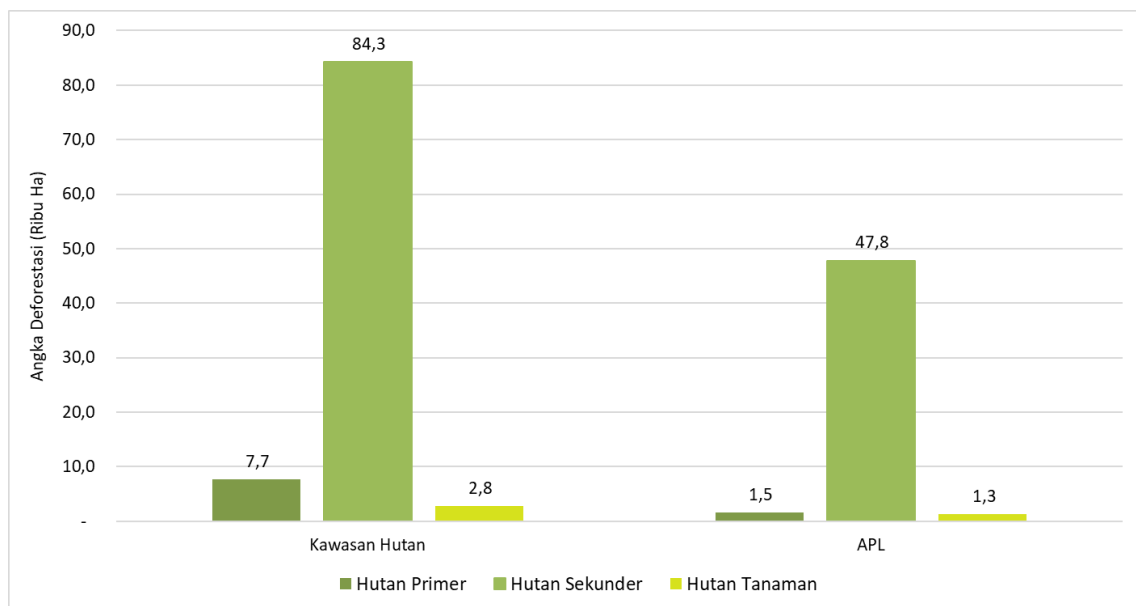
Deforestasi bruto Indonesia tahun 2023 sebesar 145,4 ribu ha. Dari besaran tersebut, proporsi terbesar terjadi pada penutupan hutan sekunder yaitu sebesar 132,1 ribu ha (90,8%), diikuti pada hutan primer sebesar 9,2 ribu ha (6,3%) dan hutan tanaman sebesar 4,1 ribu ha (2,8%).

Kemudian, deforestasi bruto yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 94,8 ribu ha atau 65,2% dari total deforestasi bruto 145,4 ribu ha, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 50,7 ribu ha (34,8%). Deforestasi bruto di dalam kawasan hutan paling tinggi terjadi di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu sebesar 55,7 ribu ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu sebesar 19,1 ribu ha. Deforestasi bruto juga terjadi pada fungsi lindung bahkan konservasi, walaupun tidak sebesar yang terjadi di HP yaitu di Hutan Konservasi (HK) sebesar 5,7 ribu ha dan Hutan Lindung (HL) sebesar 8,1 ribu ha.

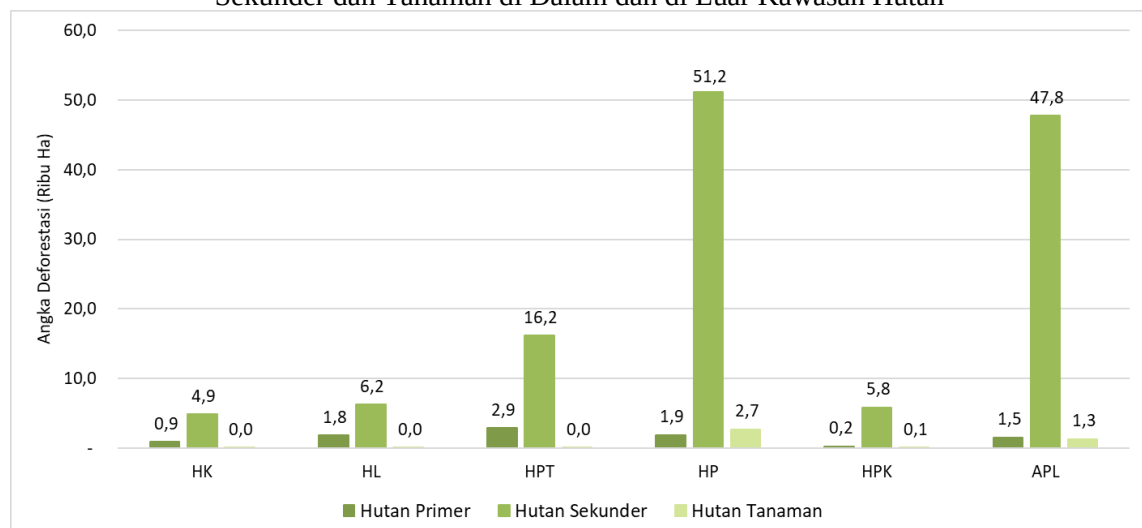
Deforestasi Bruto Hutan Alam adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan hanya kategori Hutan Alam (Hutan Primer dan Hutan Sekunder) menjadi kelas penutupan lahan kategori non hutan (tidak berhutan). Deforestasi Bruto Hutan Alam Indonesia tahun 2023 sebesar 141,3 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan sebesar

92,0 ha atau 65,1 % dari total deforestasi bruto hutan alam, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 49,3 (34,9%). Deforestasi bruto Hutan Alam di dalam kawasan hutan paling tinggi terjadi di fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu sebesar 53,0 ribu ha (37,5%) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu sebesar 19,0 ribu ha (13,5%). Deforestasi Bruto Hutan Alam juga terjadi pada fungsi HK sebesar 5,7 ribu ha (4,0%), HL sebesar 8,1 ribu ha (5,7%) dan HPK sebesar 6,1 ribu ha (4,3%). Apabila perhatian hanya difokuskan pada menjaga hutan alam, maka deforestasi bruto hutan alam inilah yang terkait dengan mekanisme REDD+.

Secara lengkap, deforestasi bruto Indonesia pada tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman disajikan pada Gambar 2 dan 3 berikut ini.



Gambar 2. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2023 (Ribu ha) pada Hutan Primer, Sekunder dan Tanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



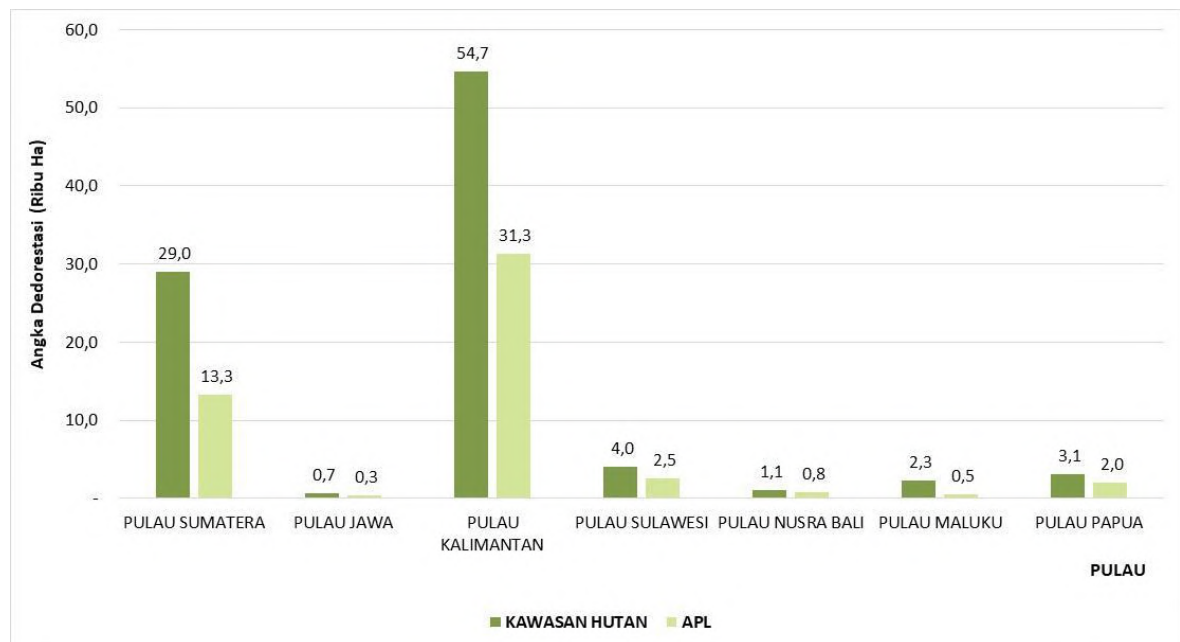
Gambar 3. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia Tahun 2023 (Ribu Ha)

Sebaran deforestasi bruto di setiap kelompok pulau di Indonesia menunjukkan angka yang berbeda. Deforestasi bruto tertinggi terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 85,9 ribu ha atau 59,1% dari total deforestasi bruto Indonesia, diikuti dengan Kelompok

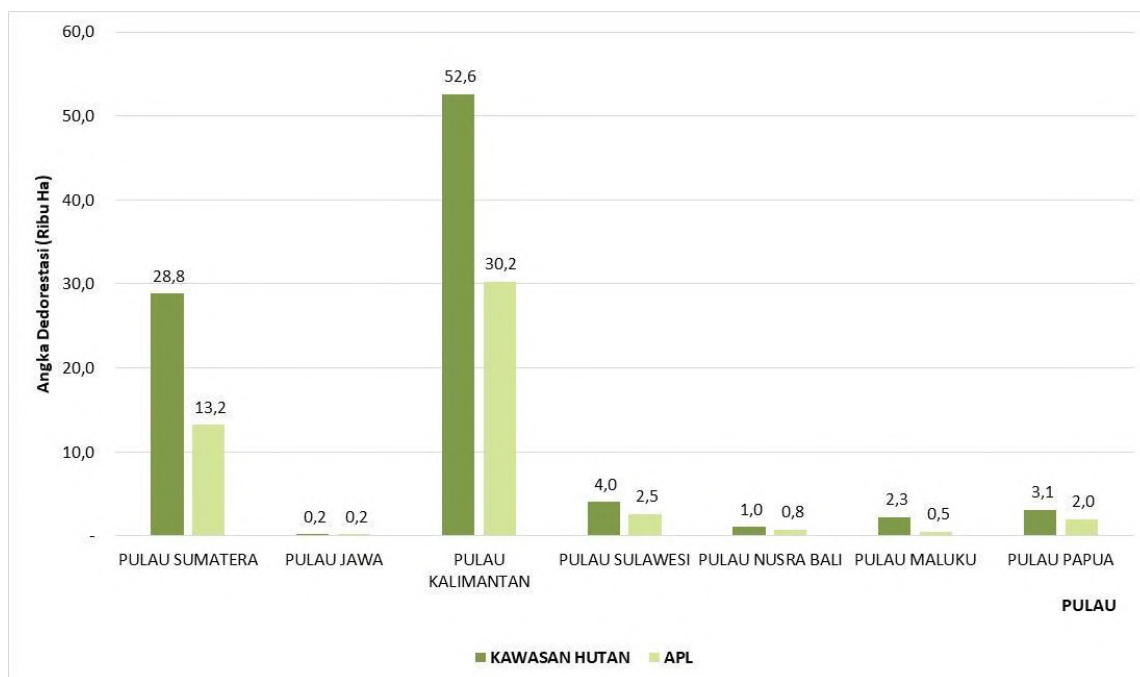
Pulau Sumatera dengan deforestasi bruto sebesar 42,3 ribu ha (29,1%). Deforestasi bruto terendah terjadi di Kelompok Pulau Jawa sebesar 1,1 ribu ha (0,7%).

Deforestasi bruto hutan alam tertinggi terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 82,8 ribu ha atau 58,6% dari total Deforestasi Bruto Hutan Alam Indonesia, diikuti dengan Kelompok Pulau Sumatera dengan deforestasi bruto hutan alam sebesar 42,0 ribu ha (29,7%). Deforestasi bruto hutan alam terendah terjadi di Kelompok Pulau Jawa sebesar 0,4 ribu ha (0,2%).

Sebaran Deforestasi Bruto di setiap kelompok pulau di Indonesia selengkapnya disajikan pada Gambar 4, sementara Deforestasi Bruto Hutan Alam di setiap kelompok pulau di Indonesia disajikan pada Gambar 5.



Gambar 4. Diagram Deforestasi Bruto Indonesia tahun 2023 (Ribu Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan



Gambar 5. Diagram Deforestasi Bruto Hutan Alam tahun 2023 (Ribu Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

(2) Reforestasi Indonesia

Reforestasi adalah kelompok penutupan lahan yang pada periode pengamatan tahun 2022 dinyatakan sebagai bukan hutan, kemudian pada tahun 2023 dinyatakan sebagai hutan. Reforestasi terjadi karena beberapa hal, antara lain yang terjadi alami (sebagai contoh pertumbuhan dari belukar menjadi hutan sekunder) atau karena aktivitas penanaman, baik yang berupa pertumbuhan tanaman (*regrowth*), atau hasil dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Reforestasi dapat terjadi di dalam kawasan hutan (areal perizinan berusaha hutan tanaman, tumbuh alami, maupun areal rehabilitasi) maupun di luar kawasan hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan menjadi salah satu sumber terjadinya reforestasi. Reforestasi yang bersumber dari reforestasi didapatkan dari hasil identifikasi penutupan lahan kemudian ditumpang-susunkan dengan lokasi penanaman kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi lapangan pada beberapa titik sampel, hasil upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum dapat terdeteksi secara jelas sebagai salah satu sumber reforestasi.

Reforestasi Indonesia yang terdeteksi untuk periode pengamatan tahun 2023 adalah sebesar 24,3 ribu ha. Reforestasi tersebut bersumber dari kelas penutupan lahan berupa hutan sekunder dan hutan tanaman yaitu masing-masing sebesar 7,5 ribu ha (30,7%) dan 16,9 ribu ha (69,3%).

Reforestasi di dalam kawasan hutan tertinggi terjadi di kawasan HP yaitu 17,4 ribu ha atau 71,6%, diikuti di HL sebesar 2,0 ribu ha (8,3%), HPT sebesar 1,6 ribu ha (6,6%), HK sebesar 1,2 ribu ha atau 5,1%, dan pada HPK sebesar 0,3 ribu ha atau 1,4%. Sedangkan untuk reforestasi di luar kawasan hutan (APL) yaitu sebesar 1,7 ribu ha (7,1%).

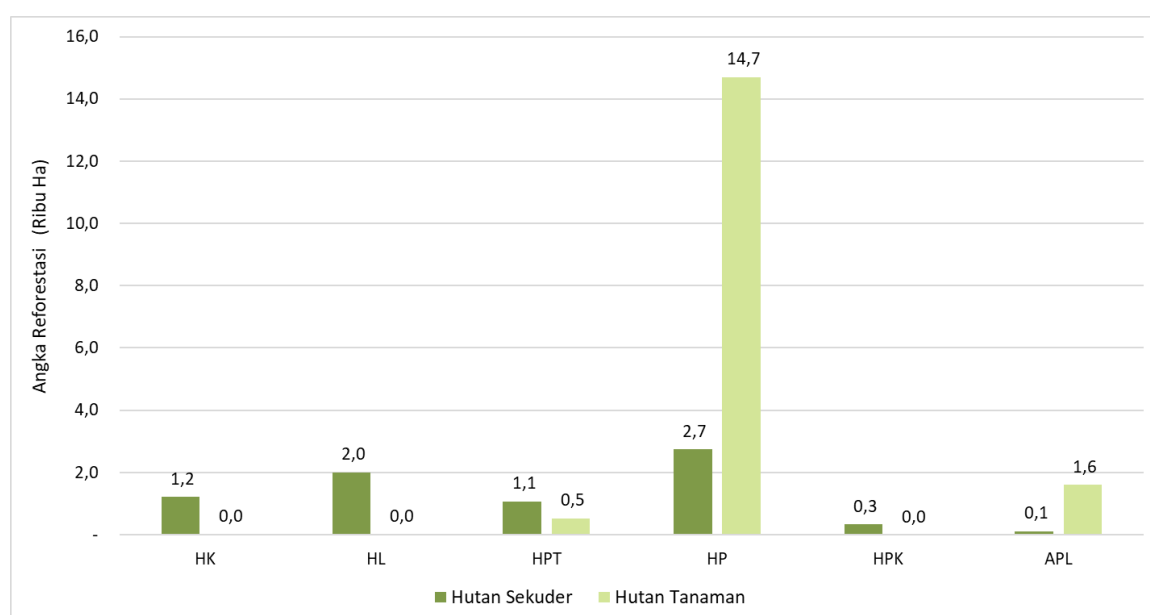
Sementara itu, Reforestasi Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori non hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan

kategori Hutan Alam (Hutan Primer dan Hutan Sekunder). Reforestasi Hutan Alam Indonesia tahun 2023 sebesar 7,5 ribu ha dengan rincian di dalam kawasan hutan sebesar 7,4 ribu ha atau 98,5 %, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 0,1 ribu ha (1,5 %). Reforestasi Hutan Alam di dalam kawasan hutan terjadi pada HK sebesar 1,2 ribu ha (16,5%), HL sebesar 2,0 ribu ha (27,2%), HPT sebesar 1,1 ribu ha (14,5%), HP sebesar 2,7 ribu ha (37,1%) dan HPK sebesar 0,3 ribu ha (4,6%). Secara lengkap, reforestasi Indonesia pada tipe sekunder dan tanaman disajikan pada Gambar 6.

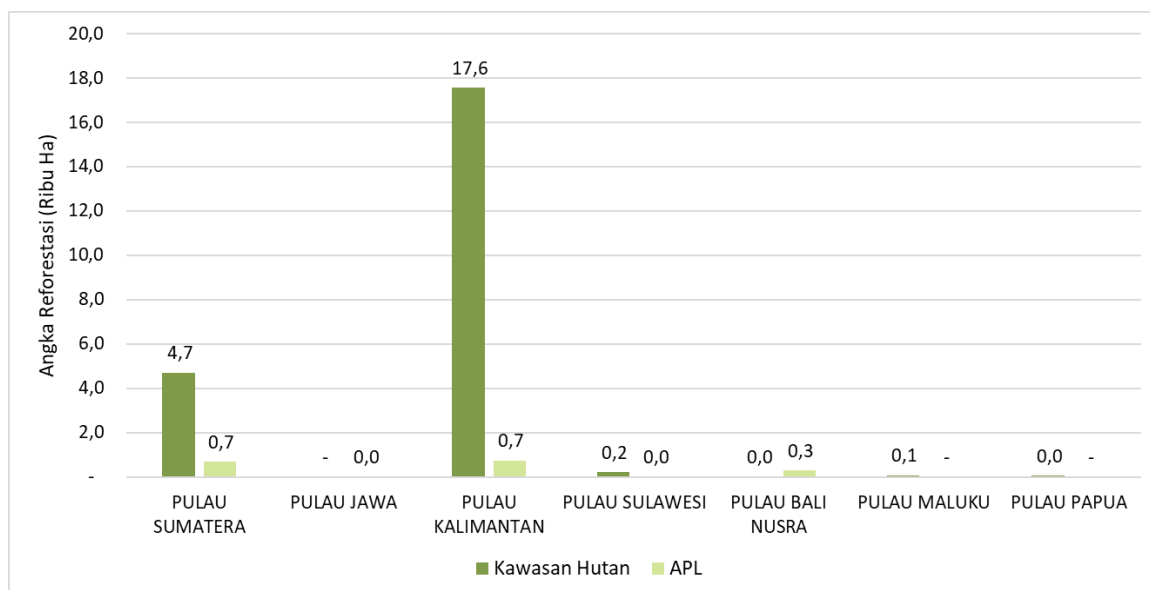
Berdasarkan sebaran reforestasi pada tujuh kelompok pulau, reforestasi tertinggi terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 18,3 ribu ha atau 75,2 % dari reforestasi Indonesia, diikuti dengan reforestasi di Kelompok Pulau Sumatera sebesar 5,4 ribu ha (22,1%), Kelompok Pulau Bali Nusa Tenggara sebesar 0,3 ribu ha (1,3%), Kelompok Pulau Sulawesi sebesar 0,2 ribu ha (0,8%), Kelompok Pulau Maluku sebesar 0,1 ribu ha (0,3%), Kelompok Pulau Papua sebesar 0,05 ribu ha (0,2%). Reforestasi paling rendah terjadi pada Kelompok Pulau Jawa sebesar 2,6 ha.

Sementara itu, sebaran Reforestasi Hutan Alam di setiap kelompok pulau di Indonesia menunjukkan tingkatan antar pulau yang berbeda dengan reforestasi secara keseluruhan. Reforestasi hutan alam terjadi di seluruh Kelompok Pulau. Reforestasi Hutan Alam tertinggi terjadi pada Kelompok Pulau Kalimantan seluas 7,0 ribu ha, diikuti Kelompok Pulau Sulawesi seluas 0,2 ribu ha, Kelompok Kepulauan Sumatera seluas 0,1 ribu ha, Kelompok Pulau Maluku seluas 0,1 ribu ha, Kelompok Pulau Papua seluas 0,05 ribu ha dan Kelompok Pulau Bali Nusa Tenggara seluas 0,02 ribu ha. Reforestasi pada hutan alam paling rendah terjadi pada Kelompok Pulau Jawa seluas 2,6 ha.

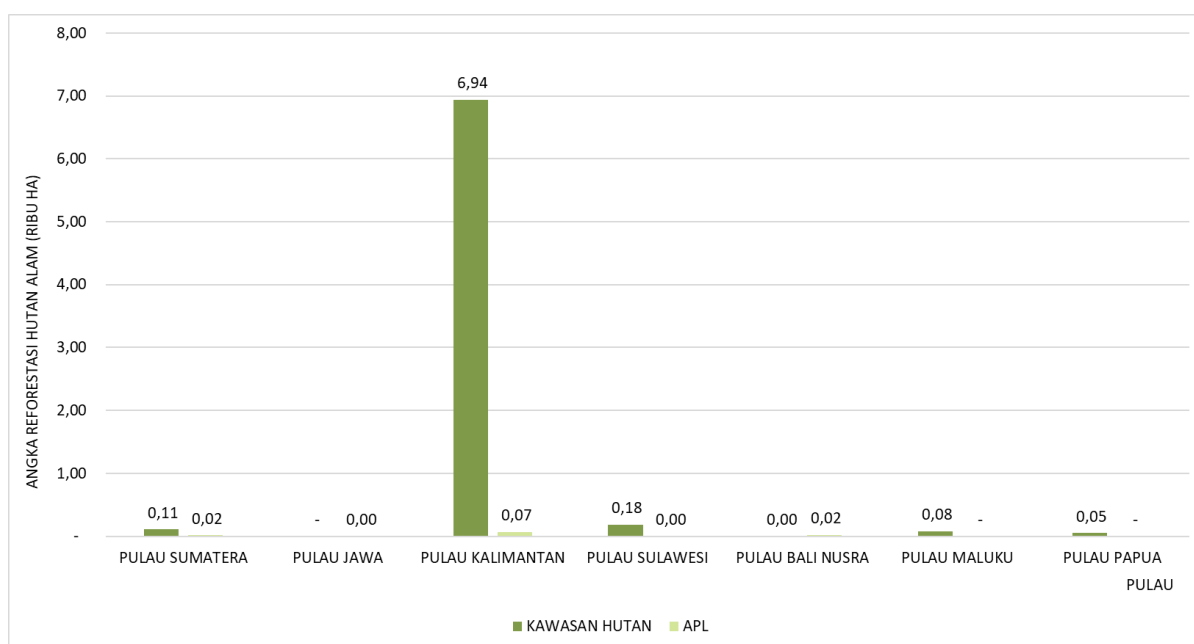
Sebaran Reforestasi di setiap kelompok pulau di Indonesia selengkapnya disajikan pada Gambar 7, sementara Reforestasi Hutan Alam di setiap kelompok pulau di Indonesia disajikan pada Gambar 8.



Gambar 6. Diagram Reforestasi Indonesia Tahun 2023 (Ribu Ha)



Gambar 7. Diagram Reforestasi tahun 2023 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



Gambar 8. Diagram Reforestasi Hutan Alam tahun 2023 (Ribuan Ha) pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

(3) Deforestasi Netto Indonesia

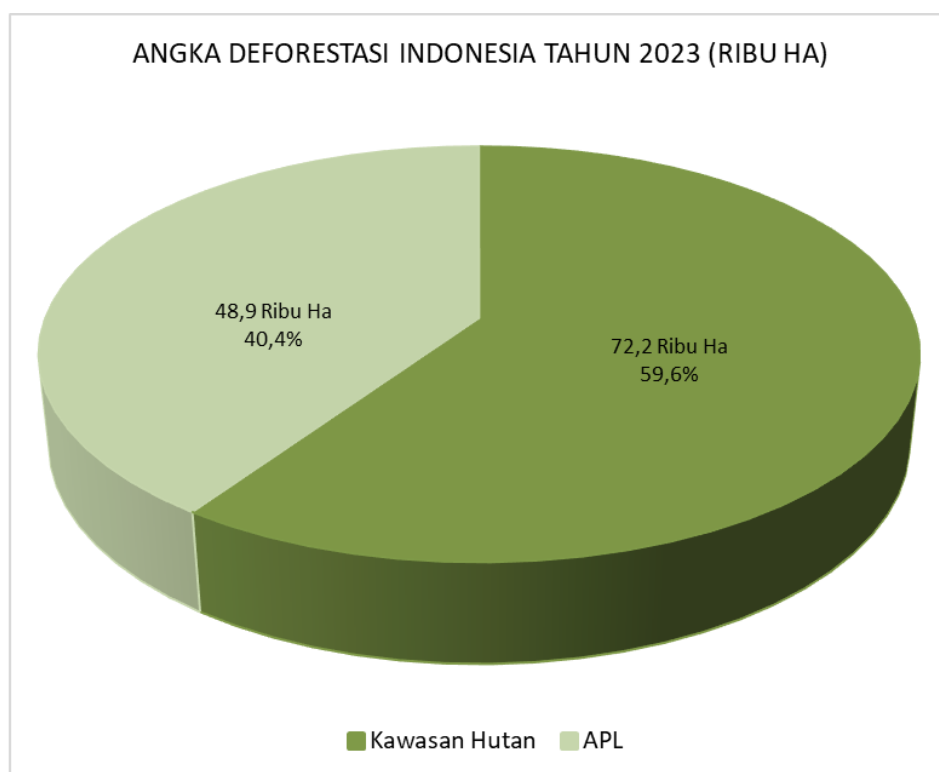
Deforestasi Netto dihitung berdasarkan selisih deforestasi bruto dan reforestasi (Formula 6), dengan hasil perhitungan deforestasi netto selengkapnya sebagai berikut:

Tabel III. 1 Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribu Ha) Tahun 2023

NO.	TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Deforestasi Netto Hutan Alam	4,5	6,1	18,0	50,3	78,8	5,8	84,6	49,2	133,8
	A. Hutan Primer	0,9	1,8	2,9	1,9	7,4	0,2	7,7	1,5	9,2
	B. Hutan Sekunder	3,6	4,2	15,1	48,4	71,4	5,5	76,9	47,7	124,6
2	Deforestasi Netto (A+B+C)	4,5	6,1	17,5	38,3	66,4	5,8	72,2	48,9	121,1
	C. Hutan Tanaman*	0,0	0,0	-0,5	-12,0	-12,5	0,1	-12,4	-0,3	-12,7

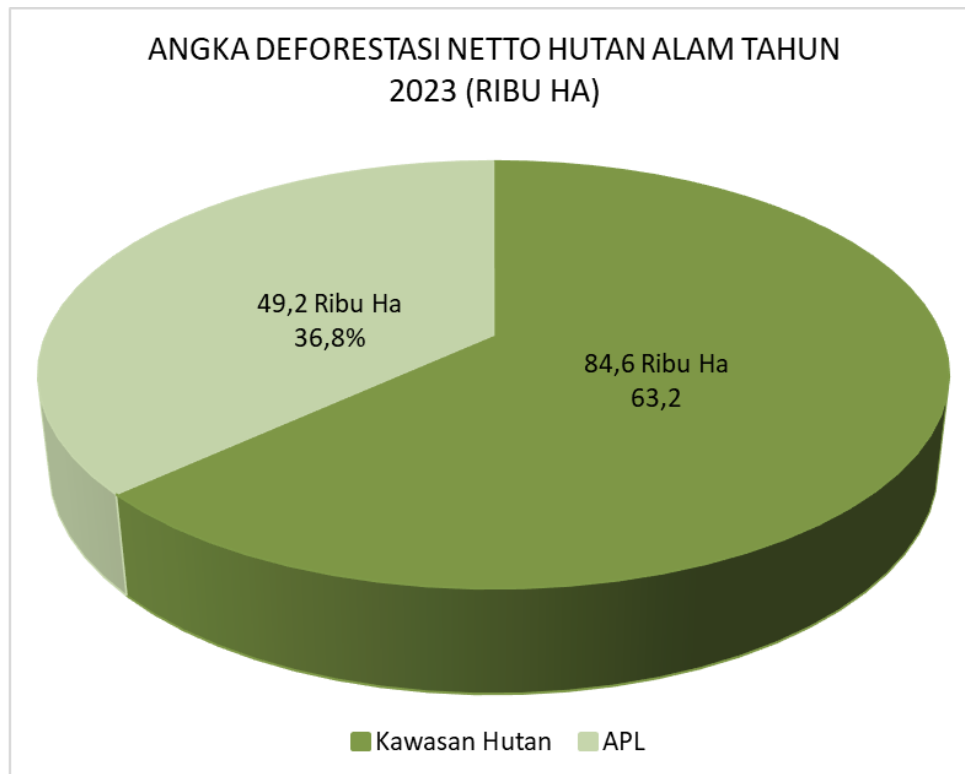
a. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

- Deforestasi Netto tahun 2023 sebesar 121,1 ribu ha dengan rincian seluas 72,2 ribu ha (59,6%) berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya seluas 48,9 ribu ha (40,4%) berada di APL. Selengkapnya disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2023

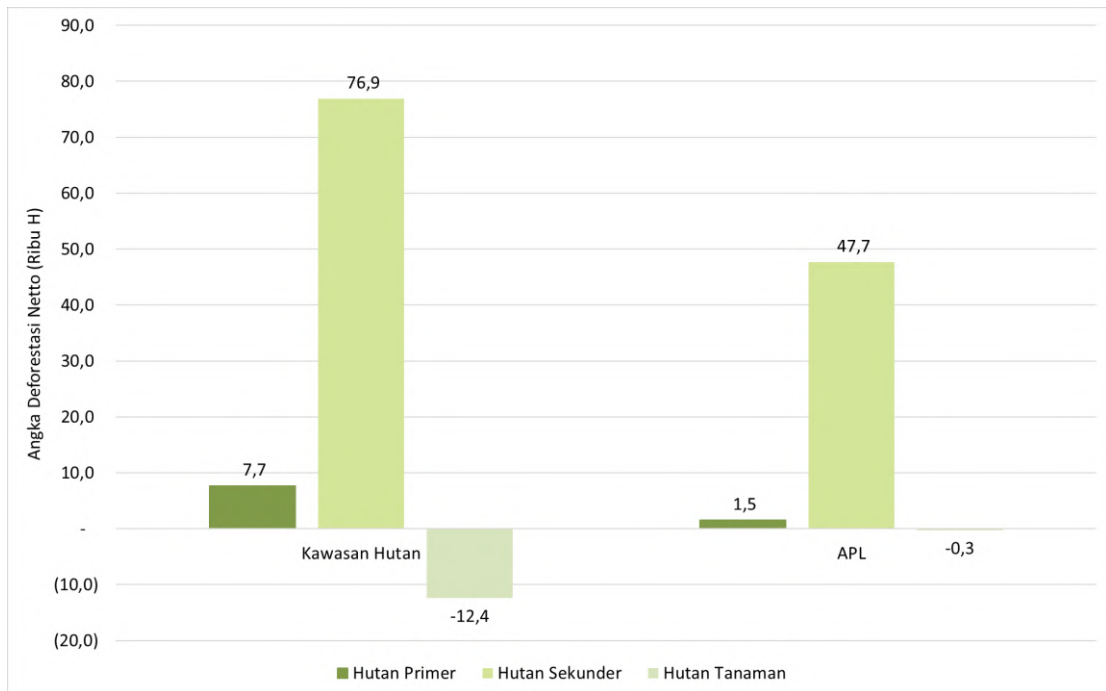
- Deforestasi Netto Hutan Alam tahun 2023 sebesar 133,8 ribu ha, seluas 84,6 ribu ha (63,2%) berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya seluas 49,2 ribu ha (36,8%) berada di APL. Selengkapnya disajikan pada Gambar 10.



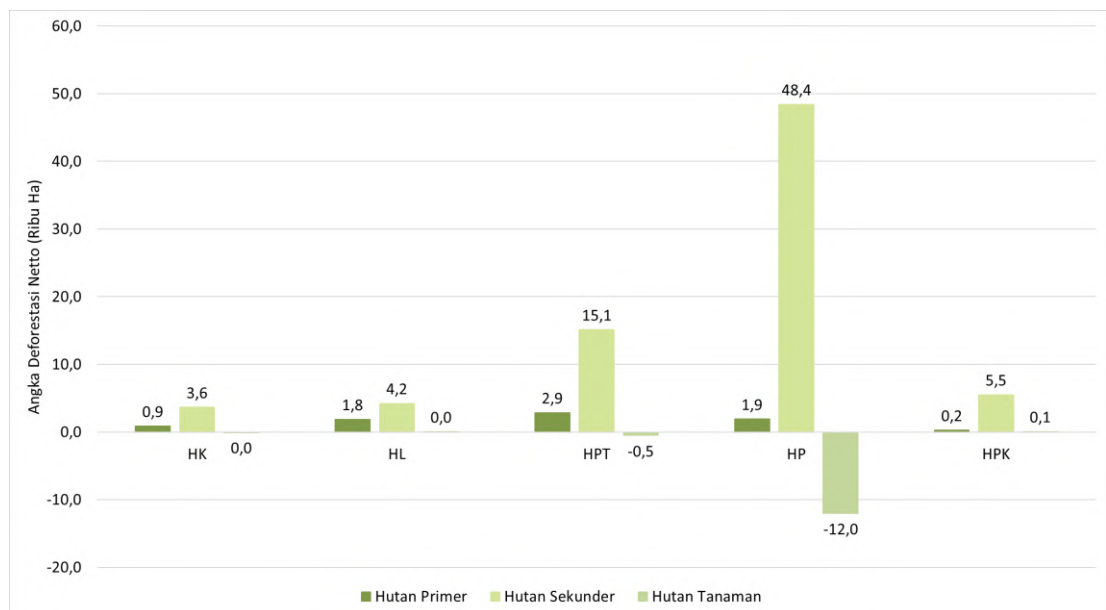
Gambar 10. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2023 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (APL)

b. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Tipe Hutan

- Deforestasi Netto di dalam kawasan hutan sebesar 72,2 ribu ha terdiri atas deforestasi di tipe hutan hutan primer sebesar 7,7 ribu ha dan hutan sekunder sebesar 76,9 ribu ha dan pada Hutan Tanaman sebesar -12,4 ribu ha yang artinya luas deforestasi brutonya lebih kecil dibandingkan dengan reforestasi. Sedangkan pada APL terjadi Deforestasi Netto sebesar 48,9 ribu ha terdiri atas deforestasi di tipe hutan primer sebesar 1,5 ribu ha, hutan sekunder sebesar 47,7 ribu ha dan hutan tanaman -0,3 ribu ha sebagaimana disajikan pada Gambar 11.
- Deforestasi netto di dalam Kawasan hutan tertinggi terjadi di HP yaitu pada tipe hutan sekunder seluas 48,4 ribu ha, hutan primer 1,9 ribu ha dan hutan tanaman - 12,0 ribu ha. Sedangkan untuk Deforestasi Netto Hutan Alam tertinggi di dalam Kawasan hutan tertinggi terjadi di HP yaitu pada tipe hutan sekunder seluas 48,4 ribu ha dan hutan primer 1,9 ribu ha. Selengkapnya disajikan pada Gambar 12.



Gambar 11. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2023 di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan



Gambar 12. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2023 di Dalam Kawasan Hutan

c. Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Fungsi Kawasan Hutan

- Sebaran Deforestasi Netto di kawasan hutan seluruh Indonesia selama tahun 2023 yaitu di HK sebesar 4,5 ribu ha (3,7%), HL sebesar 6,1 ribu ha (5,0 %), dan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) sebesar 61,6 ribu ha (50,8%). Sedangkan Deforestasi Netto di APL sebesar 48,9 ribu ha (40,4%).
- Sebaran Deforestasi Netto Hutan Alam di kawasan hutan seluruh Indonesia selama tahun 2023 yaitu di HK sebesar 4,5 ribu ha (3,4%), HL sebesar 6,1 ribu ha (4,5%),

dan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) sebesar 74,0 ribu ha (55,3%). Sedangkan Deforestasi Netto di APL sebesar 49,2 ribu ha (36,8%).

- Sebaran Deforestasi Netto Indonesia pada Fungsi Kawasan Hutan baik secara keseluruhan maupun di Hutan Alam selengkapnya disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III. 2 Deforestasi Netto pada Fungsi Kawasan Hutan (Ribuan Ha) Tahun 2023

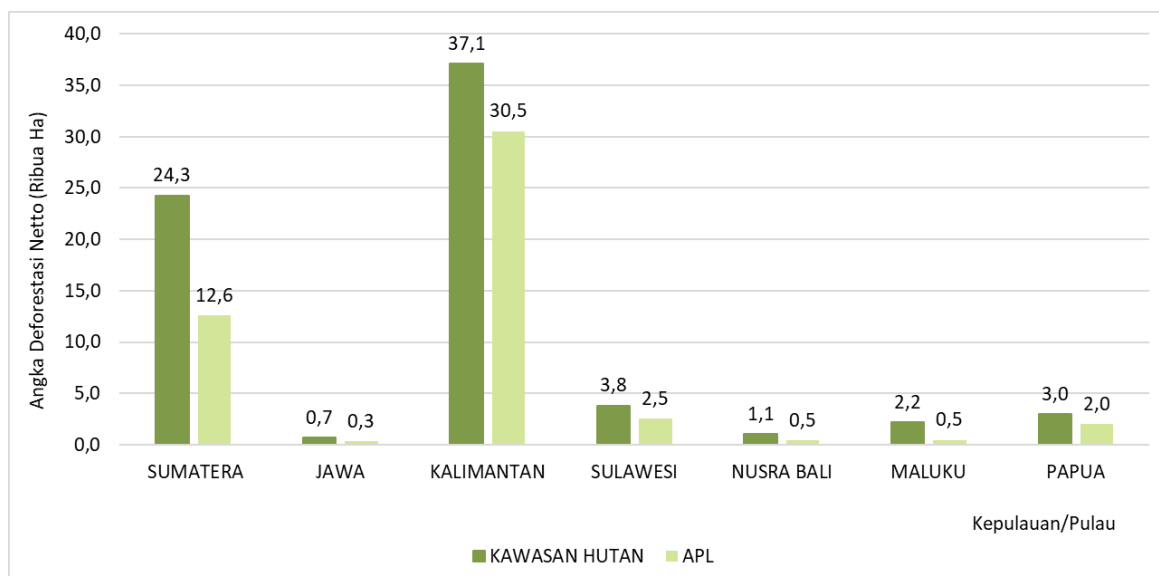
NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS DEFORESTASI NETTO		LUAS DEFORESTASI NETTO HUTAN ALAM	
		Luas (Ribuan Ha)	%	Luas (Ribuan Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	4,5	3,7	4,5	3,4
2	Kawasan Hutan Lindung	6,1	5,0	6,1	4,5
3	Kawasan Hutan Produksi				
	a. HPT	17,5	14,4	18,0	13,4
	b. HP	38,3	31,6	50,3	37,6
	c. HPK	5,8	4,8	5,8	4,3
	sub Total	61,6	50,8	74,0	55,3
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	72,2	59,6	84,6	63,2
4	Areal Penggunaan Lain	48,9	40,4	49,2	36,8
	Total Deforestasi (1+ 2 + 3 + 4)	121,1	100,0	133,8	100,0

d. Sebaran Deforestasi Netto menurut Kelompok Pulau

- Sebaran Deforestasi Netto tahun 2023 menurut kelompok pulau, yang terbesar terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 67,6 ribu ha atau 55,9% dari total Deforestasi Netto di Indonesia, diikuti Kelompok Pulau Sumatera sebesar 36,9 ribu ha (30,5%). Data selengkapnya disajikan pada Tabel III.3 dan Gambar 13.
- Sebaran Deforestasi Netto Hutan Alam tahun 2023 menurut kelompok pulau, yang terbesar terjadi di Kelompok Pulau Kalimantan yaitu sebesar 75,8 ribu ha atau 56,6% dari total Deforestasi Netto Hutan Alam di Indonesia, diikuti Pulau Sumatera sebesar 41,9 ribu ha (31,3%). Data selengkapnya disajikan pada Tabel III.4 dan Gambar 14.

Tabel III. 3 Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2023

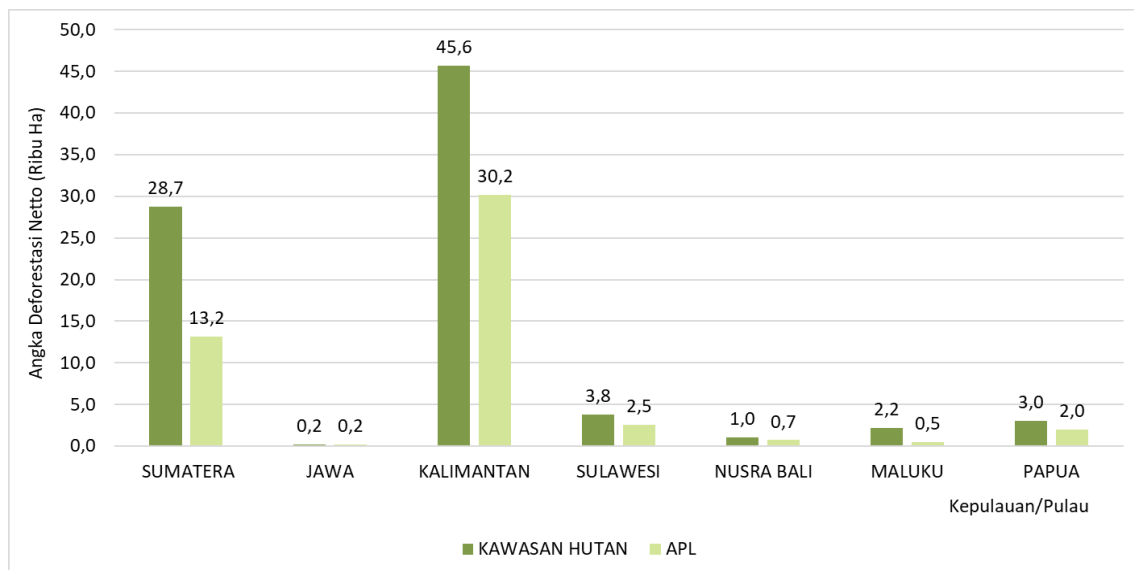
NO.	DEFORESTASI PADA KELOMPOK PULAU	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PULAU SUMATERA	4,8	4,5	9,1	3,7	22,2	2,1	24,3	12,6	36,9
2	PULAU JAWA	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	-	0,7	0,3	1,0
3	PULAU KALIMANTAN	-0,8	-0,5	5,6	30,6	35,0	2,1	37,1	30,5	67,6
4	PULAU SULAWESI	0,1	0,9	1,4	1,0	3,6	0,3	3,8	2,5	6,4
5	PULAU NUSRA BALI	0,0	0,3	0,1	0,6	1,1	0,0	1,1	0,5	1,5
6	PULAU MALUKU	0,0	0,1	0,6	0,8	1,5	0,7	2,2	0,5	2,7
7	PULAU PAPUA	0,2	0,6	0,6	1,0	2,4	0,6	3,0	2,0	5,0
JUMLAH		4.5	6.1	17.5	38.3	66.4	5.8	72.2	48.9	121.1



Gambar 13. Diagram Deforestasi Netto pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2023

Tabel III. 4 Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2023

NO.	DEFORESTASI PADA KELOMPOK PULAU	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PULAU SUMATERA	4,8	4,5	9,6	7,7	26,6	2,1	28,7	13,2	41,9
2	PULAU JAWA	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	-	0,2	0,2	0,3
3	PULAU KALIMANTAN	-0,8	-0,5	5,6	39,2	43,6	2,1	45,6	30,2	75,8
4	PULAU SULAWESI	0,2	0,9	1,4	1,0	3,6	0,3	3,8	2,5	6,4
5	PULAU NUSRA BALI	0,0	0,3	0,1	0,5	1,0	0,0	1,0	0,7	1,8
6	PULAU MALUKU	0,0	0,1	0,6	0,8	1,5	0,7	2,2	0,5	2,7
7	PULAU PAPUA	0,2	0,6	0,6	1,0	2,4	0,6	3,0	2,0	5,0
JUMLAH		4,5	6,1	18,0	50,3	78,8	5,8	84,6	49,2	133,8

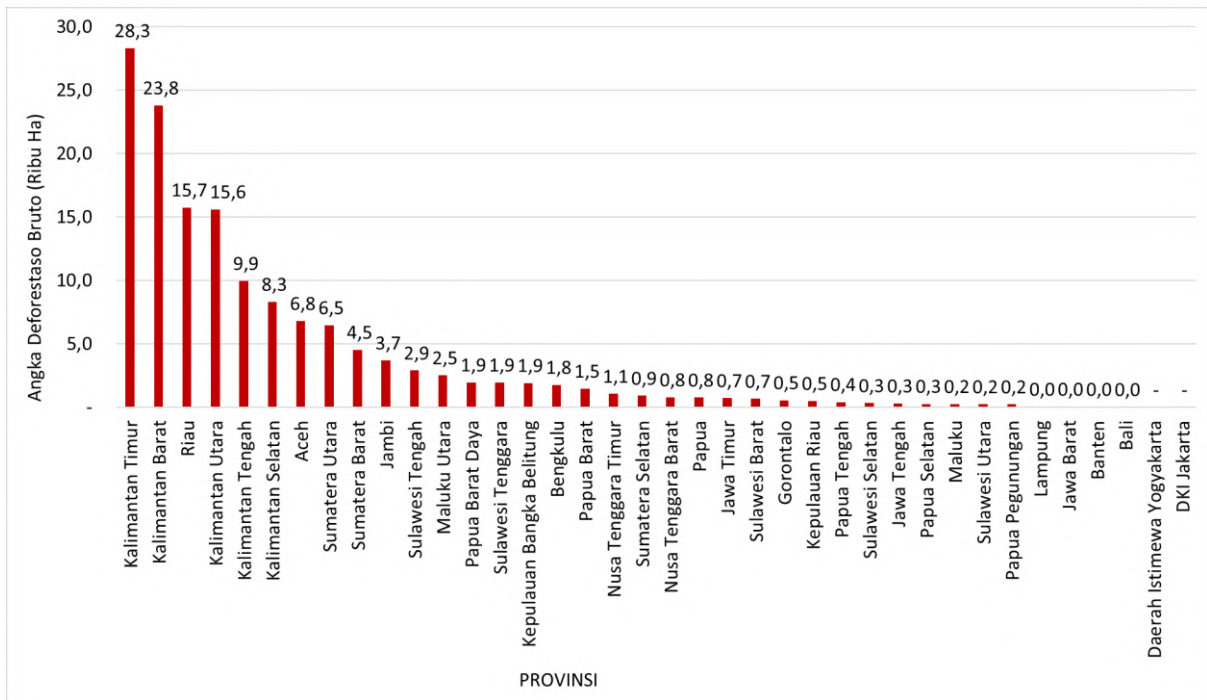


Gambar 14. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau (Ribuan Ha) Tahun 2023

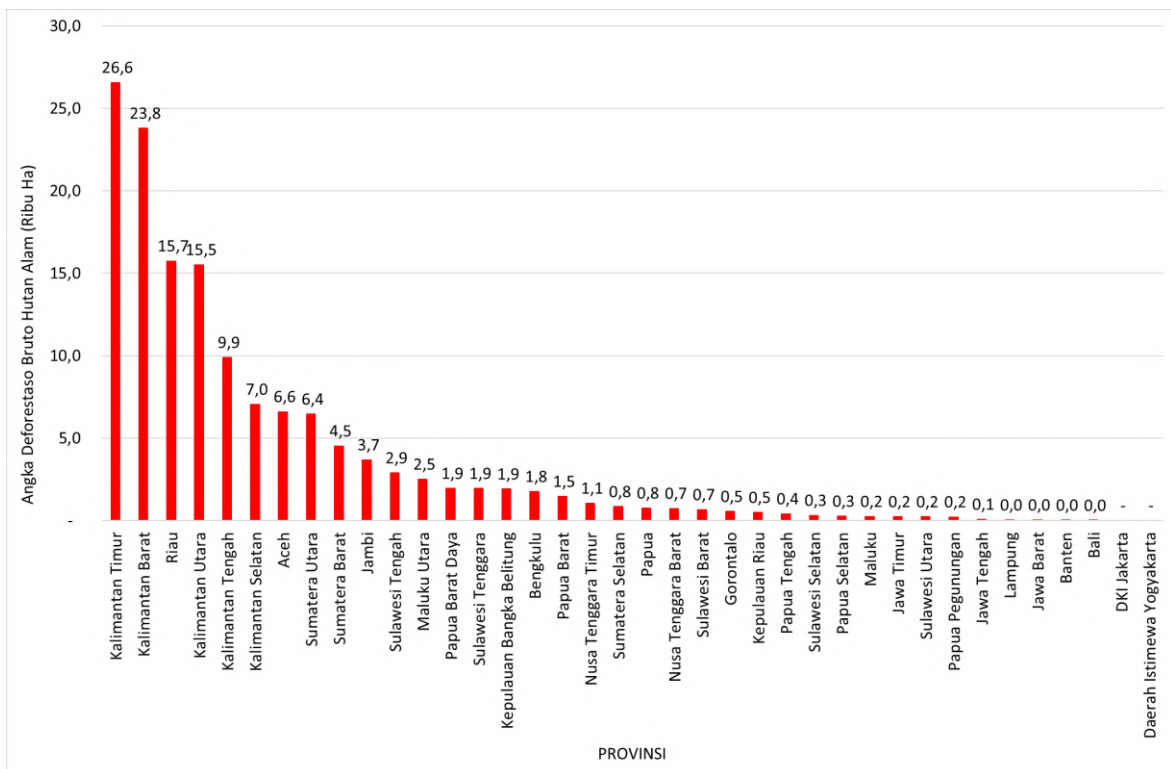
B. Deforestasi Indonesia per Provinsi

(1) Deforestasi Bruto Indonesia per Provinsi

- Pada perhitungan periode tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi yaitu sebesar 28,3 ribu ha (19,5%), Kalimantan Barat sebesar 23,8 ribu ha (16,4%), Riau sebesar 15,7 ribu ha (10,8%), Kalimantan Utara sebesar 15,6 ribu ha (10,7%), Kalimantan Tengah sebesar 9,9 ribu ha (6,8%). Sebaliknya terdapat provinsi yang tidak teridentifikasi mengalami deforestasi bruto yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 15.
- Selanjutnya Angka Deforestasi Bruto Hutan Alam tertinggi terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 26,6 ribu ha (18,8%), berikutnya Kalimantan Barat sebesar 23,8 ribu ha (16,8%), Riau sebesar 15,7 ribu ha (11,1%), Kalimantan Utara sebesar 15,5 ribu ha (11,0%), dan Kalimantan Tengah sebesar 9,9 ribu ha (7,0%). Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 16.



Gambar 15. Grafik Deforestasi Bruto per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2023



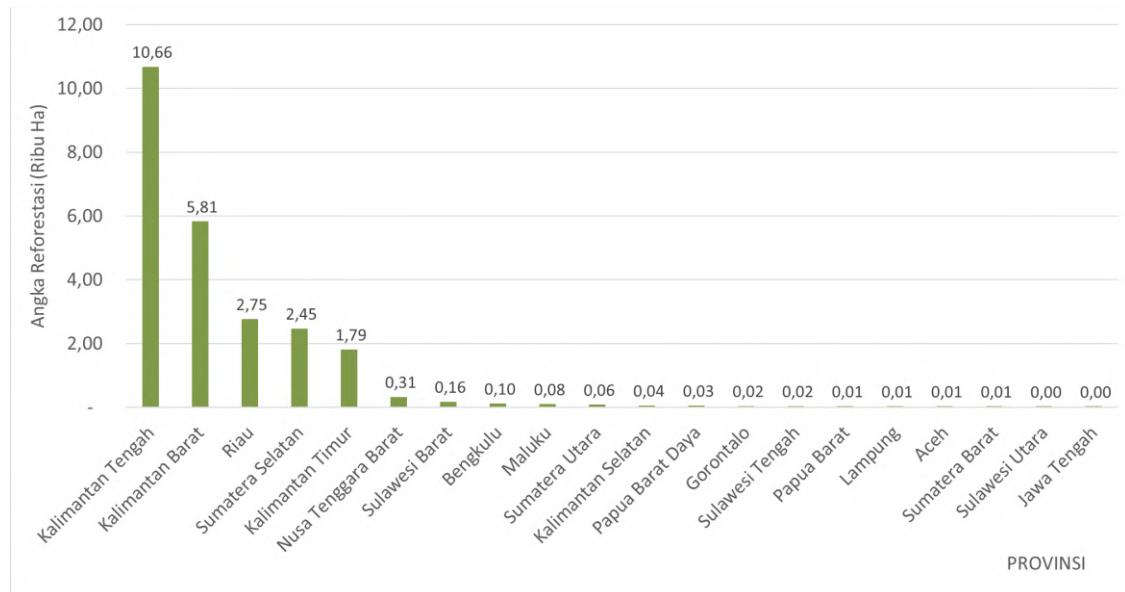
Gambar 16. Grafik Deforestasi Bruto Hutan Alam per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2023

(2) Reforestasi Indonesia per Provinsi

- Pada periode ini, reforestasi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Papua

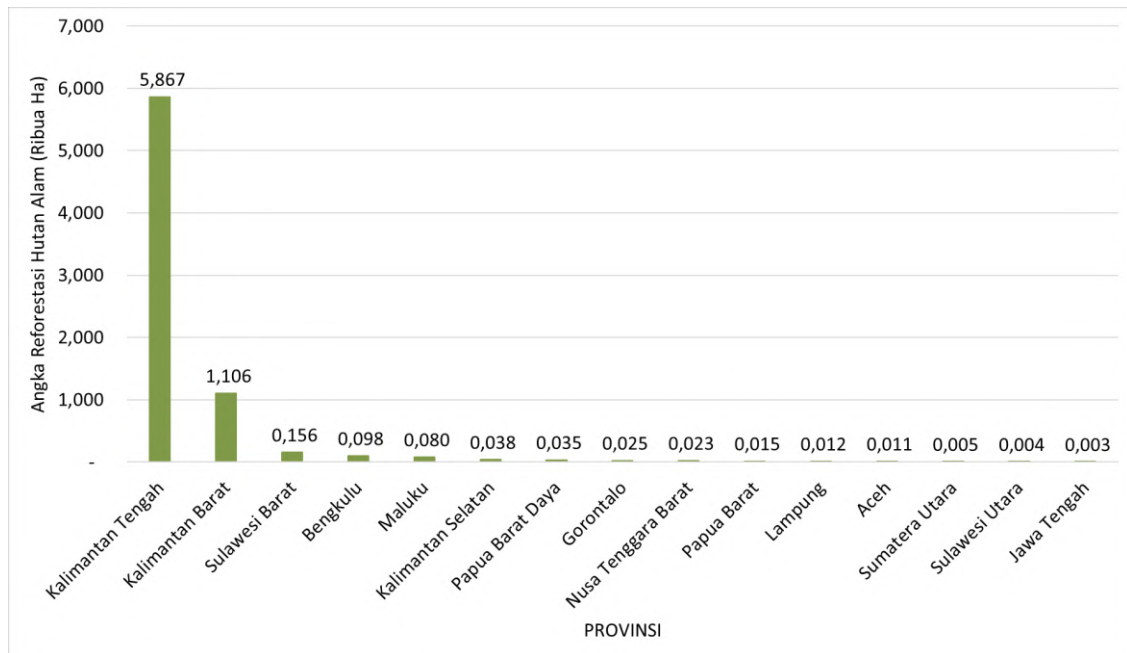
Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Tengah.

- Angka reforestasi tertinggi teridentifikasi pada Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 10,66 ribu ha (43,8%), diikuti dengan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,81 ribu ha (23,9%), Provinsi Riau sebesar 2,75 ribu ha (11,3%), Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,45 ribu ha (10,1%) dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,79 ribu ha (7,4%). Sementara luas reforestasi pada provinsi lainnya kurang dari 1.000 ha. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 17.



Gambar 17. Grafik Reforestasi per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2023

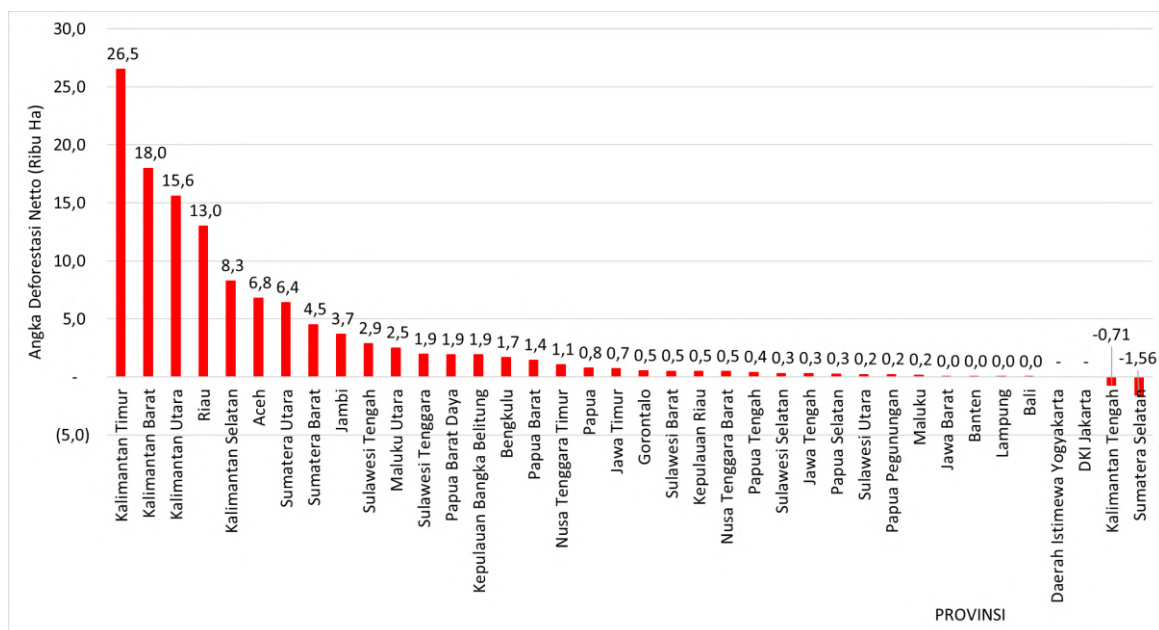
- Reforestasi pada hutan alam teridentifikasi dalam 15 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Tengah. Angka terendah teridentifikasi di Jawa Tengah dengan luasan 0,003 ribu ha. Kondisi reforestasi pada hutan alam di provinsi lain dapat dilihat di Gambar 18.



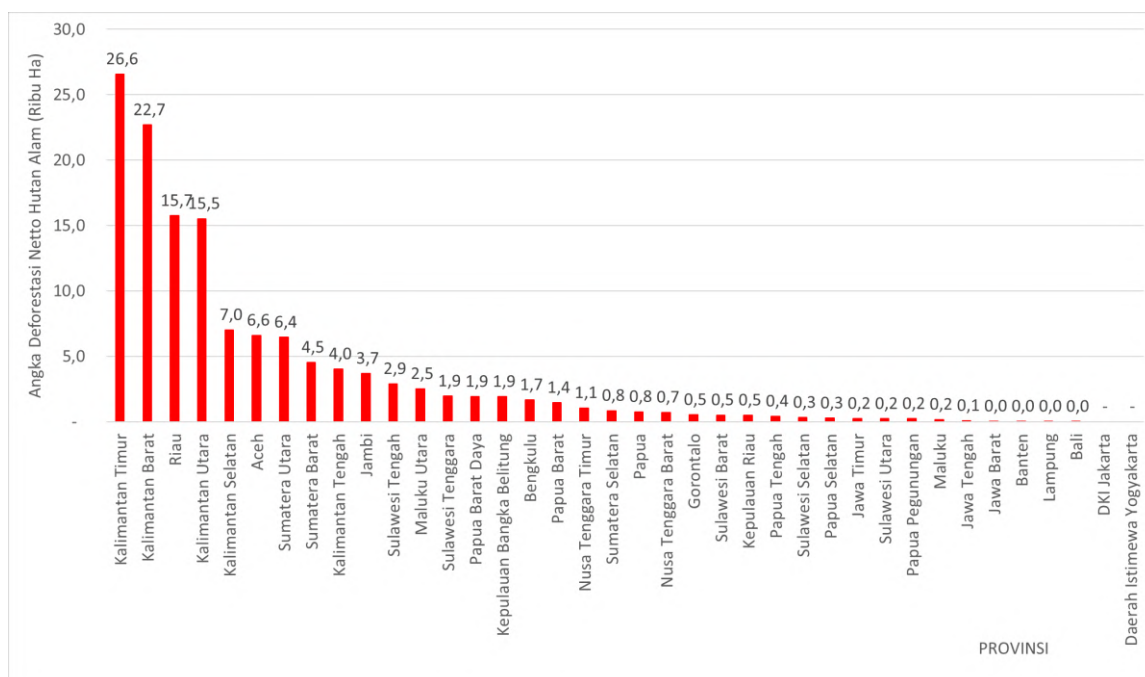
Gambar 18. Grafik Reforestasi Hutan Alam per Provinsi (Ribua Ha) Tahun 2023

(3) Deforestasi Netto Indonesia per Provinsi

- Penghitungan Deforestasi Netto Tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan berhutan menjadi tidak berhutan tidak terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Deforestasi Netto Tahun 2023 terdapat nilai negatif di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa reforestasi memiliki nilai yang lebih luas.
- 5 provinsi dengan nilai deforestasi netto tertinggi sama, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Selatan. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 19.
- Deforestasi netto 2023 pada hutan alam juga tidak teridentifikasi pada provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5 provinsi dengan deforestasi netto 2023 pada hutan alam tertinggi sama dengan 5 provinsi di deforestasi netto secara keseluruhan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan. Urutan selengkapnya disajikan pada Gambar 20.



Gambar 19. Grafik Deforestasi Netto per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2023



Gambar 20. Grafik Deforestasi Netto Hutan Alam per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2023

C. Deforestasi Indonesia per Fungsi Kawasan Hutan

Angka Deforestasi Indonesia yang dimaksud pada bagian C ini adalah Deforestasi Netto Indonesia pada hutan alam dan hutan tanaman. Perhitungan disajikan menurut fungsi Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat di-Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan tipe hutan (hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman) pada 34 provinsi Indonesia. Selanjutnya penyajian tabel Angka Deforestasi Indonesia untuk masing-masing provinsi juga disajikan secara lengkap pada lampiran 3.

(1) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Konservasi per provinsi disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III. 5 Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) per Provinsi (Ha) Tahun 2023

No.	Provinsi	Angka Deforestasi						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Total
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	281,7	6,3	419,8	9,4	9,7	0,2	711,1
2	Sumatera Utara	53,7	1,2	49,5	1,1	-	-	103,2
3	Riau	128,8	2,9	2.449,2	54,6	-	-	2.578,0
4	Sumatera Barat	45,9	1,0	345,9	7,7	-	-	391,8
5	Jambi	12,7	0,3	693,4	15,4	-	-	706,1
6	Sumatera Selatan	1,5	0,0	68,3	1,5	-	-	69,7
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	12,5	0,3	-	-	12,5
8	Bengkulu	158,4	3,5	88,0	2,0	-	-	246,4
9	Lampung	-	-	2,1	0,0	-	-	2,1
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
	SUMATERA	682,6	15,2	4.128,7	92,0	9,7	0,2	4.821,0
		0,1		2,4				
11	Banten	-	-	10,2	0,2	-	-	10,2
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	12,7	0,3	-	-	12,7
	JAWA	-	-	22,9	0,5	-	-	22,9
			-		-		-	
17	Kalimantan Barat	-	-	49,7	1,1	-	-	49,7
18	Kalimantan Selatan	-	-	69,2	1,5	-	-	69,2
19	Kalimantan Tengah	-	-	1.129,0	25,2	-	-	1.129,0
20	Kalimantan Timur	6,4	0,1	215,9	4,8	-	-	222,3
21	Kalimantan Utara	17,5	0,4	3,7	0,1	-	-	21,2
	KALIMANTAN	23,9	0,5	790,5	17,6	-	-	766,6
22	Sulawesi Utara	16,7	0,4	19,4	0,4	-	-	36,1
23	Gorontalo	-	-	4,1	0,1	-	-	4,1
24	Sulawesi Tengah	18,4	0,4	77,7	1,7	19,5	0,4	76,6
25	Sulawesi Tenggara	-	-	21,5	0,5	-	-	21,5
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
	SULAWESI	35,2	0,8	122,6	2,7	19,5	0,4	138,3
28	Bali	-	-	3,7	0,1	-	-	3,7
29	Nusa Tenggara Barat	-	-	10,6	0,2	-	-	10,6
30	Nusa Tenggara Timur	18,2	0,4	-	-	-	-	18,2
	BALI NUSA TENGGARA	18,2	0,4	14,3	0,3	-	-	32,5
31	Maluku Utara	-	-	5,4	0,1	-	-	5,4
32	Maluku	-	-	2,5	0,1	-	-	2,5
	MALUKU	-	-	7,8	0,2	-	-	7,8
33	Papua	-	-	115,8	2,6	-	-	115,8
34	Papua Barat	52,4	1,2	-	-	-	-	52,4
35	Papua Barat Daya	-	-	12,0	0,3	-	-	12,0
36	Papua Pegunungan	27,4	0,6	7,2	0,2	-	-	34,6
37	Papua Selatan	6,5	0,1	-	-	-	-	6,5
38	Papua Tengah	11,3	0,3	-	-	-	-	11,3
	PAPUA	97,6	2,2	135,0	3,0	-	-	232,5
	INDONESIA	857,5	19,1	3.640,7	81,1	9,8	0,2	4.488,4

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HK per provinsi pada Tabel III.5, terlihat bahwa:

- Deforestasi pada fungsi kawasan HK terjadi pada hutan primer dan hutan sekunder. Deforestasi pada hutan sekunder lebih besar dari pada hutan primer dalam kawasan hutan konservasi. Deforestasi di hutan sekunder sebesar 3,6 ribu ha atau 81,1% sedangkan deforestasi di hutan primer sebesar 0,9 ribu ha atau 19,1%. Sedangkan pada hutan tanaman dalam kawasan hutan konservasi seluas -9,8 ha hal ini dikarenakan angka reforestasi lebih tinggi dibandingkan dengan angka deforestasi bruto.
- Provinsi Riau mengalami deforestasi hutan konservasi terbesar yaitu 2,6 ribu ha. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder yaitu 2,4 ribu ha dan di hutan primer 0,1 ribu ha. Berdasarkan deforestasi 2023, Provinsi Jambi juga memiliki nilai deforestasi terbesar pada kawasan hutan konservasi.
- Provinsi yang mengalami deforestasi tertinggi dari tiap kelompok Pulau/Kepulauan dalam kawasan hutan konservasi diantaranya, Provinsi Riau (Pulau Sumatera), Provinsi Jawa Timur (Pulau Jawa), Provinsi Kalimantan Timur (Pulau Kalimantan), Provinsi Sulawesi Tengah (Pulau Sulawesi), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kepulauan Bali Nusa Tenggara), Provinsi Maluku Utara (Pulau Maluku) dan Provinsi Papua (Pulau Papua).
- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam **kisaran >100,0 ha** pada kawasan HK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.6:

Tabel III. 6 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran 100,0–1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Riau	2.578,0
2	Aceh	711,1
3	Jambi	706,1
4	Sumatera Barat	391,8
5	Bengkulu	246,4
6	Kalimantan Timur	222,3
7	Papua	115,8
8	Sumatera Utara	103,2

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam **kisaran <100,0 ha** pada kawasan HK antara lain, sebagaimana diuraikan pada Tabel III.7

Tabel III. 7 Luas Deforestasi pada Kawasan HK dalam kisaran <100,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sulawesi Tengah	76,6
2	Sumatera Selatan	69,7
3	Kalimantan Selatan	69,2
4	Papua Barat	52,4
5	Kalimantan Barat	49,7
6	Sulawesi Utara	36,1
7	Papua Pegunungan	34,6
8	Sulawesi Tenggara	21,5
9	Kalimantan Utara	21,2
10	Nusa Tenggara Timur	18,2

No.	Provinsi	Luas (Ha)
11	Jawa Timur	12,7
12	Kepulauan Bangka Belitung	12,5
13	Papua Barat Daya	12,0
14	Papua Tengah	11,3
15	Nusa Tenggara Barat	10,6
16	Banten	10,2
17	Papua Selatan	6,5
18	Maluku Utara	5,4
19	Gorontalo	4,1
20	Bali	3,7
21	Maluku	2,5
22	Lampung	2,1

- f. Terdapat provinsi yang tidak mengalami deforestasi pada kawasan HK yaitu pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- g. Provinsi Kalimantan Tengah pada kawasan konservasi angka deforestasi seluas -1,1 ribu ha, hal ini menunjukkan bahwa angka reforestasi lebih besar dibandingkan dengan angka deforestasi bruto.

Hutan Konservasi (HK) adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan HK terdiri atas:

1. Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM)
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Wisata Alam (TWA)
3. Taman Buru.

Masing-masing kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pengelolaannya pun akan berbeda pula. Deforestasi pada masing-masing kawasan konservasi hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaannya serta menjadi salah satu fokus dalam upaya pengamanan hutan.

(2) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) per provinsi disajikan pada Tabel III.8 berikut.

Tabel III. 8 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) per Provinsi (Ha) Tahun 2023

No.	Provinsi	Angka Deforestasi						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Total
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3		5		7		9
1	Aceh	326,0	5,3	815,3	13,4	14,0	0,2	1.155,3
2	Sumatera Utara	230,4	3,8	593,4	9,7	9,5	0,2	814,4
3	Riau	27,3	0,4	1.053,9	17,3	-	-	1.081,2
4	Sumatera Barat	104,5	1,7	774,7	12,7	-	-	879,2
5	Jambi	-	-	94,4	1,5	-	-	94,4
6	Sumatera Selatan	1,5	0,0	260,8	4,3	-	-	262,3
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	89,7	1,5	-	-	89,7
8	Bengkulu	25,6	0,4	113,7	1,9	-	-	139,2
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	8,5	0,1	-	-	8,5
	SUMATERA	715,3	11,7	3.804,3	62,3	4,5	0,1	4.524,2
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	19,4	0,3	-	-	19,4
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	5,0	0,1	23,6	0,4	28,6
	JAWA	-	-	24,4	0,4	23,6	0,4	48,0
17	Kalimantan Barat	-	-	178,6	2,9	-	-	178,6
18	Kalimantan Selatan	9,4	0,2	385,3	6,3	-	-	394,7
19	Kalimantan Tengah	4,2	0,1	1.240,9	20,3	-	-	1.236,7
20	Kalimantan Timur	41,0	0,7	272,1	4,5	-	-	313,1
21	Kalimantan Utara	80,7	1,3	96,6	1,6	-	-	177,3
	KALIMANTAN	135,3	2,2	665,5	10,9	-	-	530,2
22	Sulawesi Utara	5,0	0,1	14,2	0,2	-	-	19,2
23	Gorontalo	-	-	18,8	0,3	-	-	18,8
24	Sulawesi Tengah	40,9	0,7	269,4	4,4	-	-	310,4
25	Sulawesi Tenggara	64,9	1,1	320,5	5,3	-	-	385,4
26	Sulawesi Barat	106,0	1,7	34,7	0,6	-	-	71,3
27	Sulawesi Selatan	8,8	0,1	171,6	2,8	-	-	180,4
	SULAWESI	225,6	3,7	722,3	11,8	-	-	947,9
28	Bali	-	-	2,3	0,0	-	-	2,3
29	Nusa Tenggara Barat	23,5	0,4	61,3	1,0	-	-	84,8
30	Nusa Tenggara Timur	175,9	2,9	77,9	1,3	-	-	253,8
	BALI NUSA TENGGARA	199,3	3,3	141,5	2,3	-	-	340,9
31	Maluku Utara	50,5	0,8	84,3	1,4	-	-	134,8
32	Maluku	-	-	8,1	0,1	-	-	8,1
	MALUKU	50,5	0,8	92,4	1,5	-	-	142,9
33	Papua	12,8	0,2	16,7	0,3	-	-	29,5
34	Papua Barat	38,1	0,6	17,1	0,3	-	-	55,2
35	Papua Barat Daya	324,5	5,3	25,1	0,4	-	-	349,6
36	Papua Pegunungan	87,8	1,4	18,6	0,3	-	-	106,4
37	Papua Selatan	13,8	0,2	-	-	-	-	13,8
38	Papua Tengah	46,5	0,8	26,9	0,4	-	-	73,5
	PAPUA	523,5	8,6	104,5	1,7	-	-	628,1
	INDONESIA	1.849,5	30,3	4.224,0	69,2	28,2	0,5	6.101,7

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HL per provinsi pada Tabel III.8, terlihat bahwa :

- a. Deforestasi dalam fungsi kawasan HL terjadi pada hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman. Sebagian besar deforestasi terjadi di hutan sekunder dengan total luasan 4,2 ribu ha atau 69,2% dan deforestasi pada hutan primer seluas 1,8 ribu ha atau 30,3%.
- b. Provinsi Aceh teridentifikasi mengalami deforestasi tertinggi pada hutan lindung dengan luas 1,2 ribu ha. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder seluas 0,8 ribu ha atau 70,6%.
- c. Provinsi dengan angka deforestasi dalam kawasan HL tertinggi di tiap kelompok Pulau/Kepulauan diantaranya: Provinsi Aceh untuk Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Timur untuk Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, dan Provinsi Papua Barat Daya untuk Pulau Papua.
- d. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran sekitar >1.000 ha pada kawasan HL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.9:

Tabel III. 9 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran >1 ribu ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Aceh	1.155,3
2	Riau	1.081,2

- e. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran **100,0–1.000,0 ha** pada kawasan HL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.10:

Tabel III. 10 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran 100,0 – <1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sumatera Barat	879,2
2	Sumatera Utara	814,4
3	Kalimantan Selatan	394,7
4	Sulawesi Tenggara	385,4
5	Papua Barat Daya	349,6
6	Kalimantan Timur	313,1
7	Sulawesi Tengah	310,4
8	Sumatera Selatan	262,3
9	Nusa Tenggara Timur	253,8
10	Sulawesi Selatan	180,4
11	Kalimantan Utara	177,3
12	Bengkulu	139,2
13	Maluku Utara	134,8
14	Papua Pegunungan	106,4

- f. Deforestasi di kawasan HL dalam kisaran <100,0 ha antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.11:

Tabel III. 11 Luas Deforestasi pada Kawasan HL dalam kisaran <100,0

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Jambi	94,4
2	Kepulauan Bangka Belitung	89,7
3	Nusa Tenggara Barat	84,8
4	Papua Tengah	73,5
5	Sulawesi Barat	71,3
6	Papua Barat	55,2
7	Papua	29,5
8	Jawa Timur	28,6
9	Jawa Barat	19,4
10	Sulawesi Utara	19,2
11	Papua Selatan	13,8
12	Kepulauan Riau	8,5
13	Maluku	8,1
14	Bali	2,3

- g. Deforestasi tidak teridentifikasi pada beberapa provinsi, diantaranya Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
- h. Provinsi dengan angka reforestasi lebih tinggi dibandingkan dengan deforestasinya antara lain Gorontalo, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Hutan Lindung (HL) merupakan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah dan mencegah intrusi air laut. Di sisi lain pertumbuhan penduduk telah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan, khususnya HL, untuk memenuhi kebutuhan akan lahan garapan bagi masyarakat sekitar hutan.

Terbukanya areal berhutan pada HL akibat penebangan liar dan alih guna lahan menjadi lahan pertanian telah menyebabkan berbagai bencana erosi dan tanah longsor, timbulnya kekeringan pada saat musim kemarau, dan banjir pada saat musim hujan, seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk mencegah terbukanya penutupan lahan berhutan di HL, pengelolaan kawasan HL harus mengelola kawasan sesuai daya dukung kawasan yaitu dengan mempertahankan kelestarian blok perlindungan serta melaksanakan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan lestari berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian dapat mempertahankan kepentingan fungsi tata air HL tanpa mengabaikan sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.

(3) Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Produksi

Deforestasi di dalam kawasan hutan produksi terjadi pada HP, HPT, dan HPK.

a. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per provinsi disajikan pada Tabel III.12 berikut.

Tabel III. 12 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per Provinsi (Ha) Tahun 2023

No.	Provinsi	Angka Deforestasi						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Total
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3		5		7		9
1	Aceh	8,7	0,0	189,2	1,1	11,0	0,1	208,9
2	Sumatera Utara	199,6	1,1	966,8	5,5	-	-	1.166,4
3	Riau	1.395,9	8,0	4.401,3	25,2	- 520,8	- 3,0	5.276,4
4	Sumatera Barat	9,0	0,1	525,3	3,0	-	-	534,3
5	Jambi	-	-	839,9	4,8	-	-	839,9
6	Sumatera Selatan	-	-	129,9	0,7	-	-	129,9
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkulu	33,4	0,2	811,0	4,6	-	-	844,4
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	134,3	0,8	-	-	134,3
	SUMATERA	1.646,5	9,4	7.997,8	45,8	- 509,8	- 2,9	9.134,5
11	Banten	-	-	5,0	0,0	-	-	5,0
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	7,7	0,0	7,7
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
	JAWA	-	-	5,0	0,0	7,7	0,0	12,7
17	Kalimantan Barat	-	-	1.588,5	9,1	- 3,2	- 0,0	1.585,3
18	Kalimantan Selatan	-	-	423,6	2,4	4,2	0,0	427,8
19	Kalimantan Tengah	29,2	0,2	238,2	1,4	-	-	267,4
20	Kalimantan Timur	147,3	0,8	1.405,8	8,1	-	-	1.553,1
21	Kalimantan Utara	158,8	0,9	1.639,0	9,4	-	-	1.797,8
	KALIMANTAN	335,2	1,9	5.295,1	30,3	0,9	0,0	5.631,3
22	Sulawesi Utara	10,3	0,1	80,1	0,5	-	-	90,4
23	Gorontalo	8,2	0,0	32,7	0,2	-	-	40,9
24	Sulawesi Tengah	207,3	1,2	379,2	2,2	-	-	586,5
25	Sulawesi Tenggara	97,0	0,6	312,2	1,8	-	-	409,2
26	Sulawesi Barat	4,5	0,0	288,2	1,7	-	-	292,8
27	Sulawesi Selatan	1,7	0,0	25,5	0,1	-	-	27,2
	SULAWESI	329,0	1,9	1.118,0	6,4	-	-	1.447,0
28	Bali	-	-	-	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	25,6	0,1	77,5	0,4	-	-	103,1
30	Nusa Tenggara Timur	2,3	0,0	21,5	0,1	-	-	23,8
	BALI NUSA TENGGARA	27,8	0,2	99,0	0,6	-	-	126,9
31	Maluku Utara	78,2	0,4	488,8	2,8	-	-	567,0
32	Maluku	-	-	16,3	0,1	-	-	16,3
	MALUKU	78,2	0,4	472,6	2,7	-	-	550,7
33	Papua	77,3	0,4	69,1	0,4	-	-	146,4
34	Papua Barat	306,8	1,8	29,2	0,2	-	-	336,0
35	Papua Barat Daya	-	-	11,1	0,1	-	-	11,1
36	Papua Pegunungan	33,3	0,2	2,6	0,0	-	-	35,9
37	Papua Selatan	3,2	0,0	5,7	0,0	-	-	8,9
38	Papua Tengah	12,8	0,1	7,5	0,0	-	-	20,3
	PAPUA	433,4	2,5	125,2	0,7	-	-	558,6
	INDONESIA	2.850,2	16,3	15.112,6	86,5	- 501,1	- 2,9	17.461,6

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HPT per provinsi pada Tabel III.12, terlihat bahwa:

- Deforestasi dalam fungsi kawasan HPT terjadi pada hutan primer, hutan dan sekunder. Sebagian besar deforestasi terjadi pada hutan sekunder dengan luas 15,1 ribu ha. Deforestasi pada hutan primer menyumbang sebesar 2,9 ribu ha. Nilai deforestasi pada hutan tanaman menunjukkan nilai negatif (-501,1 ha) yang mengindikasikan bahwa reforestasi lebih besar dari pada deforestasi bruto.
- Provinsi dengan deforestasi tertinggi di kawasan HPT adalah Provinsi Riau seluas 5,3 ribu ha dengan rincian pada hutan primer seluas 1,3 ribu ha, hutan sekunder seluas 4,4 ribu ha, dan hutan tanaman seluas -520,8 ha.
- Provinsi dengan deforestasi tertinggi di kawasan HPT tiap kelompok Pulau/Kepulauan diantaranya: Provinsi Riau untuk Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Utara untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, Provinsi Papua Barat untuk Pulau Papua, dan Provinsi Jawa Tengah untuk Pulau Jawa.
- Angka Deforestasi pada kawasan HPT antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.13:

Tabel III. 13 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran >1.000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Riau	5.276,4
2	Kalimantan Utara	1.797,8
3	Kalimantan Barat	1.585,3
4	Kalimantan Timur	1.553,1
5	Sumatera Utara	1.166,4

- Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran sekitar **100,0-1.000,0 ha** pada kawasan HPT antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.14:

Tabel III. 14 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT dalam kisaran 100,0-1.000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Bengkulu	844,4
2	Jambi	839,9
3	Sulawesi Tengah	586,5
4	Maluku Utara	567,0
5	Sumatera Barat	534,3
6	Kalimantan Selatan	427,8
7	Sulawesi Tenggara	409,2
8	Papua Barat	336,0
9	Sulawesi Barat	292,8
10	Kalimantan Tengah	267,4
11	Aceh	208,9
12	Papua	146,4
13	Kepulauan Riau	134,3
14	Sumatera Selatan	129,9
15	Nusa Tenggara Barat	103,1

- f. Provinsi yang memiliki deforestasi kurang dari **100 ha** pada kawasan HPT antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.15:

Tabel III. 15 Luas Deforestasi pada Kawasan HPT **di bawah 100 ha**

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sulawesi Utara	90,4
2	Gorontalo	40,9
3	Papua Pegunungan	35,9
4	Sulawesi Selatan	27,2
5	Nusa Tenggara Timur	23,8
6	Papua Tengah	20,3
7	Papua Barat Daya	11,1
8	Papua Selatan	8,9
9	Jawa Tengah	7,7
10	Banten	5,0

- g. Beberapa provinsi tidak teridentifikasi mengalami deforestasi, diantaranya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
- h. Untuk Provinsi Maluku angka deforestasinya -16,3 ha, hal ini menunjukkan bahwa angka reforestasinya lebih tinggi dibandingkan dengan angka deforestasi.
- a. **Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)**
 Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per provinsi disajikan pada Tabel III.16 berikut.

Tabel III. 16 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per Provinsi (Ha) Tahun 2023

No.	Provinsi	Angka Deforestasi						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Total
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3		5		7		9
1	Aceh	287,7	0,8	937,4	2,4	122,8	0,3	1.348,0
2	Sumatera Utara	29,5	0,1	177,8	0,5	-	-	207,3
3	Riau	-	-	3.004,2	7,8	1.606,5	4,2	1.397,7
4	Sumatera Barat	149,0	0,4	586,1	1,5	9,3	0,0	725,8
5	Jambi	-	-	826,3	2,2	-	-	826,3
6	Sumatera Selatan	1,1	0,0	118,4	0,3	2.451,3	6,4	2.331,8
7	Kepulauan Bangka Belitung	1,9	0,0	1.194,8	3,1	-	-	1.196,7
8	Bengkulu	-	-	332,4	0,9	-	-	332,4
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	24,4	0,1	-	-	24,4
	SUMATERA	469,4	1,2	7.201,8	18,8	3.944,3	10,3	3.726,9
11	Banten	-	-	-	-	1,8	0,0	1,8
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	0,5	0,0	-	-	0,5
14	Jawa Tengah	-	-	41,3	0,1	86,0	0,2	127,3
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	83,5	0,2	413,6	1,1	497,1
	JAWA	-	-	125,2	0,3	501,4	1,3	626,7
17	Kalimantan Barat	-	-	15.850,6	41,4	4.685,5	12,2	11.165,1
18	Kalimantan Selatan	2,1	0,0	1.579,3	4,1	1.055,1	2,8	2.636,5
19	Kalimantan Tengah	-	-	4.407,2	11,5	4.751,8	12,4	344,7
20	Kalimantan Timur	78,0	0,2	12.870,2	33,6	289,9	0,8	12.658,3
21	Kalimantan Utara	1,9	0,0	4.428,7	11,6	83,7	0,2	4.514,2
	KALIMANTAN	82,0	0,2	39.136,0	102,2	8.588,5	22,4	30.629,5
22	Sulawesi Utara	1,0	0,0	12,1	0,0	-	-	13,1
23	Gorontalo	-	-	0,7	0,0	-	-	0,7
24	Sulawesi Tengah	108,2	0,3	384,1	1,0	-	-	492,3
25	Sulawesi Tenggara	144,7	0,4	318,9	0,8	-	-	463,5
26	Sulawesi Barat	-	-	36,7	0,1	-	-	36,7
27	Sulawesi Selatan	-	-	14,5	0,0	-	-	14,5
	SULAWESI	253,9	0,7	765,6	2,0	-	-	1.019,5
28	Bali	-	-	-	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	95,9	0,3	216,7	0,6	25,3	0,1	337,9
30	Nusa Tenggara Timur	139,0	0,4	83,1	0,2	-	-	222,0
	BALI NUSA TENGGARA	234,8	0,6	299,8	0,8	25,3	0,1	559,9
31	Maluku Utara	2,5	0,0	693,5	1,8	-	-	696,0
32	Maluku	-	-	55,2	0,1	-	-	55,2
	MALUKU	2,5	0,0	748,8	2,0	-	-	751,2
33	Papua	33,0	0,1	4,3	0,0	-	-	37,3
34	Papua Barat	162,5	0,4	66,3	0,2	-	-	228,8
35	Papua Barat Daya	509,0	1,3	18,8	0,0	-	-	527,8
36	Papua Pegunungan	9,5	0,0	-	-	-	-	9,5
37	Papua Selatan	133,3	0,3	32,8	0,1	-	-	166,1
38	Papua Tengah	-	-	18,9	0,0	-	-	18,9
	PAPUA	847,4	2,2	141,0	0,4	-	-	988,4
	INDONESIA	1.889,8	4,9	48.418,3	126,4	12.006,0	31,3	38.302,1

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HP per provinsi pada Tabel III.16, terlihat bahwa:

- Deforestasi dalam kawasan HP terjadi pada hutan primer dan hutan sekunder. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder dengan luasan 48,4 ribu ha. Deforestasi pada hutan primer seluas 1,9 ribu ha. Total deforestasi lebih rendah dari

deforestasi hutan sekunder karena terdapat reforestasi yang lebih besar dalam hutan tanaman seluas 12,0 ribu ha.

- b. Provinsi Kalimantan Timur mengalami deforestasi dalam kawasan HP tertinggi yaitu seluas 12,7 ribu ha dimana terjadi pada hutan sekunder seluas 12,9 ribu ha, hutan primer 78 ha dan pada hutan tanaman terjadi reforestasi seluas 0,3 ribu ha sehingga luas reforestasi menjadi pengurang pada deforestasi netto.
- c. Provinsi dengan deforestasi tertinggi di kawasan HP tiap kelompok Pulau/Kepulauan diantaranya: Provinsi Riau untuk Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Timur untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, Provinsi Papua Barat Daya untuk Pulau Papua, dan Provinsi Jawa Timur untuk Pulau Jawa.
- d. Provinsi yang memiliki deforestasi **lebih dari 1.000 ha** pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.17:

Tabel III. 17 Luas Deforestasi pada Kawasan HP >1.000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Timur	12.658,3
2	Kalimantan Barat	11.165,1
3	Kalimantan Utara	4.514,2
4	Kalimantan Selatan	2.636,5
5	Riau	1.397,7
6	Aceh	1.348,0
7	Kepulauan Bangka Belitung	1.196,7

- e. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran **100-1.000 ha** pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.18:

Tabel III. 18 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dalam kisaran 100–1000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Jambi	826,3
2	Sumatera Barat	725,8
3	Maluku Utara	696,0
4	Papua Barat Daya	527,8
5	Jawa Timur	497,1
6	Sulawesi Tengah	492,3
7	Sulawesi Tenggara	463,5
8	Nusa Tenggara Barat	337,9
9	Bengkulu	332,4
10	Papua Barat	228,8
11	Nusa Tenggara Timur	222,0
12	Sumatera Utara	207,3
13	Papua Selatan	166,1
14	Jawa Tengah	127,3

- f. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kurang dari **100 ha** pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.19:

Tabel III. 19 Luas Deforestasi pada Kawasan HP < 100 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Maluku	55,2
2	Papua	37,3
3	Sulawesi Barat	36,7
4	Kepulauan Riau	24,4
5	Papua Tengah	18,9
6	Sulawesi Selatan	14,5
7	Sulawesi Utara	13,1
8	Papua Pegunungan	9,5
9	Banten	1,8
10	Jawa Barat	0,5

- g. Provinsi yang tidak mengalami deforestasi di dalam kawasan HP adalah Provinsi Lampung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Bali
- h. Provinsi yang memiliki deforestasi dengan angka negatif pada kawasan HP antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.20:

Tabel III. 20 Luas Deforestasi pada Kawasan HP dengan angka negatif

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Gorontalo	-0,7
2	Kalimantan Tengah	-344,7
3	Sumatera Selatan	-2.331,8

- i. Deforestasi Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan angka negatif yang mengindikasikan bahwa reforestasi lebih besar dari pada deforestasi bruto dalam kawasan hutan produksi.

Kawasan HP dapat dimanfaatkan melalui beberapa kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan HP diantaranya pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu berasal dari hutan yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil budidaya tanaman (hutan tanaman).

b. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)

Hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per provinsi disajikan pada Tabel III.21 berikut.

Tabel III. 21 Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per Provinsi (Ha) Tahun 2023

No.		Provinsi		Angka Deforestasi					Total	
				Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		
				Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)		%
1	2	3		5		7		9		
1	Aceh	-	-	4,5	0,1	-	-	4,5		
2	Sumatera Utara	1,2	0,0	202,4	3,5	-	-	203,7		
3	Riau	4,4	0,1	700,4	12,1	-	1,0	703,8		
4	Sumatera Barat	-	-	1.132,2	19,5	-	-	1.132,2		
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-		
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-		
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-		
8	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-		
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kepulauan Riau	-	-	27,2	0,5	-	-	27,2		
	SUMATERA	5,7	0,1	2.066,7	35,6	-	1,0	2.071,4		
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-		
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-		
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-		
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-		
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-		
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-		
	JAWA	-	-	-	-	-	-	-		
17	Kalimantan Barat	-	-	63,0	1,1	-	-	63,0		
18	Kalimantan Selatan	-	-	58,6	1,0	-	-	58,6		
19	Kalimantan Tengah	-	-	1.005,1	17,3	-	-	1.005,1		
20	Kalimantan Timur	3,4	0,1	878,7	15,1	55,7	1,0	937,8		
21	Kalimantan Utara	-	-	82,0	1,4	-	-	82,0		
	KALIMANTAN	3,4	0,1	2.087,3	35,9	55,7	1,0	2.146,4		
22	Sulawesi Utara	-	-	7,0	0,1	-	-	7,0		
23	Gorontalo	-	-	10,4	0,2	-	-	10,4		
24	Sulawesi Tengah	25,4	0,4	150,5	2,6	-	-	175,9		
25	Sulawesi Tenggara	1,6	0,0	67,7	1,2	-	-	69,3		
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-		
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-		
	SULAWESI	27,0	0,5	235,7	4,1	-	-	262,7		
28	Bali	-	-	-	-	-	-	-		
29	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-		
30	Nusa Tenggara Timur	1,8	0,0	0,6	0,0	-	-	2,3		
	BALI NUSA TENGGARA	1,8	0,0	0,6	0,0	-	-	2,3		
31	Maluku Utara	18,3	0,3	624,9	10,8	-	-	643,2		
32	Maluku	-	-	90,7	1,6	-	-	90,7		
	MALUKU	18,3	0,3	715,6	12,3	-	-	733,9		
33	Papua	5,9	0,1	137,0	2,4	-	-	142,9		
34	Papua Barat	20,4	0,4	24,7	0,4	-	-	45,2		
35	Papua Barat Daya	76,1	1,3	72,2	1,2	-	-	148,3		
36	Papua Pegunungan	29,4	0,5	2,1	0,0	-	-	31,5		
37	Papua Selatan	-	-	25,8	0,4	-	-	25,8		
38	Papua Tengah	60,4	1,0	139,8	2,4	-	-	200,2		
	PAPUA	192,3	3,3	401,7	6,9	-	-	594,0		
	INDONESIA	248,4	4,3	5.507,5	94,8	54,8	0,9	5.810,7		

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di dalam kawasan HPK per provinsi pada Tabel III.21, terlihat bahwa:

- Deforestasi dalam fungsi HPK terjadi pada hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman. Deforestasi sebagian besar terjadi pada hutan sekunder yaitu 5,5 ribu ha (94,8%)

- b. Deforestasi tertinggi dalam fungsi kawasan HPK terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan angka 1,1 ribu ha pada hutan sekunder.
- c. Provinsi dengan deforestasi tertinggi di kawasan HPK tiap kelompok Pulau/Kepulauan diantaranya: Provinsi Sumatera Barat untuk Pulau Sumatera, Provinsi Kalimantan Tengah untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, Provinsi Papua Tengah untuk Pulau Papua.
- d. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran **>1.000,0 ha** pada kawasan HPK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.22:

Tabel III. 22 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK **>1.000 ha**

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Sumatera Barat	1.132,2
2	Kalimantan Tengah	1.005,1

- e. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran sekitar **100,0–1.000,0 ha** pada kawasan HPK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.23:

Tabel III. 23 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK dalam kisaran **100,0–1.000,0 ha**

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Timur	937,8
2	Riau	703,8
3	Maluku Utara	643,2
4	Sumatera Utara	203,7
5	Papua Tengah	200,2
6	Sulawesi Tengah	175,9
7	Papua Barat Daya	148,3
8	Papua	142,9

- f. Provinsi yang memiliki deforestasi **kurang dari 100 ha** pada kawasan HPK antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.24:

Tabel III. 24 Luas Deforestasi pada Kawasan HPK **kurang dari 100 ha**

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Maluku	90,7
2	Kalimantan Utara	82,0
3	Sulawesi Tenggara	69,3
4	Kalimantan Barat	63,0
5	Kalimantan Selatan	58,6
6	Papua Barat	45,2
7	Papua Pegunungan	31,5
8	Kepulauan Riau	27,2
9	Papua Selatan	25,8
10	Gorontalo	10,4
11	Sulawesi Utara	7,0
12	Aceh	4,5
13	Nusa Tenggara Timur	2,3

- g. Deforestasi tidak teridentifikasi pada Provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Hutan Produksi yang dapat Di-Konversi (HPK) adalah kawasan hutan di luar hutan tetap yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan. Pada umumnya diperuntukkan bagi kegiatan di luar kehutanan, antara lain transmigrasi dan perkebunan, dengan alternatif pelepasan kawasan menjadi kawasan Non Hutan Negara atau Areal Penggunaan Lain (APL).

(4) Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL)

Hasil penghitungan deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per provinsi disajikan pada Tabel III.25 berikut.

Tabel III. 25 Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per Provinsi (Ha)
Tahun 2023

No. Provinsi		Angka Deforestasi						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Total
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3		5		7		9
1	Aceh	439,3	0,9	2.881,6	5,9	32,2	0,1	3.353,1
2	Sumatera Utara	329,1	0,7	3.611,1	7,4	40,3	0,1	3.899,9
3	Riau	119,4	0,2	2.457,5	5,0	618,5	1,3	1.958,4
4	Sumatera Barat	3,9	0,0	846,5	1,7	-	-	850,4
5	Jambi	-	-	1.211,0	2,5	-	-	1.211,0
6	Sumatera Selatan	-	-	255,1	0,5	57,3	0,1	312,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	609,2	1,2	-	-	609,2
8	Bengkulu	-	-	95,2	0,2	-	-	95,2
9	Lampung	-	-	16,6	0,0	-	-	16,6
10	Kepulauan Riau	-	-	292,8	0,6	-	-	292,8
	SUMATERA	891,7	1,8	12.276,5	25,1	569,2	1,2	12.599,0
11	Banten	-	-	6,7	0,0	-	-	6,7
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	9,5	0,0	-	-	9,5
14	Jawa Tengah	-	-	29,4	0,1	125,5	0,3	155,0
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	125,9	0,3	41,4	0,1	167,3
	JAWA	-	-	171,5	0,4	166,9	0,3	338,4
17	Kalimantan Barat	-	-	5.309,6	10,8	12,6	0,0	5.297,0
18	Kalimantan Selatan	-	-	4.482,4	9,2	197,7	0,4	4.680,1
19	Kalimantan Tengah	-	-	706,2	1,4	19,9	0,0	726,0
20	Kalimantan Timur	64,4	0,1	10.582,6	21,6	174,7	0,4	10.821,6
21	Kalimantan Utara	110,8	0,2	8.895,2	18,2	-	-	9.006,1
	KALIMANTAN	175,2	0,4	29.975,9	61,3	379,7	0,8	30.530,8
22	Sulawesi Utara	1,0	0,0	52,5	0,1	-	-	53,5
23	Gorontalo	1,5	0,0	481,9	1,0	-	-	483,4
24	Sulawesi Tengah	200,8	0,4	1.022,8	2,1	-	-	1.223,5
25	Sulawesi Tenggara	37,9	0,1	556,4	1,1	-	-	594,3
26	Sulawesi Barat	-	-	101,9	0,2	-	-	101,9
27	Sulawesi Selatan	1,4	0,0	88,0	0,2	-	-	89,5
	SULAWESI	242,6	0,5	2.303,5	4,7	-	-	2.546,1
28	Bali	-	-	-	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	8,1	0,0	190,9	0,4	273,3	0,6	74,2
30	Nusa Tenggara Timur	135,9	0,3	394,5	0,8	-	-	530,5
	BALI NUSA TENGGARA	144,1	0,3	585,4	1,2	273,3	0,6	456,2
31	Maluku Utara	3,2	0,0	453,8	0,9	-	-	457,0
32	Maluku	-	-	23,4	0,0	-	-	23,4
	MALUKU	3,2	0,0	477,2	1,0	-	-	480,4
33	Papua	13,5	0,0	267,4	0,5	-	-	280,9
34	Papua Barat	40,4	0,1	684,1	1,4	-	-	724,5
35	Papua Barat Daya	20,9	0,0	840,7	1,7	-	-	861,6
36	Papua Pegunungan	0,3	0,0	-	-	-	-	0,3
37	Papua Selatan	6,1	0,0	32,9	0,1	-	-	39,0
38	Papua Tengah	1,0	0,0	80,6	0,2	-	-	81,6
	PAPUA	82,2	0,2	1.905,7	3,9	-	-	1.988,0
	INDONESIA	1.539,1	3,1	47.695,8	97,5	295,9	0,6	48.939,0

Berdasarkan hasil penghitungan deforestasi di APL per provinsi pada Tabel III.24, terlihat bahwa:

- Deforestasi terjadi pada hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman. Sebagian besar deforestasi teridentifikasi pada hutan sekunder dengan luasan 47,7 ribu ha atau 97,5%.

- b. Provinsi Kalimantan Timur mengalami deforestasi tertinggi pada fungsi APL dengan luas 10,8 ribu ha dimana dominan terjadi pada hutan sekunder seluas 10,6 ribu ha.
- c. Provinsi dengan deforestasi dalam fungsi APL tertinggi tiap kelompok Pulau/Kepulauan di antaranya: Sumatera Utara untuk Pulau Sumatera, Jawa Timur untuk Pulau Jawa, Kalimantan Timur untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi Tengah untuk Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Maluku Utara untuk Kepulauan Maluku, dan Papua Barat Daya untuk Pulau Papua.
- d. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran lebih dari 1.000 ha pada APL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.26:

Tabel III. 26 Luas Deforestasi pada APL > 1.000 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Kalimantan Timur	10.821,6
2	Kalimantan Utara	9.006,1
3	Kalimantan Barat	5.297,0
4	Kalimantan Selatan	4.680,1
5	Sumatera Utara	3.899,9
6	Aceh	3.353,1
7	Riau	1.958,4
8	Sulawesi Tengah	1.223,5
9	Jambi	1.211,0

- e. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran 100,0–1000,0 ha pada APL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.27:

Tabel III. 27 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran 100,0–1000,0 ha

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Papua Barat Daya	861,6
2	Sumatera Barat	850,4
3	Kalimantan Tengah	726,0
4	Papua Barat	724,5
5	Kepulauan Bangka Belitung	609,2
6	Sulawesi Tenggara	594,3
7	Nusa Tenggara Timur	530,5
8	Gorontalo	483,4
9	Maluku Utara	457,0
10	Sumatera Selatan	312,5
11	Kepulauan Riau	292,8
12	Papua	280,9
13	Jawa Timur	167,3
14	Jawa Tengah	155,0
15	Sulawesi Barat	101,9

- f. Provinsi yang memiliki deforestasi dalam kisaran kurang dari 100,0 ha pada APL antara lain sebagaimana diuraikan pada Tabel III.28:

Tabel III. 28 Luas Deforestasi pada APL dalam kisaran **kurang dari 100,0 ha**

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1	Bengkulu	95,2
2	Sulawesi Selatan	89,5
3	Papua Tengah	81,6
4	Sulawesi Utara	53,5
5	Papua Selatan	39,0
6	Maluku	23,4
7	Lampung	16,6
8	Jawa Barat	9,5
9	Banten	6,7
10	Papua Pegunungan	0,3

- g. Provinsi yang tidak mengalami deforestasi di APL adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.
- h. Provinsi dengan Deforestasi angka negatif yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar -74,2 ha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa reforestasi lebih besar dari pada deforestasi bruto dalam APL.

Keberadaan hutan primer pada APL memerlukan kecermatan dalam pengelolaannya terutama dalam hal pemanfaatannya, karena merupakan aset yang penting sebagai sistem penyangga kehidupan di tengah maraknya penebangan di dalam kawasan hutan. Areal ini juga dapat dicadangkan sebagai kawasan hutan negara sebagai alternatif pengganti peran fungsi hutan dari kawasan hutan yang telah terdegradasi.

BAB IV SEBARAN DAN PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA

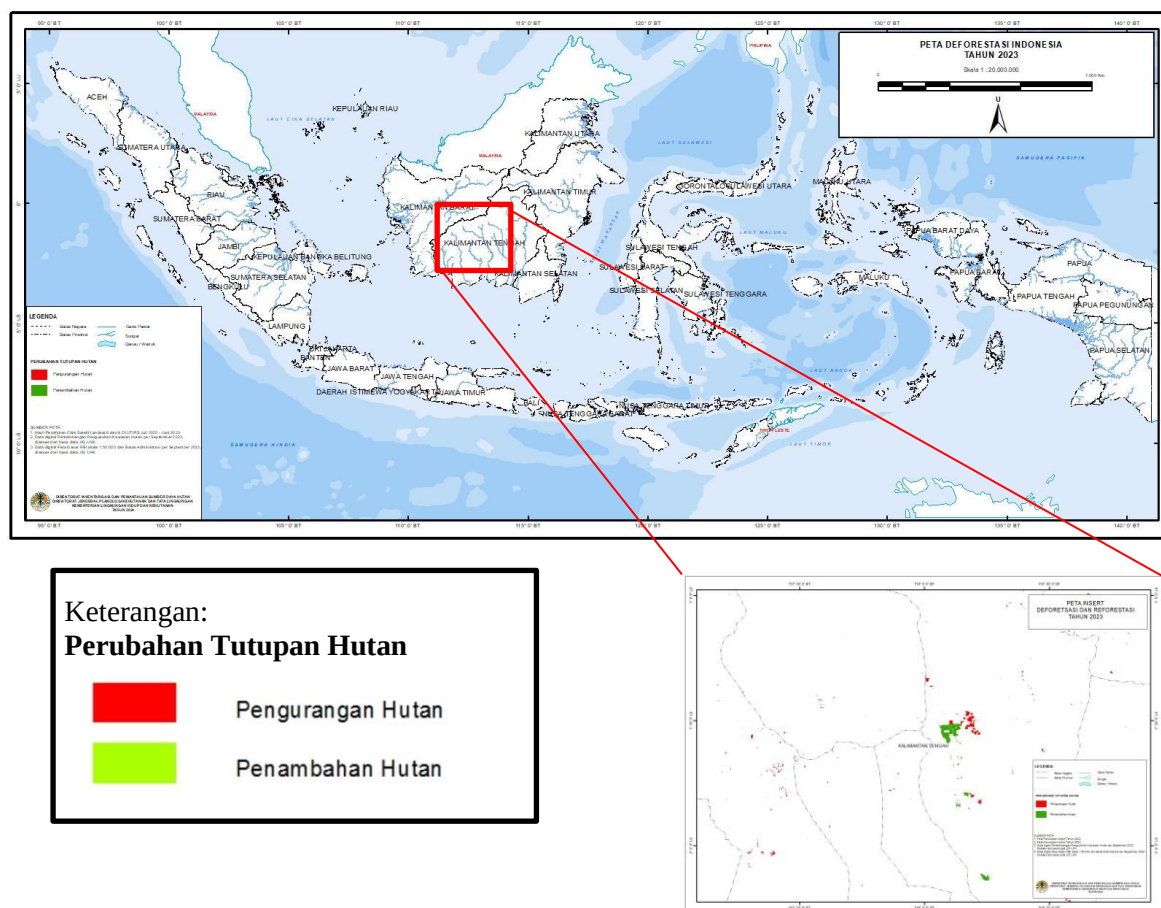


BAB IV

SEBARAN DAN PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA

A. Sebaran Deforestasi Indonesia

Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2022 dan 2023 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Gambar 21. Peta tersebut menyajikan sebaran perubahan tutupan hutan meliputi pengurangan maupun penambahan hutan mencakup tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman. Pengurangan hutan menampilkan kejadian Deforestasi Bruto sementara penambahan hutan menampilkan kejadian Reforestasi. Peta Deforestasi per provinsi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2023 disajikan selengkapnya pada Lampiran 3.

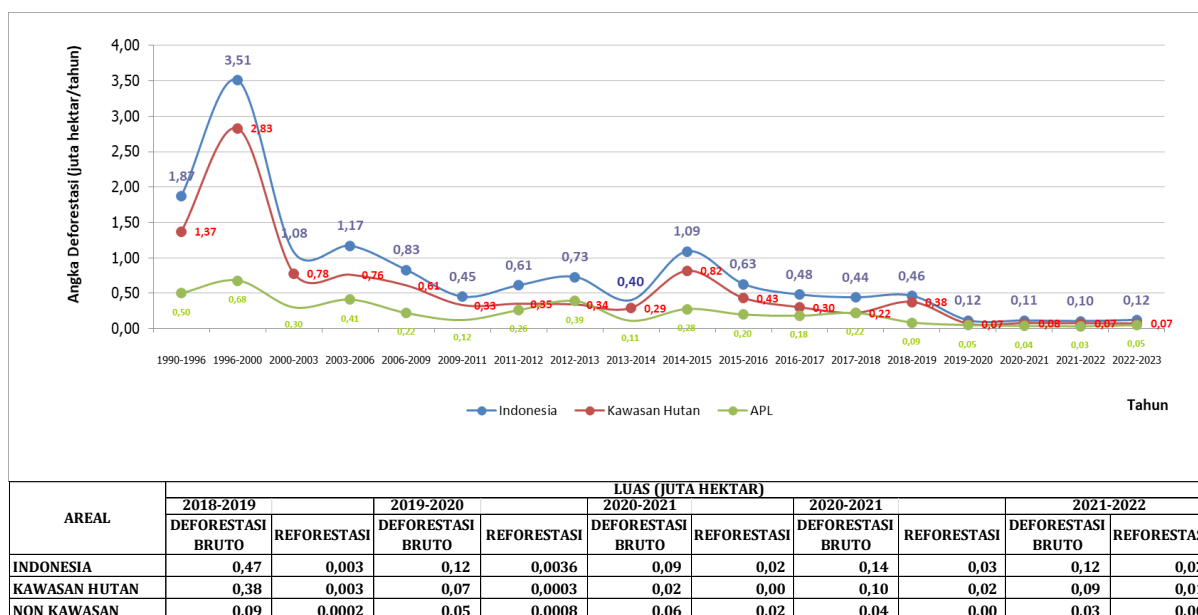


Gambar 21. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2023

B. Perkembangan Deforestasi Indonesia

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatan hanya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020-2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Sedangkan Deforestasi Netto Tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami menurun sebesar 14,1 %.

Hutan tanaman pada periode ini cenderung mengalami reforestasi yang lebih besar dari pada deforestasi bruto. Deforestasi bruto pada hutan primer mengalami penurunan sedangkan pada hutan sekunder juga mengalami kenaikan dari periode 2021-2022. Penurunan deforestasi pada hutan primer sebesar 11,3 ribu ha menjadi 9,2 ribu ha. Kenaikan pada hutan sekunder sebesar 106,4 ribu ha menjadi 132,1 ribu ha. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2023 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia netto tahun 2023 terjadi kenaikan 16,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami kenaikan sebesar 21,8 %. Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun ini terjadi sedikit kenaikan namun tetap lebih rendah daripada rata-rata deforestasi sepuluh tahun terakhir terutama jika dibandingkan dengan kejadian elnino pada tahun 2015 dan 2019 yang kurang lebih sama dengan tahun ini.



Gambar 22. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023

Pemerintah merencanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup segala bidang kehidupan, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Sesuai dengan lingkup Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, perencanaan pembangunan di bidang kehutanan tidak hanya dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetapi juga di luar kawasan hutan, atau APL. Perencanaan pembangunan di dalam kawasan hutan difokuskan pada pemanfaatan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan perencanaan pembangunan di luar kawasan hutan difokuskan pada perhutanan sosial. Perencanaan pembangunan selain pada bidang kehutanan juga dilakukan oleh berbagai bidang lain, yang masing-masing memiliki kebutuhan pemanfaatan lahan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, adanya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimungkinkan demi tercapainya target-target pembangunan tersebut.

Segala aktivitas pembangunan tersebut dapat mempengaruhi perubahan penutupan hutan dan lahan baik yang menyebabkan pertambahan areal penutupan hutan maupun pengurangan areal penutupan hutan. Perubahan penutupan hutan selain dipengaruhi oleh aktivitas yang terencana sebagaimana di atas terdapat juga faktor yang tidak terencana, salah satunya adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perubahan tersebut berbeda setiap tahunnya yang secara periodik dapat diamati dan dimonitor dalam bentuk kecenderungan (*trend*). Pemahaman terhadap *trend* ini merupakan informasi yang sangat berguna dalam urusan pengawasan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.

Kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan merupakan dinamika yang terjadi di kawasan hutan. Dinamika tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan (tidak berhutan), atau bahkan sebaliknya. Untuk menjaga agar dinamika perubahan tersebut dapat tetap terkendali, maka kebijakan integratif yang dipayungi dengan *Indonesia FOLU NetSink 2030* menjadi bernilai strategis. Hal ini karena kebijakan tersebut akan menjamin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konsisten menerapkan program-program yang saling mendukung, termasuk program untuk merehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan di dalam kawasan hutan.

Apabila kita memperhatikan besaran perhitungan deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya *corrective action* yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Deforestasi Indonesia tidak lengkap apabila tidak disajikan dalam informasi yang mencakup **di dalam** dan **diluar kawasan hutan**. Di dalam kawasan hutan mencakup yang terjadi di hutan produksi, baik **hutan produksi tetap (HP)**, **hutan produksi terbatas (HPT)** maupun **hutan produksi konversi (HPK)**, kemudian **hutan lindung (HL)** serta **hutan konservasi (HK)**. Di luar kawasan disajikan dalam **Areal Penggunaan Lain (APL)**.
2. Penyajian dalam informasi deforestasi bruto baik di hutan alam maupun hutan tanaman, deforestasi netto dan reforestasi, ditujukan agar memudahkan para **pengguna yang membutuhkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya**, misalnya untuk implementasi REDD+ (hanya untuk hutan alam), ataupun untuk pelaporan GRK (secara keseluruhan tanpa memperdulikan hutan alam maupun hutan tanaman).
3. **Deforestasi Netto Indonesia tahun 2023** sebesar **121,1 ribu ha** (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut sama nilainya dengan deforestasi bruto sebesar **145,4 ribu ha** dikurangi reforestasi sebesar **24,3 ribu ha**. Deforestasi Netto di dalam **kawasan hutan sebesar 72,2 ribu ha (59,6%)**, sedangkan di **luar kawasan hutan (APL) sebesar 48,9 ribu ha (40,4%)**. Berdasarkan tipe hutan, deforestasi Netto tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 124,6 ribu ha, di mana 76,9 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 47,4 ribu ha berada di luar kawasan hutan. Luas Deforestasi pada tipe Hutan Sekunder lebih besar dibandingkan dengan deforestasi netto Indonesia, dimana terdapat luasan reforestasi pada hutan tanaman.
4. **Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia tahun 2023** sebesar **133,8 ribu ha** (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut berasal dari Deforestasi Bruto Hutan Alam sebesar **141,3 ribu ha** dikurangi dengan Reforestasi Hutan Alam sebesar **7,5 ribu ha**. Deforestasi Netto Hutan Alam di **dalam kawasan hutan sebesar 84,6 ribu ha (63,2%)**, sedangkan di **luar kawasan hutan (APL) seluas 49,2 ribu ha (36,8%)**. Berdasarkan tipe hutan, Deforestasi Netto Hutan Alam di hutan sekunder lebih tinggi dibandingkan di hutan primer yaitu seluas 124,6 ribu ha.
5. Berdasarkan tipe hutan, **deforestasi bruto** tertinggi terjadi pada tipe hutan sekunder yaitu 132,1 ribu ha, **reforestasi** tertinggi terjadi pada tipe hutan tanaman juga yaitu 16,9 ribu ha dan **deforestasi netto** tertinggi terjadi pada hutan sekunder yaitu 124,6 ribu ha.
6. **Deforestasi Netto** per fungsi kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 4,5 ribu ha (3,7%); HL sebesar 6,1 ribu ha (5,0%); Hutan Produksi sebesar 61,6 ribu ha (50,8%) yang terdiri atas : HPT sebesar 17,5 ribu ha (14,4 %); HP sebesar 38,3 ribu ha (31,6%); HPK sebesar 5,8 ribu ha (4,8%). Deforestasi Netto di luar kawasan hutan atau APL sebesar 48,9 ribu ha (40,4%).

7. **Deforestasi Netto Hutan Alam** di dalam kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 4,5 ribu ha (3,4%); HL sebesar 6,1 ribu ha (4,5%); Hutan Produksi sebesar 74,0 ribu ha (55,3%) yang terdiri atas : HPT sebesar 18,0 ribu ha (13,4 %); HP sebesar 50,3 ribu ha (37,6%); HPK sebesar 5,8 ribu ha (4,3%). Deforestasi Netto Hutan Alam di luar kawasan hutan atau APL sebesar 49,2 ribu ha (36,8%).
8. Berdasarkan pulau/kepulauan besar, **Deforestasi Netto** tertinggi berturut-turut terjadi di Pulau Kalimantan sebesar 67,6 ribu ha (55,9%), Sumatera sebesar 36,9 ribu ha (30,5%), dan Pulau Sulawesi sebesar 6,4 ribu ha (5,3%).
9. Berdasarkan provinsi, **Deforestasi Netto** tertinggi pada fungsi HK adalah provinsi Riau (2,6 ribu ha) sementara pada fungsi HL adalah Aceh (1,2 ribu ha). Deforestasi tertinggi pada fungsi Hutan Produksi terdiri atas Provinsi Riau (5,3 ribu) untuk fungsi HPT, Provinsi Kalimantan Timur (12,7 ribu ha) untuk fungsi HP, dan Provinsi Sumatera Barat (1,1 ribu ha) untuk fungsi HPK. Sedangkan untuk APL tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 10,8 ribu ha.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Perlu analisis yang lebih mendalam terhadap lokasi-lokasi yang memiliki deforestasi tinggi untuk mengidentifikasi perubahan penutupan lahan secara spesifik meliputi gambaran kondisi yang terjadi serta faktor utama yang diduga berpengaruh.
2. Pemutakhiran data penutupan lahan dan kawasan hutan yang dilanjutkan dengan rekalkulasi dan penghitungan deforestasi sumberdaya hutan perlu terus dilakukan secara periodik setiap tahun agar kondisi sumberdaya hutan dapat terpantau dengan baik.
3. Diseminasi data dan informasi terkait deforestasi perlu diselenggarakan secara maksimal sehingga data dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, data dan informasi ini dapat sesegera mungkin digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan yang kuat dalam kegiatan tata kelola kehutanan serta penentuan kebijakan strategis lainnya.
4. Penyempurnaan data dan informasi hasil penghitungan deforestasi pada kawasan hutan perlu didukung oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah sebagai pemangku kawasan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebagai Unit Pelaksana Teknis, eselon I terkait sebagai penentu kebijakan, hingga para pihak sebagai pengguna data.
5. Monitoring terhadap identifikasi terjadinya pelanggaran yang menyebabkan perubahan penutupan hutan menjadi tidak berhutan yang dilakukan oleh masyarakat, badan usaha pemegang izin ataupun pihak lain yang secara ilegal melakukan kegiatan pembukaan hutan sehingga dapat menjadi masukan untuk upaya penegakan hukum.
6. Perlu komunikasi dan integrasi data tentang perubahan kawasan hutan baik perubahan fungsi kawasan maupun perubahan status dan peruntukan kawasan pada hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan.

7. Pemetaan areal deforestasi yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam penentuan lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan kegiatan ini dapat meningkat.
8. Pemetaan areal deforestasi yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam penyelesaian masalah kawasan hutan khususnya yang terkait dengan masalah tenurial.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- [BSN]. 2014. *Metode Penghitungan Perubahan Penutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik Secara Visual*. SNI.8033:2014. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- [FAO]. 1993. *Forest Resources Assessment 1990 (Tropical Countries)*. FAO Forestry Paper 112. Rome: Food Agriculture Organization of the United Nations.
- [FAO]. 1996. *Forest Resources Assessment 1990 : Survey of Tropical Forest Cover and Study of Change Processes*. FAO Forestry Paper 130. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- [FAO]. 2002. *Forest Resources Assessment 2000 (Tropical Countries)*. FAO Forestry Paper 190. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Holmes, D., 2002. *Where Have All the Forests Gone?* Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper. DC: The World Bank.
- Holmes, D. 2000. *Deforestation in Indonesia. A Review of the situation in 1999*. Washington DC: The World Bank.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
- [KLHK]. 2020. *Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- [KLHK]. 2020. *Rekalkulasi Penutupan lahan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.1/VII/IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Lahan.

Petunjuk Teknis Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020 tentang Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional

Revilla, J.A.V. 1993. *Preliminary Study on the Rate of Forest Cover Loss in Indonesia*. National Forest Inventory Project. Directorate General of Forest Inventory and Land Use Planning, Ministry of Forestry and Food and Agriculture Organization of the United Nations. Jakarta.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 DEFORESTASI BRUTO DAN REFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023



TABEL 1.1 ANGKA DEFORESTASI BRUTO INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	857,5	1.849,5	2.850,2	1.889,8	7.447,0	248,4	7.695,4	1.539,1	9.234,5
	- Hutan lahan kering primer	573,0	1.813,3	2.833,0	1.545,1	6.764,3	234,5	6.998,9	1.383,4	8.382,3
	- Hutan rawa primer	266,8	13,8	3,2	335,8	619,6	4,4	624,1	68,8	692,8
	- Hutan mangrove primer	17,7	22,5	14,0	8,9	63,1	9,4	72,5	86,9	159,4
	B. Hutan Sekunder	4.857,1	6.226,4	16.183,9	51.152,5	78.419,8	5.846,7	84.266,5	47.809,5	132.076,0
	- Hutan lahan kering sekunder	4.050,0	5.309,0	13.685,4	29.871,3	52.915,7	3.237,1	56.152,8	32.859,9	89.012,7
	- Hutan rawa sekunder	611,2	317,7	1.736,8	19.792,9	22.458,7	2.493,0	24.951,7	11.311,5	36.263,2
	- Hutan mangrove sekunder	195,8	599,6	761,7	1.488,3	3.045,4	116,6	3.162,0	3.638,1	6.800,1
	C. Hutan Tanaman*	9,7	37,6	22,9	2.694,4	2.764,6	55,7	2.820,3	1.308,5	4.128,8
	TOTAL	5.724,2	8.113,5	19.056,9	55.736,7	88.631,4	6.150,9	94.782,3	50.657,1	145.439,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto merupakan hasil reboisasi atau penghijauan yang berada baik di dalam maupun diluar Kawasan Hutan; dimana tidak ada jaminan akan ditanam kembali.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

TABEL 1.2 ANGKA REFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ REFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	1.216,4	2.002,3	1.071,3	2.734,2	7.024,2	339,3	7.363,4	113,7	7.477,1
	- Hutan lahan kering sekunder	-	660,3	1.071,3	307,8	2.039,4	125,2	2.164,6	28,9	2.193,5
	- Hutan rawa sekunder	1.195,6	1.340,1	-	2.417,1	4.952,8	214,0	5.166,9	30,3	5.197,2
	- Hutan mangrove sekunder	20,7	2,0	-	9,3	32,0	-	32,0	54,4	86,4
	C. Hutan Tanaman*	19,5	9,5	524,0	14.700,4	15.253,4	1,0	15.254,3	1.604,4	16.858,7
	TOTAL	1.235,9	2.011,8	1.595,3	17.434,6	22.277,6	340,2	22.617,8	1.718,1	24.335,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto merupakan hasil reboisasi atau penghijauan yang berada baik di dalam maupun diluar Kawasan Hutan; dimana tidak ada jaminan akan ditanam kembali.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

LAMPIRAN 2
DEFORESTASI INDONESIA
DAN DEFORESTASI PER
PULAU
DI DALAM DAN DI LUAR
KAWASAN HUTAN
TAHUN 2023

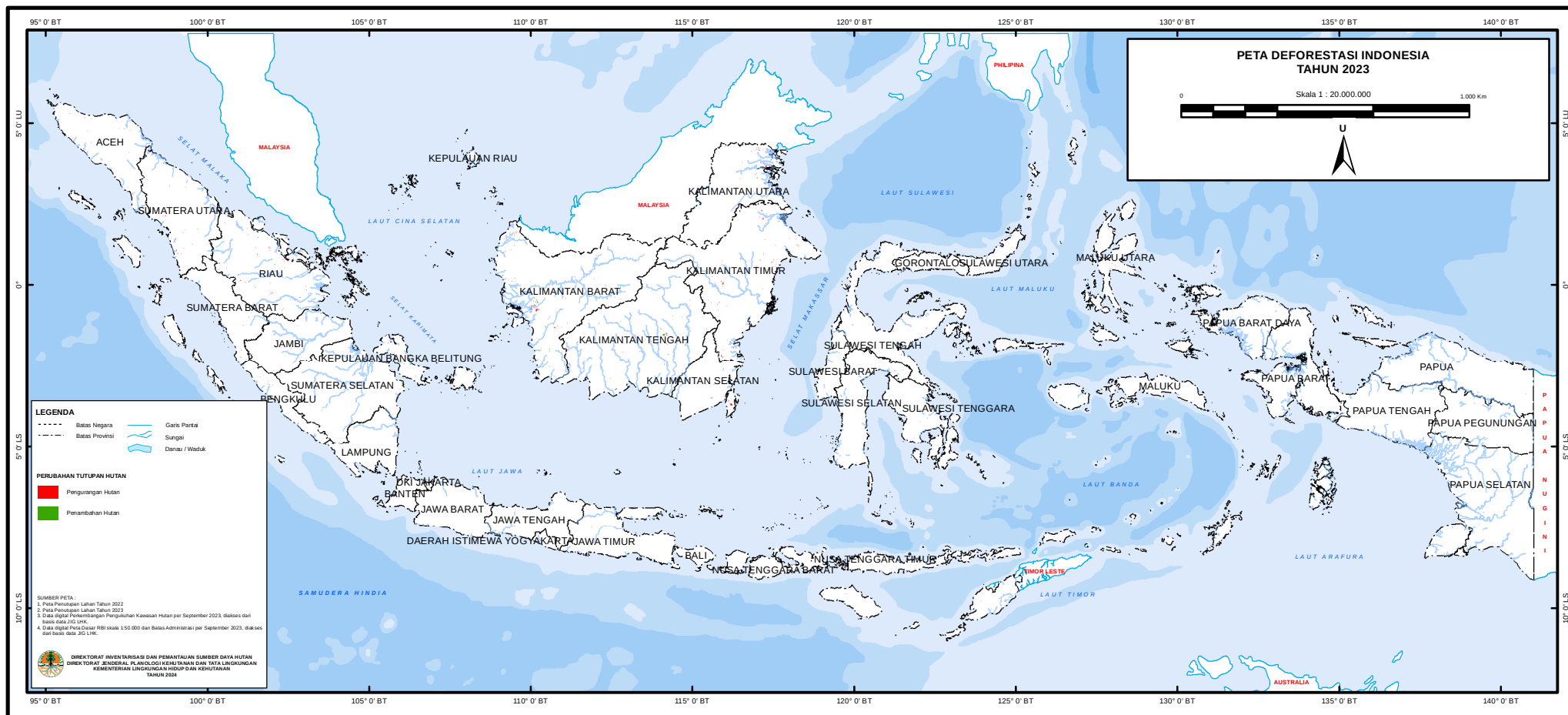


TABEL 2.1 ANGKA DEFORESTASI NETTO INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. Hutan Primer	857,5	1.849,5	2.850,2	1.889,8	7.447,0	248,4	7.695,4	1.539,1	9.234,5
	- Hutan lahan kering primer	573,0	1.813,3	2.833,0	1.545,1	6.764,3	234,5	6.998,9	1.383,4	8.382,3
	- Hutan rawa primer	266,8	13,8	3,2	335,8	619,6	4,4	624,1	68,8	692,8
	- Hutan mangrove primer	17,7	22,5	14,0	8,9	63,1	9,4	72,5	86,9	159,4
	B. Hutan Sekunder	3.640,7	4.224,0	15.112,6	48.418,3	71.395,6	5.507,5	76.903,1	47.695,8	124.598,9
	- Hutan lahan kering sekunder	4.050,0	4.648,7	12.614,1	29.563,5	50.876,3	3.111,8	53.988,1	32.831,0	86.819,2
	- Hutan rawa sekunder	- 584,4	- 1.022,3	1.736,8	17.375,8	17.505,8	2.279,0	19.784,9	11.281,1	31.066,0
	- Hutan mangrove sekunder	175,1	597,7	761,7	1.479,0	3.013,4	116,6	3.130,1	3.583,7	6.713,7
	C. Hutan Tanaman*	- 9,8	28,2	- 501,1	- 12.006,0	- 12.488,8	54,8	- 12.434,0	- 295,9	- 12.729,9
	TOTAL	4.488,4	6.101,7	17.461,6	38.302,1	66.353,8	5.810,7	72.164,5	48.939,0	121.103,5

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

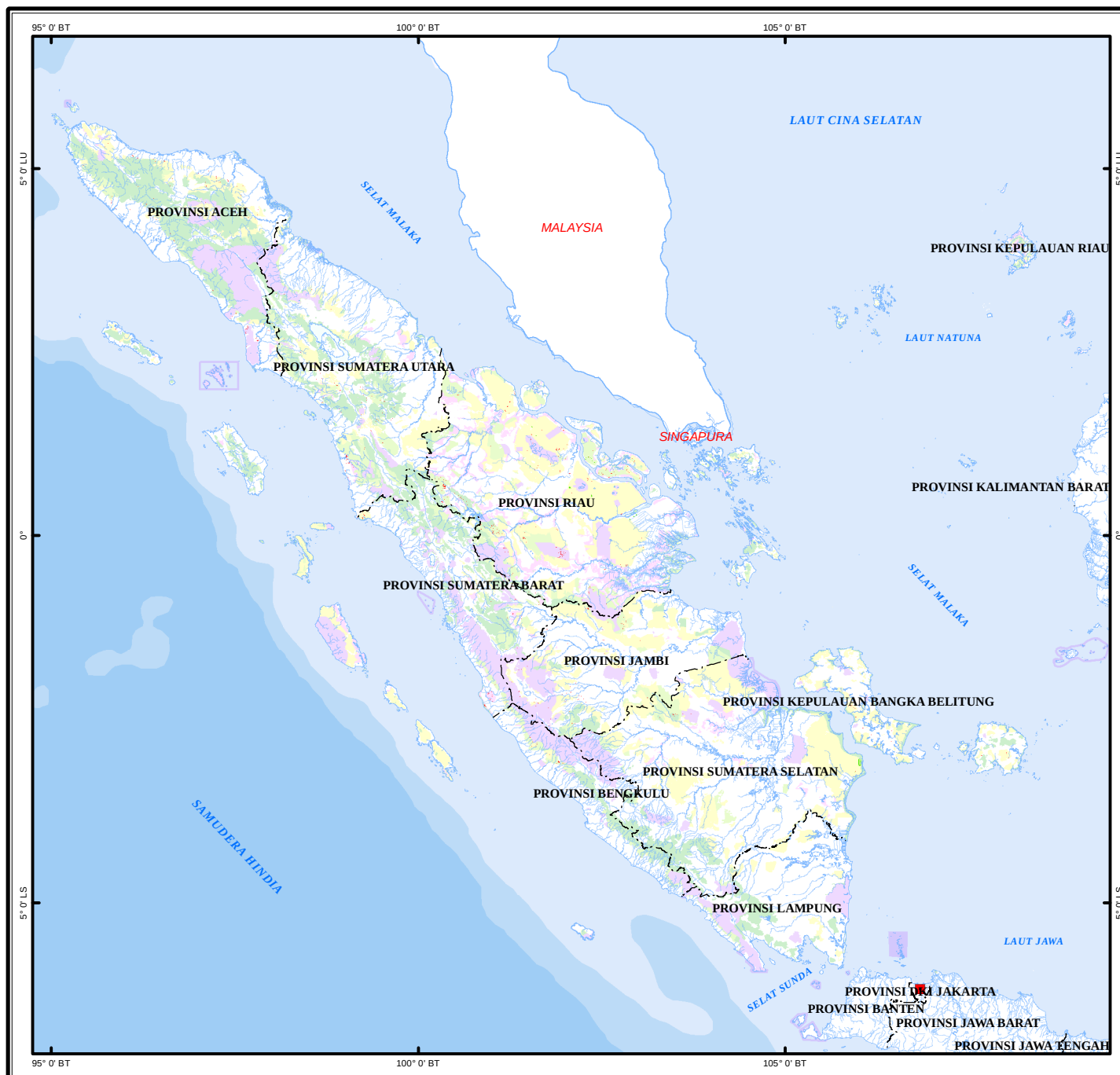


TABEL 2.2 ANGKA DEFORESTASI PULAU SUMATERA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU SUMATERA									
	A. Hutan Primer	682,6	715,3	1.646,5	469,4	3.513,8	5,7	3.519,5	891,7	4.411,2
	- Hutan lahan kering primer	415,7	715,3	1.646,5	317,3	3.094,9	5,7	3.100,5	841,0	3.941,5
	- Hutan rawa primer	266,8	-	-	151,0	417,8	-	417,8	48,5	466,3
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	1,1	1,1	-	1,1	2,3	3,4
	B. Hutan Sekunder	4.128,7	3.804,3	7.997,8	7.201,8	23.132,6	2.066,7	25.199,3	12.276,5	37.475,8
	- Hutan lahan kering sekunder	3.618,6	3.350,8	5.842,9	3.745,6	16.558,0	603,3	17.161,3	8.612,1	25.773,4
	- Hutan rawa sekunder	497,0	190,8	1.561,5	3.362,1	5.611,4	1.383,5	6.994,9	3.037,2	10.032,1
	- Hutan mangrove sekunder	13,1	262,7	593,3	94,0	963,1	79,9	1.043,1	627,1	1.670,2
	C. Hutan Tanaman*	9,7	4,5	- 509,8	- 3.944,3	- 4.439,9	- 1,0	- 4.440,8	- 569,2	- 5.010,1
	TOTAL	4.821,0	4.524,2	9.134,5	3.726,9	22.206,5	2.071,4	24.277,9	12.599,0	36.876,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PULAU SUMATERA

Skala 1: 9.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

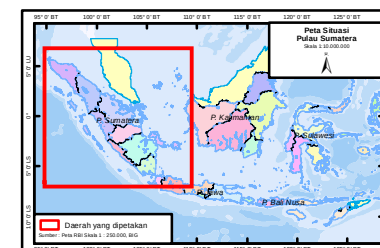
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



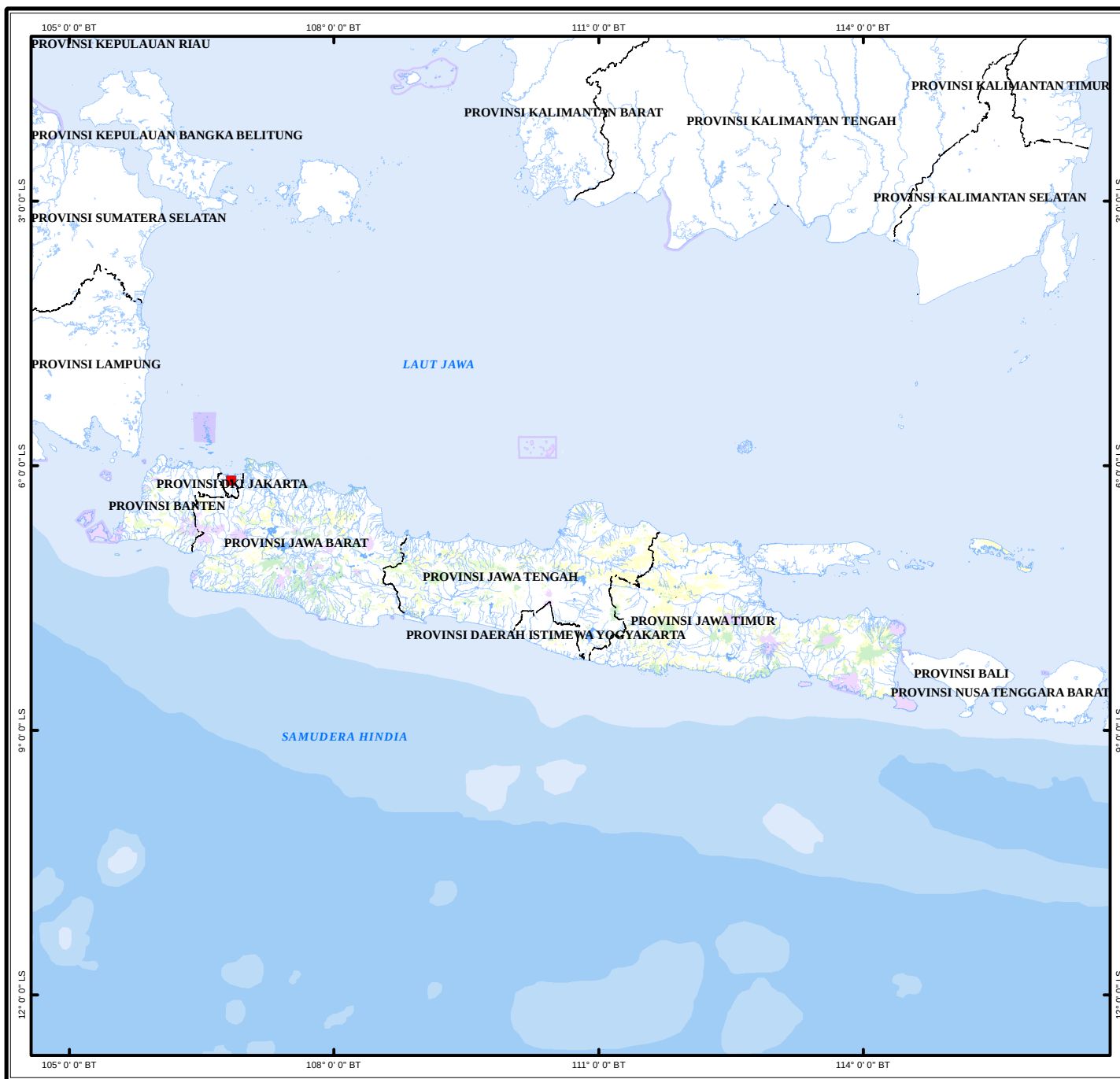
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

TABEL 2.3 ANGKA DEFORESTASI PULAU JAWA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU JAWA									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	22,9	24,4	5,0	125,2	177,5	-	177,5	171,5	349,0
	- Hutan lahan kering sekunder	18,6	5,0	5,0	83,5	112,0	-	112,0	13,6	125,6
	- Hutan rawa sekunder	4,2	-	-	-	4,2	-	4,2	1,3	5,6
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,4	-	41,8	61,2	-	61,2	156,6	217,8
	C. Hutan Tanaman*	-	23,6	7,7	501,4	532,8	-	532,8	166,9	699,7
	TOTAL	22,9	48,0	12,7	626,7	710,3	0,0	710,3	338,4	1.048,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

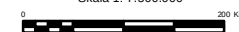
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PULAU JAWA

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

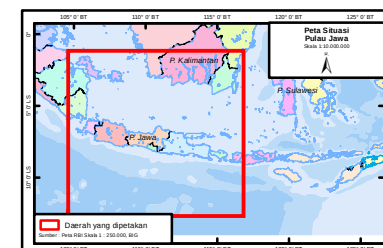
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



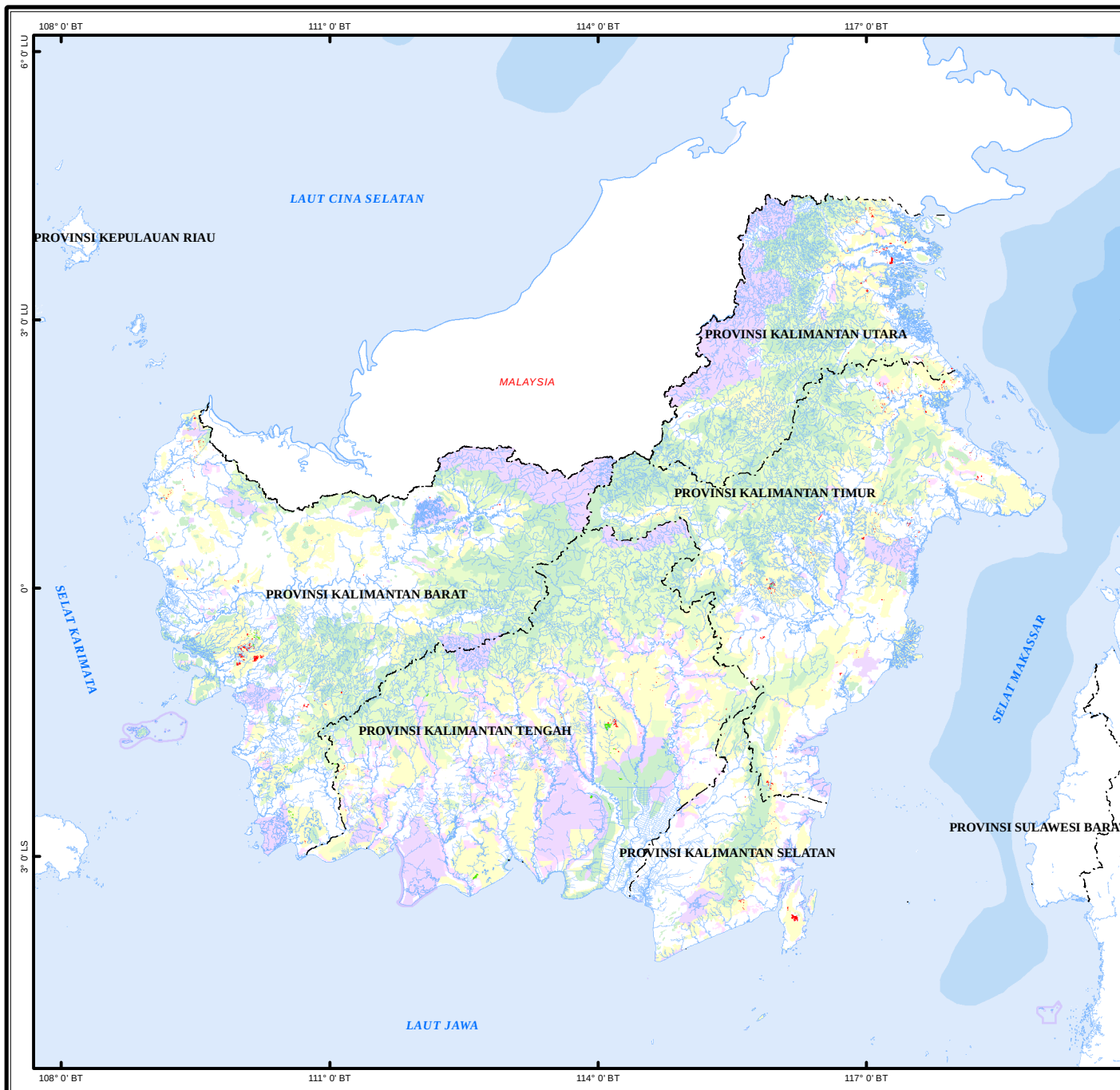
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 2.4 ANGKA DEFORESTASI PULAU KALIMANTAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU KALIMANTAN									
	A. Hutan Primer	23,9	135,3	335,2	82,0	576,4	3,4	579,8	175,2	755,0
	- Hutan lahan kering primer	17,5	127,5	335,2	3,4	483,6	3,4	487,0	117,4	604,4
	- Hutan rawa primer	-	-	-	72,4	72,4	-	72,4	17,4	89,8
	- Hutan mangrove primer	6,4	7,8	-	6,2	20,4	-	20,4	40,4	60,8
	B. Hutan Sekunder	- 790,5	- 665,5	5.295,1	39.136,0	42.975,1	2.087,3	45.062,4	29.975,9	75.038,4
	- Hutan lahan kering sekunder	165,0	491,9	4.967,8	23.865,1	29.489,7	1.205,2	30.694,9	19.133,2	49.828,1
	- Hutan rawa sekunder	- 1.113,8	- 1.224,0	159,0	13.956,6	11.777,9	872,7	12.650,5	8.201,3	20.851,8
	- Hutan mangrove sekunder	158,3	66,6	168,3	1.314,3	1.707,5	9,4	1.716,9	2.641,5	4.358,5
	C. Hutan Tanaman*	-	-	0,9	- 8.588,5	- 8.587,5	55,7	- 8.531,8	379,7	- 8.152,1
	TOTAL	-766,6	-530,2	5.631,3	30.629,5	34.964,0	2.146,4	37.110,4	30.530,8	67.641,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PULAU KALIMANTAN

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

--- Batas Negara

--- Batas Provinsi

~ Sungai

~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

Red color: Pengurangan Hutan

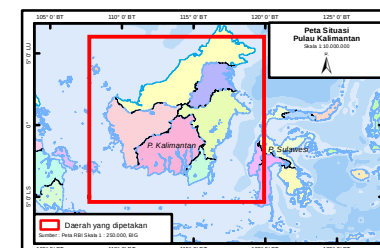
Green color: Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

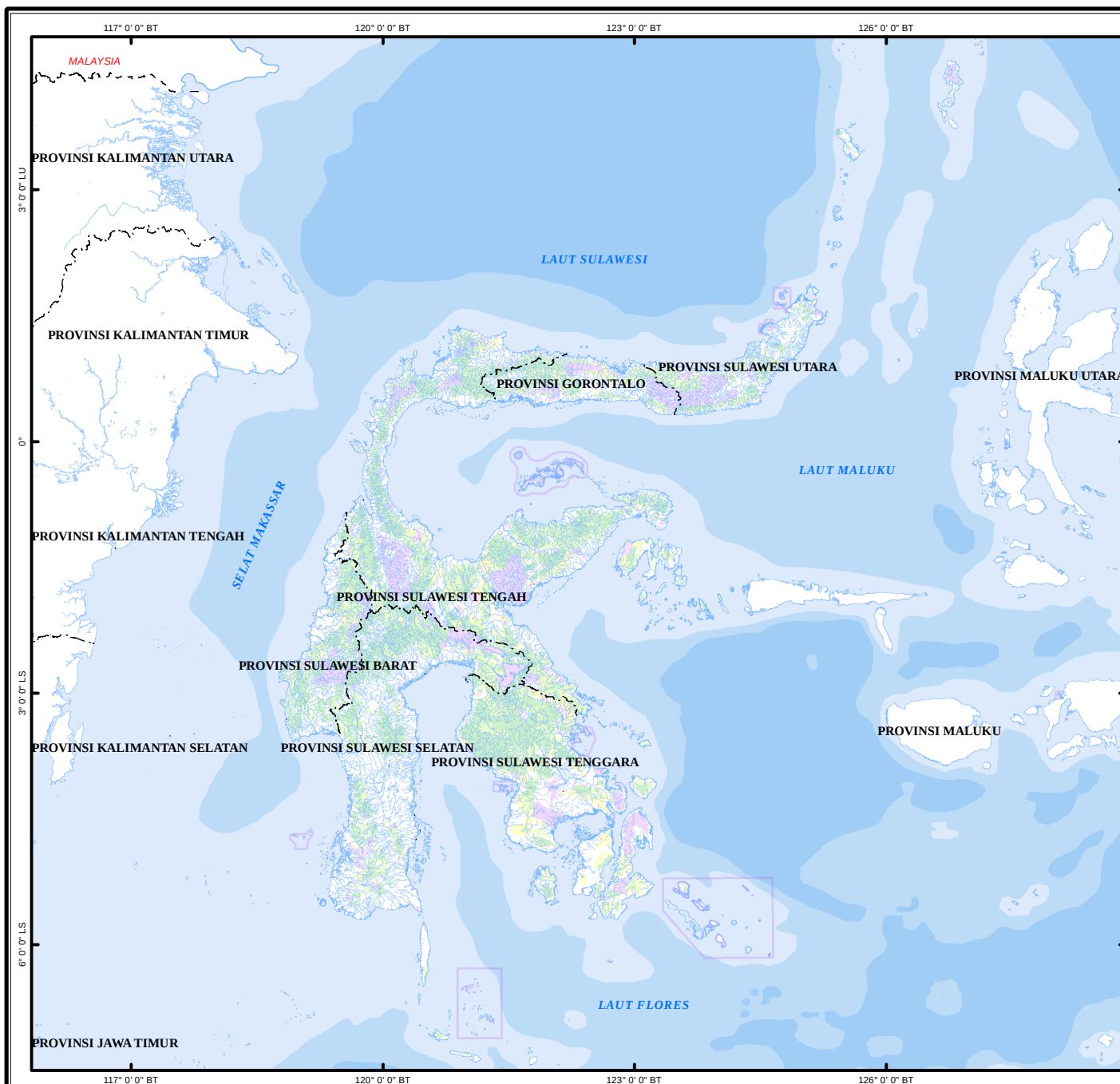
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 2.5 ANGKA DEFORESTASI PULAU SULAWESI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU SULAWESI									
	A. Hutan Primer	35,2	225,6	329,0	253,9	843,6	27,0	870,6	242,6	1.113,2
	- Hutan lahan kering primer	35,2	225,6	329,0	253,9	843,6	27,0	870,6	209,5	1.080,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	33,2	33,2
	B. Hutan Sekunder	122,6	722,3	1.118,0	765,6	2.728,5	235,7	2.964,2	2.303,5	5.267,7
	- Hutan lahan kering sekunder	94,5	471,4	1.118,0	765,6	2.449,5	231,2	2.680,7	2.176,9	4.857,6
	- Hutan rawa sekunder	28,2	-	-	-	28,2	-	28,2	-	28,2
	- Hutan mangrove sekunder	-	250,9	-	-	250,9	4,4	255,3	126,6	381,9
	C. Hutan Tanaman*	- 19,5	-	-	-	- 19,5	-	- 19,5	-	- 19,5
	TOTAL	138,3	947,9	1.447,0	1.019,5	3.552,6	262,7	3.815,3	2.546,1	6.361,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI

TAHUN 2023

PULAU SULAWESI

Skala 1: 8.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

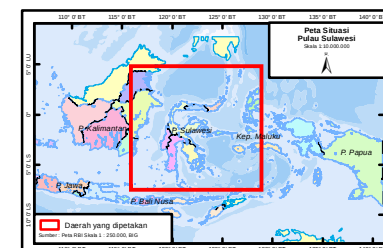
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

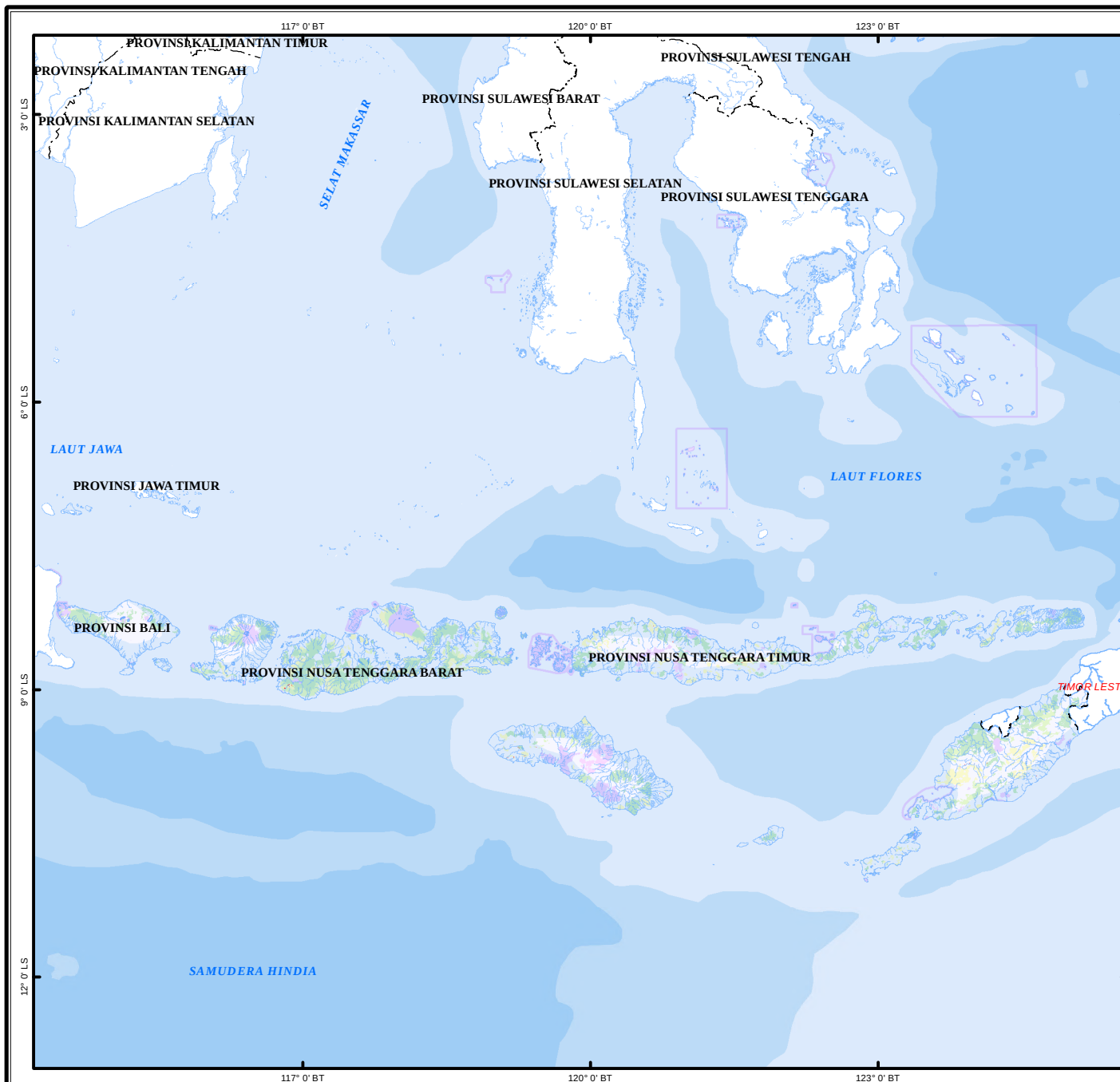
TAHUN 2024

TABEL 2.6 ANGKA DEFORESTASI KEP. BALI DAN NUSA TENGGARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEP. BALI DAN NUSA TENGGARA									
	A. Hutan Primer	18,2	199,3	27,8	234,8	480,2	1,8	482,0	144,1	626,1
	- Hutan lahan kering primer	18,2	199,3	27,8	234,8	480,2	1,8	482,0	144,1	626,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	14,3	141,5	99,0	299,8	554,6	0,6	555,2	585,4	1.140,6
	- Hutan lahan kering sekunder	10,6	143,4	99,0	299,8	552,8	0,6	553,4	558,2	1.111,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	3,7	1,9	-	-	1,8	-	1,8	27,2	29,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	25,3	25,3	-	25,3	- 273,3	- 248,0
	TOTAL	32,5	340,9	126,9	559,9	1.060,1	2,3	1.062,5	456,2	1.518,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA

Skala 1: 7.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

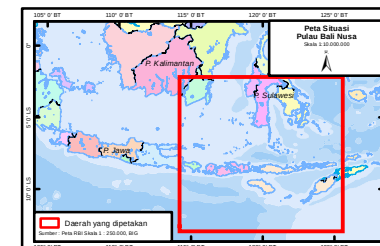
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN

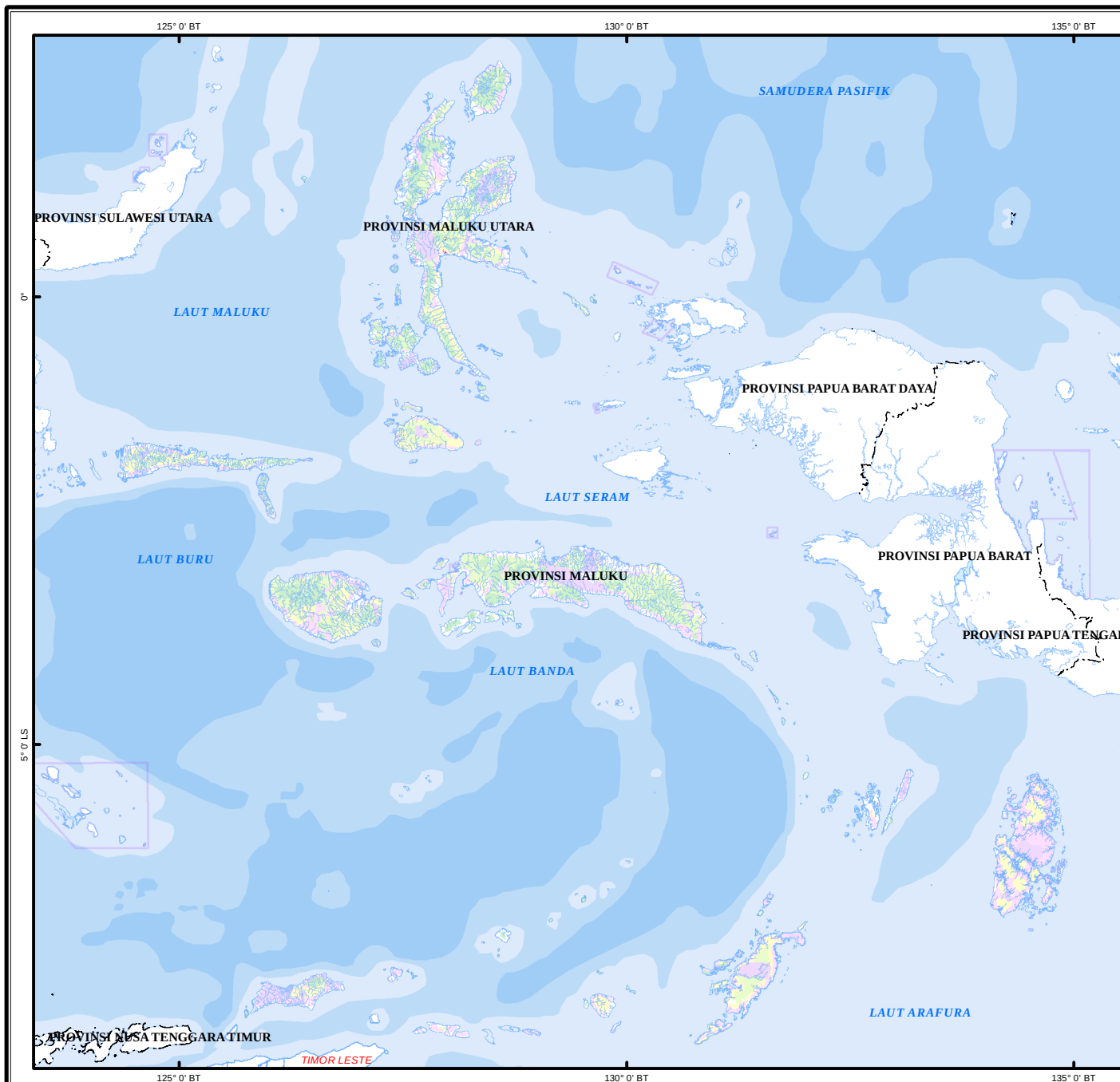
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 2.7 ANGKA DEFORESTASI KEPULAUAN MALUKU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEPULAUAN MALUKU									
	A. Hutan Primer	-	50,5	78,2	2,5	131,1	18,3	149,4	3,2	152,6
	- Hutan lahan kering primer	-	50,2	64,1	2,5	116,8	8,8	125,6	-	125,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	0,4	14,0	-	14,4	9,4	23,8	3,2	27,0
	B. Hutan Sekunder	7,8	92,4	472,6	748,8	1.321,6	715,6	2.037,2	477,2	2.514,4
	- Hutan lahan kering sekunder	7,8	92,4	472,6	748,8	1.321,6	697,2	2.018,8	472,6	2.491,4
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	18,4	18,4	4,6	23,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	7,8	142,9	550,7	751,2	1.452,7	733,9	2.186,6	480,4	2.667,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

KEPULAUAN MALUKU

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Batas Provinsi
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

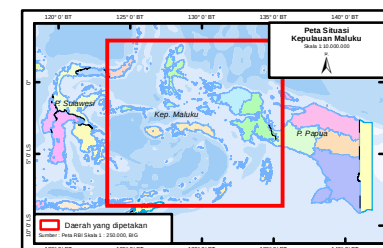
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

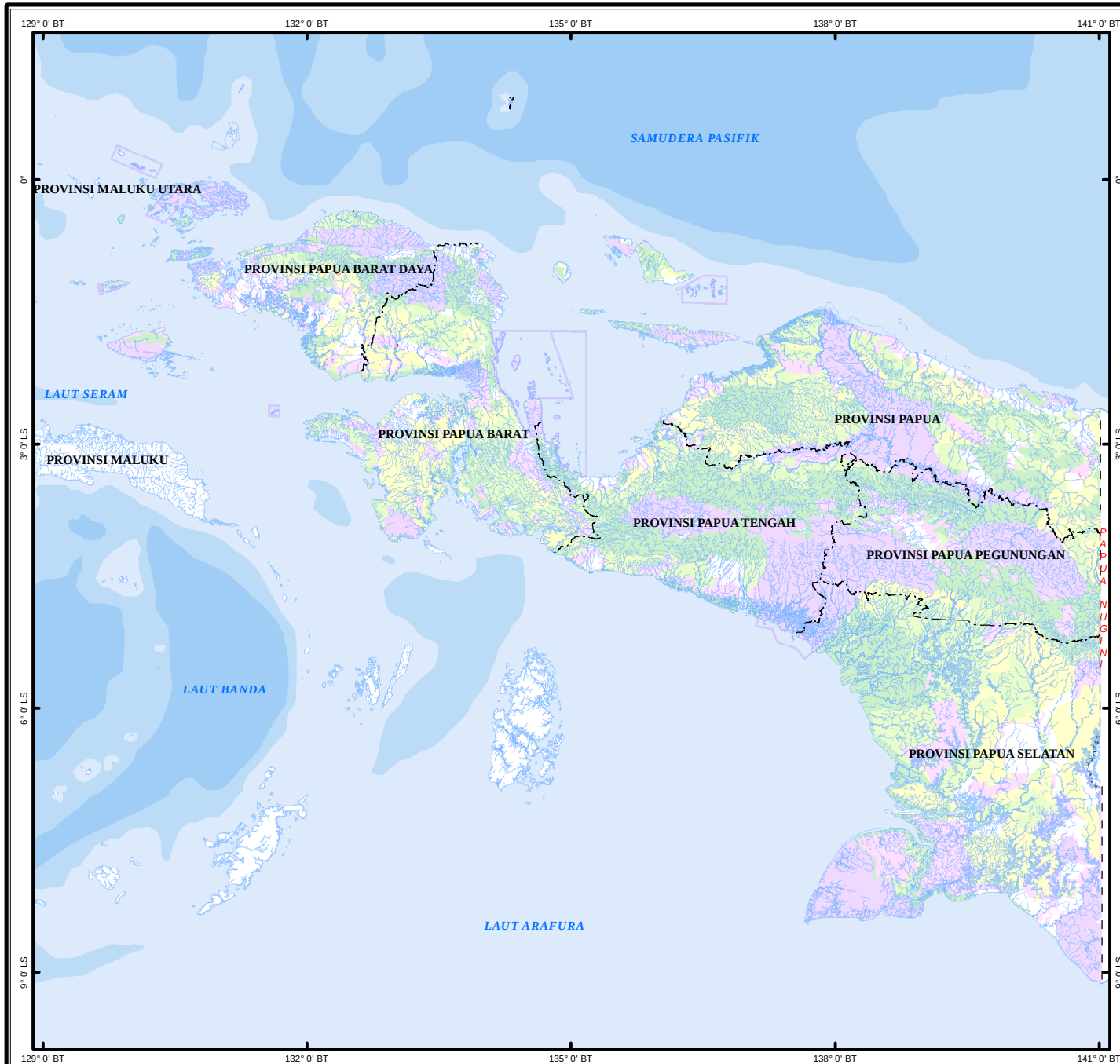
TAHUN 2024

TABEL 2.8 ANGKA DEFORESTASI PULAU PAPUA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA KELOMPOK HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PULAU PAPUA									
	A. Hutan Primer	97,6	523,5	433,4	847,4	1.901,9	192,3	2.094,2	82,2	2.176,5
	- Hutan lahan kering primer	86,3	495,5	430,2	733,4	1.745,3	187,9	1.933,2	71,5	2.004,7
	- Hutan rawa primer	-	13,8	3,2	112,5	129,4	4,4	133,9	2,9	136,8
	- Hutan mangrove primer	11,3	14,3	-	1,6	27,1	0,0	27,1	7,9	35,0
	B. Hutan Sekunder	135,0	104,5	125,2	141,0	505,7	401,7	907,3	1.905,7	2.813,1
	- Hutan lahan kering sekunder	135,0	93,7	108,9	55,1	392,7	374,4	767,0	1.864,4	2.631,4
	- Hutan rawa sekunder	-	10,9	16,2	57,0	84,1	22,9	107,0	41,3	148,4
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	28,9	28,9	4,4	33,3	-	33,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	232,5	628,1	558,6	988,4	2.407,6	594,0	3.001,6	1.988,0	4.989,5

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PULAU PAPUA

Skala 1: 7.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

--- Batas Negara

--- Batas Provinsi

Sungai

Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

Pengurangan Hutan

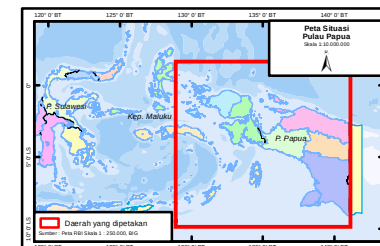
Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

**LAMPIRAN 3
DEFORESTASI INDONESIA
DAN DEFORESTASI PER
PROVINSI
DI DALAM DAN DI LUAR
KAWASAN HUTAN
TAHUN 2023**



TABEL 3.1 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI ACEH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ACEH									
	A. Hutan Primer	281,7	326,0	8,7	287,7	904,1	-	904,1	439,3	1.343,4
	- Hutan lahan kering primer	14,8	326,0	8,7	287,7	637,3	-	637,3	390,8	1.028,1
	- Hutan rawa primer	266,8	-	-	-	266,8	-	266,8	48,5	315,3
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	419,8	815,3	189,2	937,4	2.361,7	4,5	2.366,2	2.881,6	5.247,8
	- Hutan lahan kering sekunder	104,8	762,8	189,2	911,4	1.968,2	4,5	1.972,7	1.795,7	3.768,4
	- Hutan rawa sekunder	314,9	1,4	-	-	316,3	-	316,3	1.004,8	1.321,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	51,2	-	26,0	77,2	-	77,2	81,0	158,2
	C. Hutan Tanaman*	9,7	14,0	11,0	122,8	157,5	-	157,5	32,2	189,7
	TOTAL	711,1	1.155,3	208,9	1.348,0	3.423,3	4,5	3.427,8	3.353,1	6.780,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

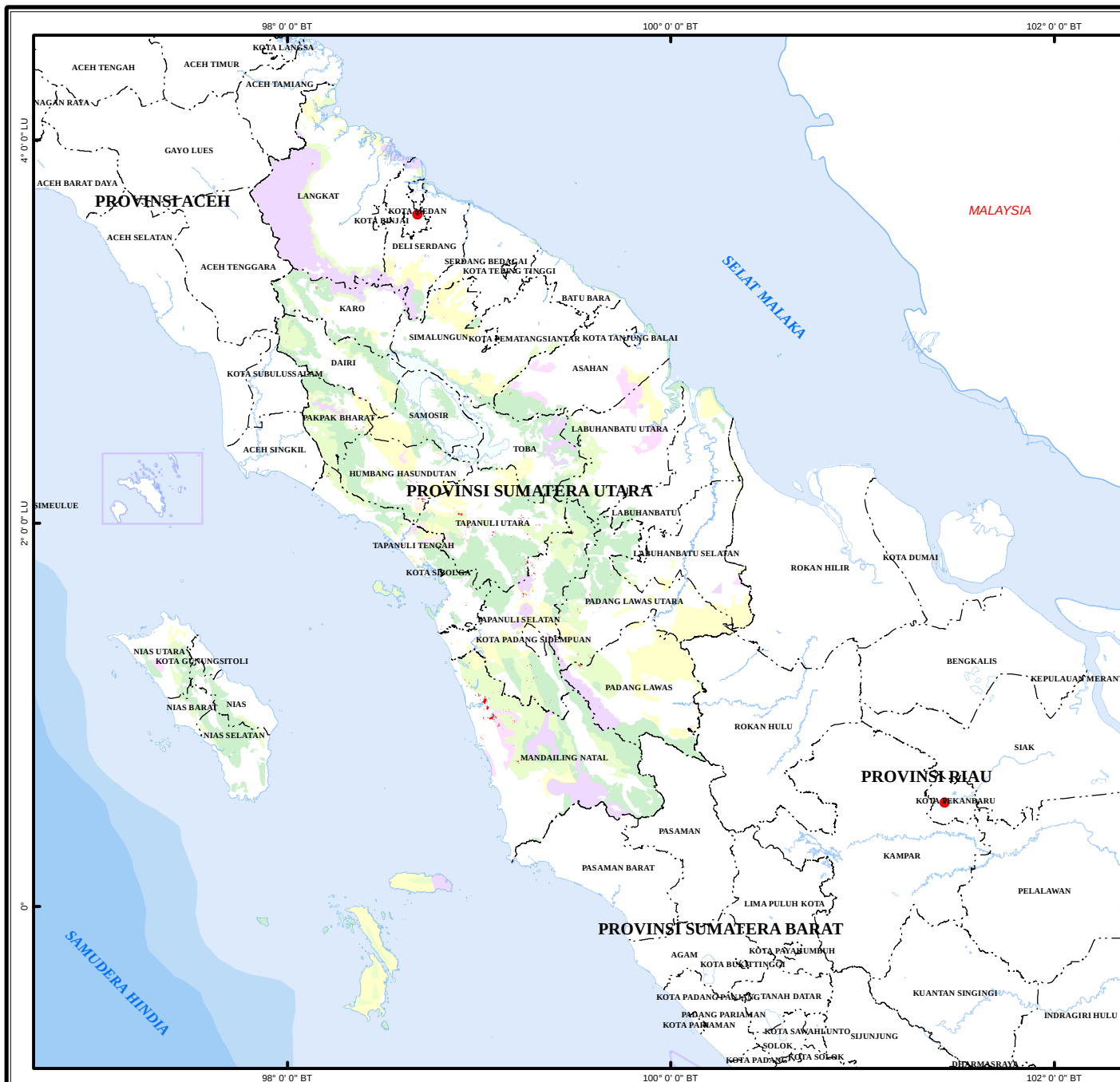
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

TABEL 3.2 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SUMATERA UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	SUMATERA UTARA									
	A. Hutan Primer	53,7	230,4	199,6	29,5	513,3	1,2	514,5	329,1	843,6
	- Hutan lahan kering primer	53,7	230,4	199,6	29,5	513,3	1,2	514,5	329,1	843,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	49,5	593,4	966,8	177,8	1.787,4	202,4	1.989,8	3.611,1	5.600,9
	- Hutan lahan kering sekunder	49,5	508,2	958,3	155,4	1.671,4	202,4	1.873,8	3.342,2	5.216,0
	- Hutan rawa sekunder	-	32,0	8,4	22,3	62,8	-	62,8	224,0	286,8
	- Hutan mangrove sekunder	-	53,2	-	-	53,2	-	53,2	44,9	98,1
	C. Hutan Tanaman*	-	9,5	-	-	9,5	-	9,5	40,3	49,7
	TOTAL	103,2	814,4	1.166,4	207,3	2.291,2	203,7	2.494,9	3.899,9	6.394,8

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

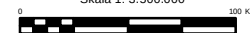
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SUMATERA UTARA

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

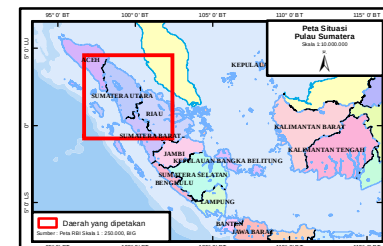
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.3 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI RIAU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	RIAU									
	A. Hutan Primer	128,8	27,3	1.395,9	-	1.552,0	4,4	1.556,4	119,4	1.675,8
	- Hutan lahan kering primer	128,8	27,3	1.395,9	-	1.552,0	4,4	1.556,4	119,4	1.675,8
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	2.449,2	1.053,9	4.401,3	3.004,2	10.908,7	700,4	11.609,0	2.457,5	14.066,5
	- Hutan lahan kering sekunder	2.272,8	971,3	2.351,2	306,7	5.902,0	130,5	6.032,5	653,7	6.686,2
	- Hutan rawa sekunder	176,4	13,2	1.492,9	2.690,7	4.373,2	491,8	4.864,9	1.521,5	6.386,4
	- Hutan mangrove sekunder	-	69,4	557,2	6,8	633,5	78,1	711,6	282,3	993,9
	C. Hutan Tanaman*	-	-	520,8	1.606,5	2.127,3	1,0	2.128,3	618,5	2.746,7
	TOTAL	2.578,0	1.081,2	5.276,4	1.397,7	10.333,4	703,8	11.037,2	1.958,4	12.995,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

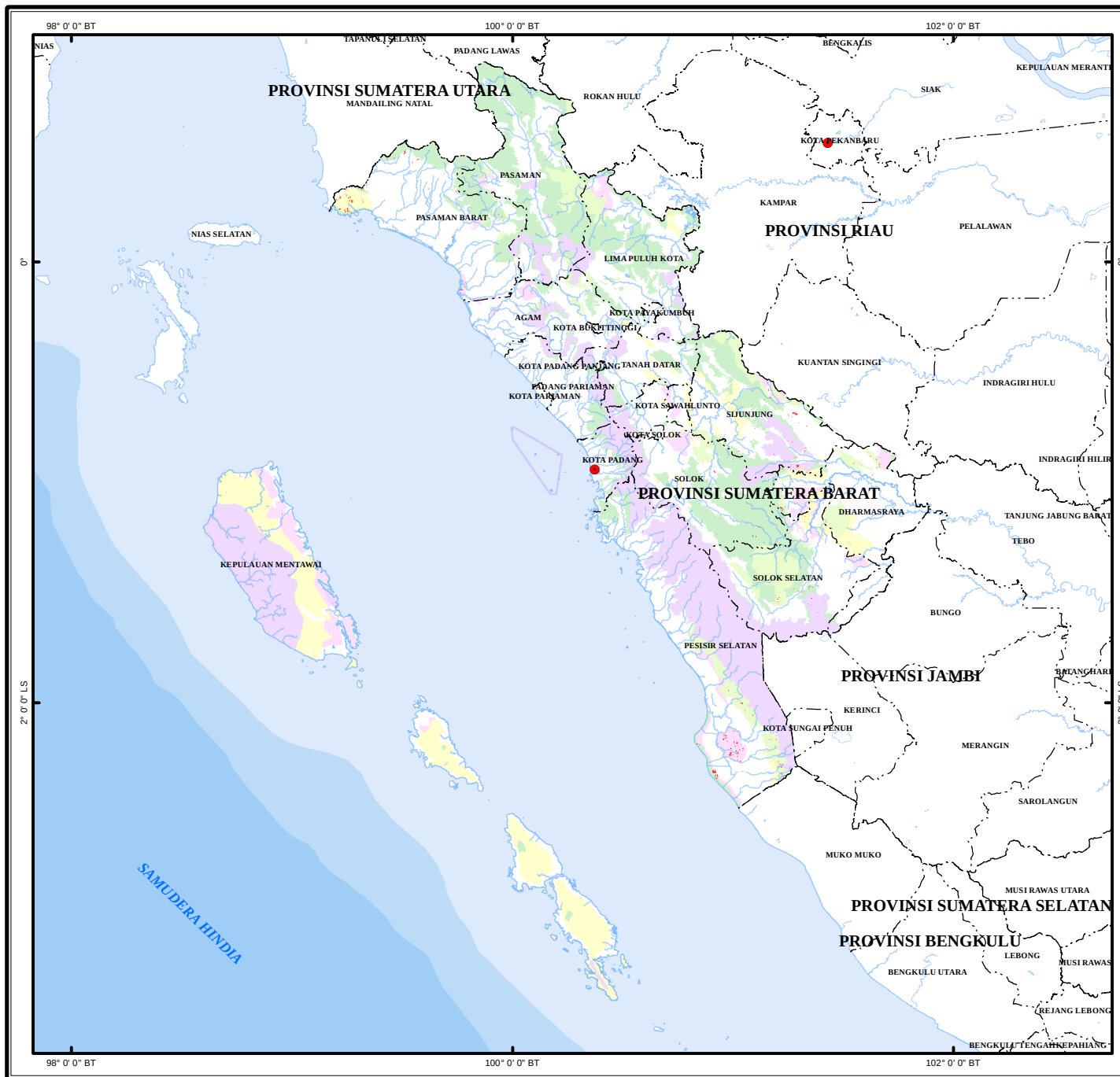
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

TABEL 3.4 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SUMATERA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	SUMATERA BARAT									
	A. Hutan Primer	45,9	104,5	9,0	149,0	308,4	-	308,4	3,9	312,3
	- Hutan lahan kering primer	45,9	104,5	9,0	-	159,4	-	159,4	1,6	161,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	149,0	149,0	-	149,0	-	149,0
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3
	B. Hutan Sekunder	345,9	774,7	525,3	586,1	2.231,9	1.132,2	3.364,1	846,5	4.210,6
	- Hutan lahan kering sekunder	345,9	640,7	525,3	437,4	1.949,3	240,4	2.189,8	723,2	2.913,0
	- Hutan rawa sekunder	-	125,8	-	148,7	274,5	891,7	1.166,2	106,7	1.272,9
	- Hutan mangrove sekunder	-	8,2	-	-	8,2	-	8,2	16,6	24,7
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	9,3	9,3	-	9,3	-	9,3
	TOTAL	391,8	879,2	534,3	725,8	2.531,0	1.132,2	3.663,2	850,4	4.513,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

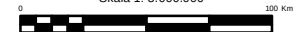
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SUMATERA BARAT

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

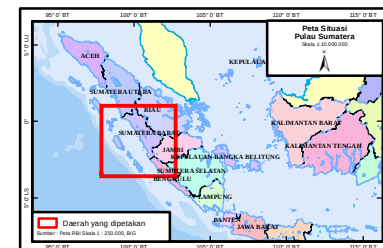
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

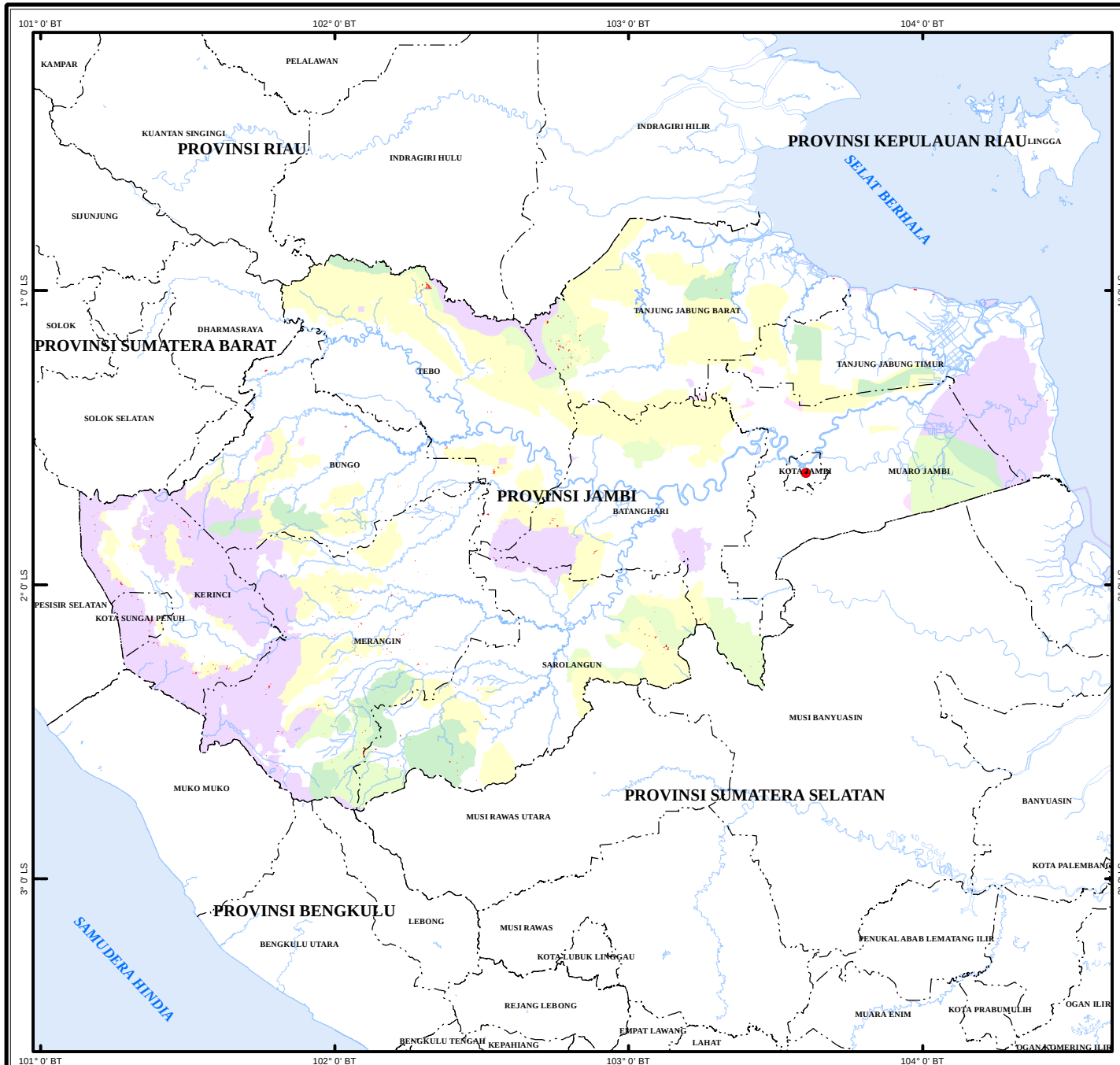
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.5 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAMBI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	12,7	-	-	-	12,7	-	12,7	-	12,7
	- Hutan lahan kering primer	12,7	-	-	-	12,7	-	12,7	-	12,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	693,4	94,4	839,9	826,3	2.454,0	-	2.454,0	1.211,0	3.665,0
	- Hutan lahan kering sekunder	693,4	94,4	834,2	826,3	2.448,3	-	2.448,3	1.164,9	3.613,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	5,7	-	5,7	-	5,7	-	5,7
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	46,1	46,1
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	706,1	94,4	839,9	826,3	2.466,7	0,0	2.466,7	1.211,0	3.677,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

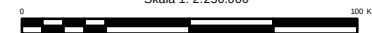
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI JAMBI

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



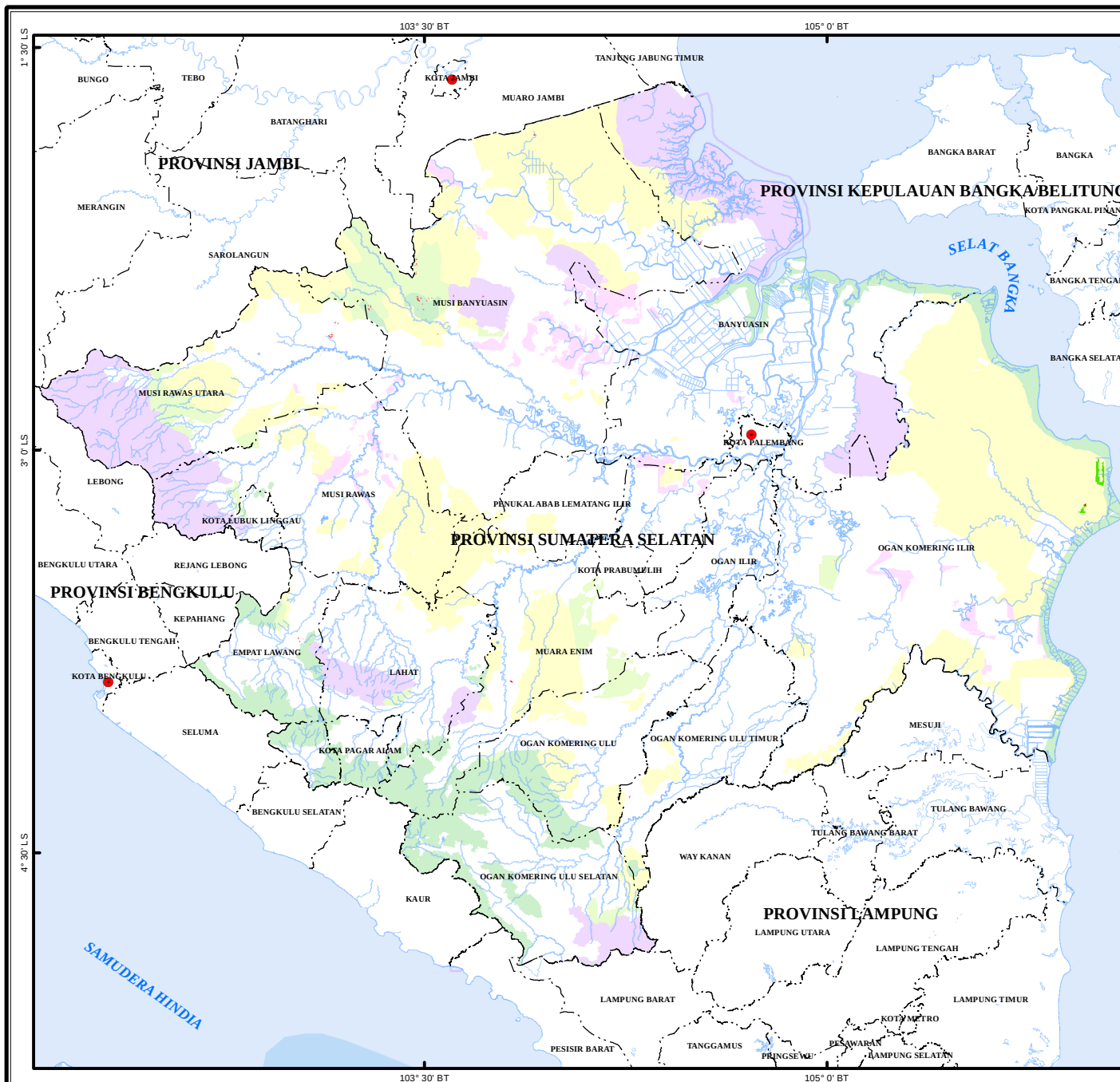
**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

TABEL 3.6 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SUMATERA SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	1,5	1,5	-	1,1	4,1	-	4,1	-	4,1
	- Hutan lahan kering primer	1,5	1,5	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	1,1	1,1	-	1,1	-	1,1
	B. Hutan Sekunder	68,3	260,8	129,9	118,4	577,4	-	577,4	255,1	832,5
	- Hutan lahan kering sekunder	49,5	221,9	121,5	18,7	411,6	-	411,6	213,8	625,4
	- Hutan rawa sekunder	5,6	-	8,4	99,7	113,8	-	113,8	2,0	115,8
	- Hutan mangrove sekunder	13,1	38,9	-	-	52,0	-	52,0	39,3	91,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	2.451,3	2.451,3	-	2.451,3	57,3	2.394,0
	TOTAL	69,7	262,3	129,9	-2.331,8	-1.869,8	0,0	-1.869,8	312,5	-1.557,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

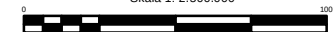
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

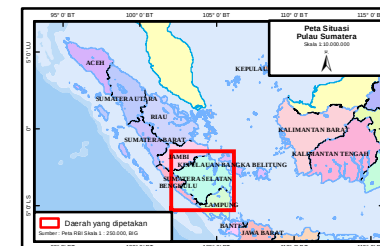
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

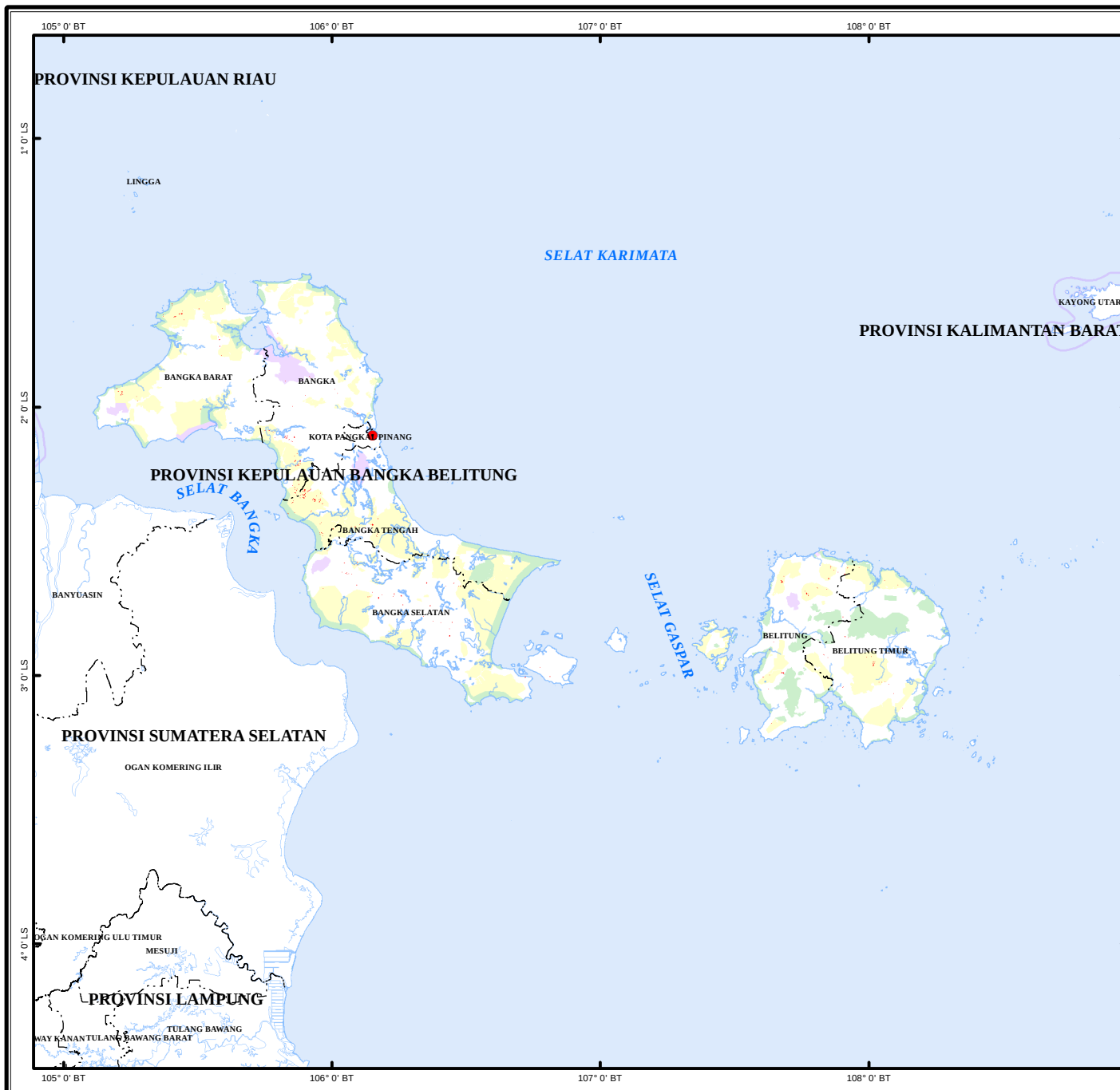
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.7 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9	-	1,9
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9	-	1,9
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	12,5	89,7	-	1.194,8	1.297,0	-	1.297,0	609,2	1.906,3
	- Hutan lahan kering sekunder	12,5	32,3	-	736,5	781,3	-	781,3	384,0	1.165,3
	- Hutan rawa sekunder	-	18,4	-	400,7	419,1	-	419,1	176,4	595,5
	- Hutan mangrove sekunder	-	39,0	-	57,6	96,6	-	96,6	48,9	145,5
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,5	89,7	0,0	1.196,7	1.299,0	0,0	1.299,0	609,2	1.908,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

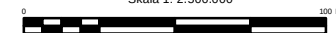
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

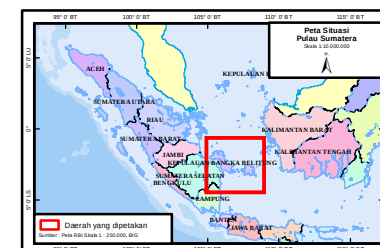
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



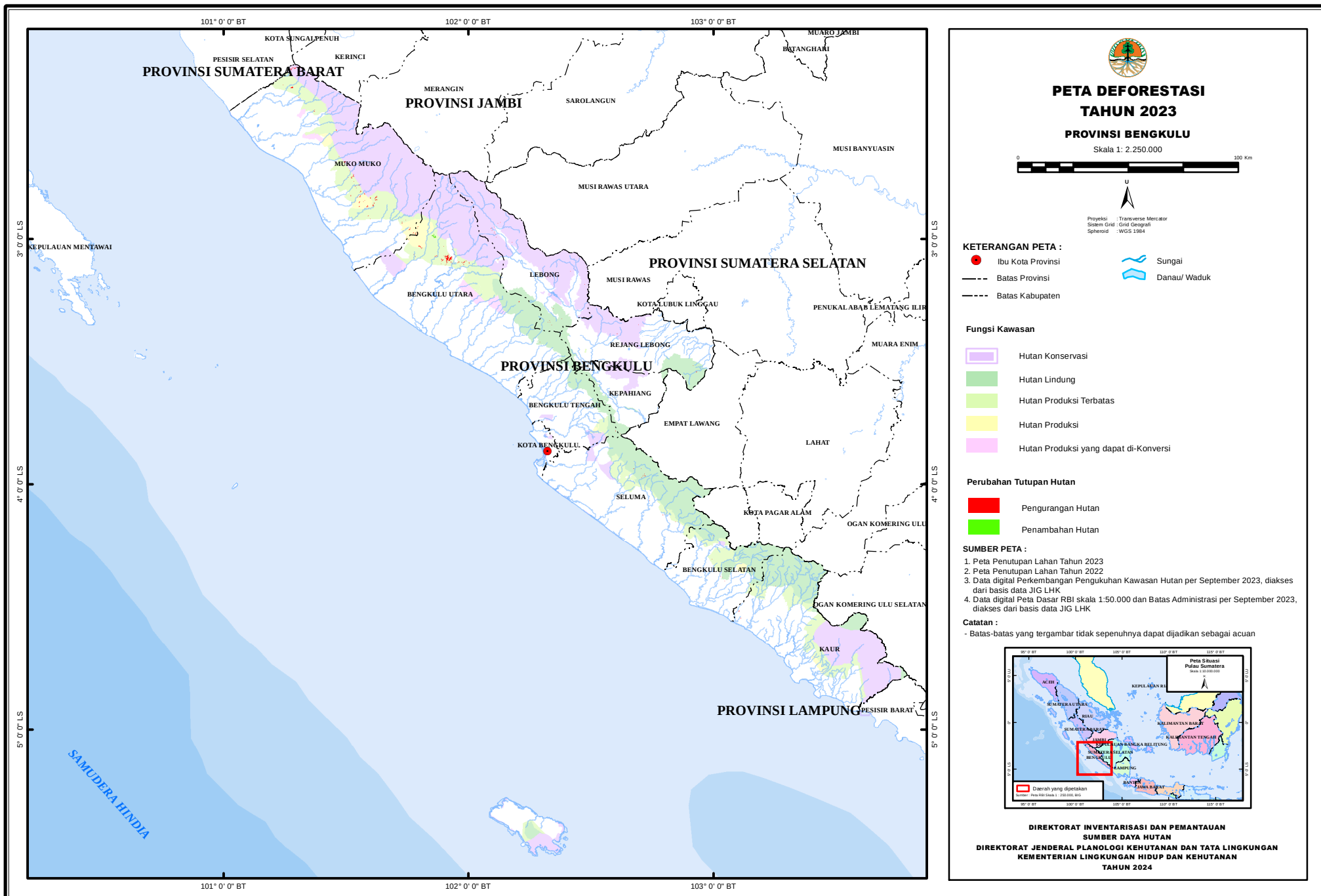
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.8 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI BENGKULU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	158,4	25,6	33,4	-	217,3	-	217,3	-	217,3
	- Hutan lahan kering primer	158,4	25,6	33,4	-	217,3	-	217,3	-	217,3
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	88,0	113,7	811,0	332,4	1.345,1	-	1.345,1	95,2	1.440,3
	- Hutan lahan kering sekunder	88,0	113,7	811,0	332,4	1.345,1	-	1.345,1	95,2	1.440,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	246,4	139,2	844,4	332,4	1.562,4	0,0	1.562,4	95,2	1.657,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

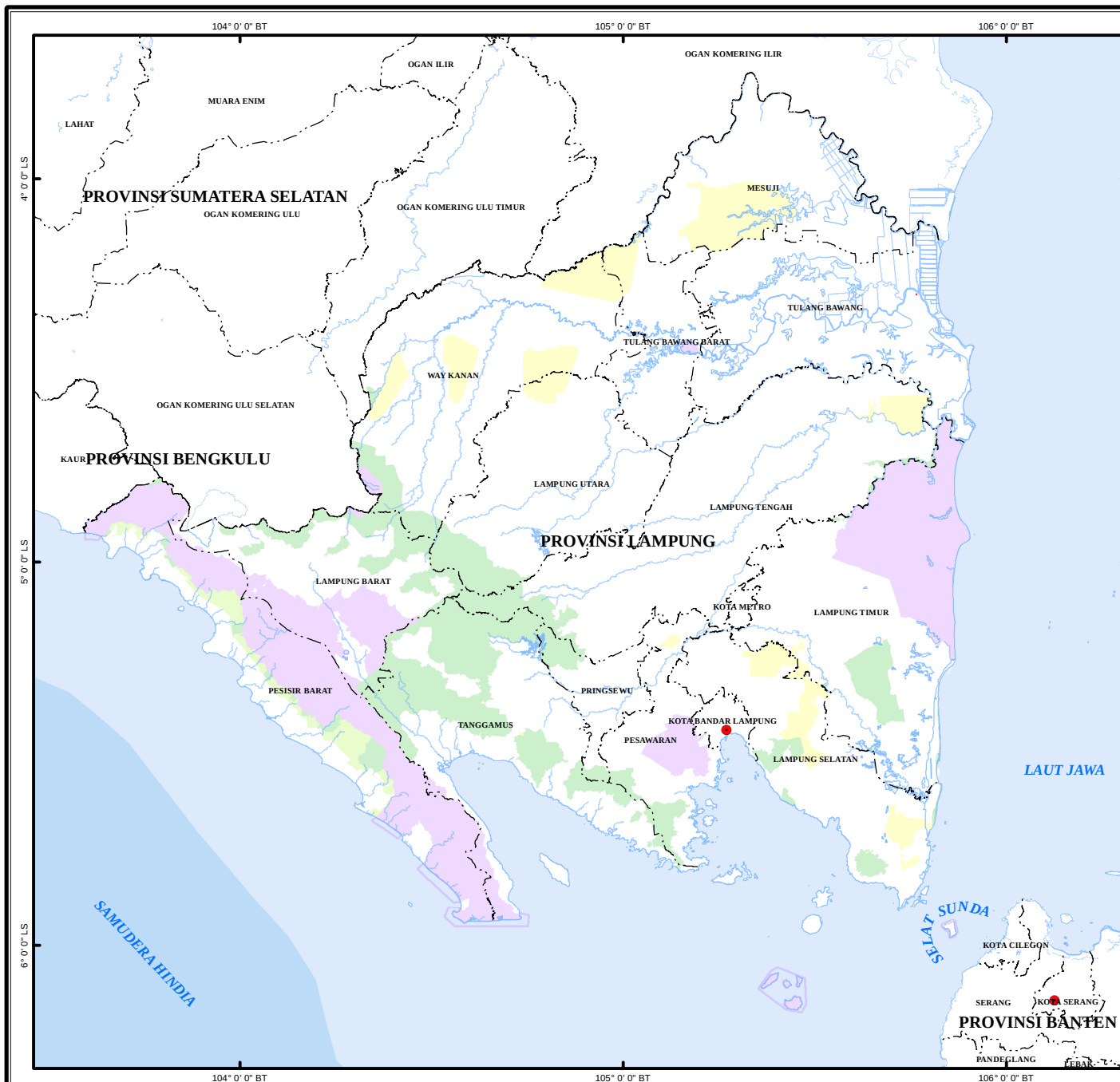


TABEL 3.9 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI LAMPUNG DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	2,1	-	-	-	2,1	-	2,1	16,6	18,7
	- Hutan lahan kering sekunder	2,1	-	-	-	2,1	-	2,1	1,4	3,5
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,2
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1	16,6	18,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI LAMPUNG

Skala 1: 1.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

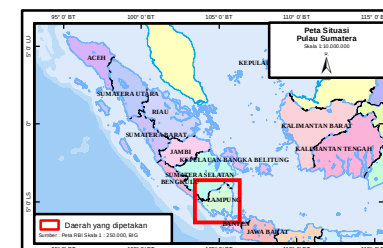
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.10 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	8,5	134,3	24,4	167,3	27,2	194,5	292,8	487,3
	- Hutan lahan kering sekunder	-	5,7	52,1	20,8	78,6	25,4	104,0	238,2	342,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	46,1	-	46,1	-	46,1	1,8	47,9
	- Hutan mangrove sekunder	-	2,8	36,1	3,6	42,6	1,8	44,4	52,8	97,2
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,0	8,5	134,3	24,4	167,3	27,2	194,5	292,8	487,3

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

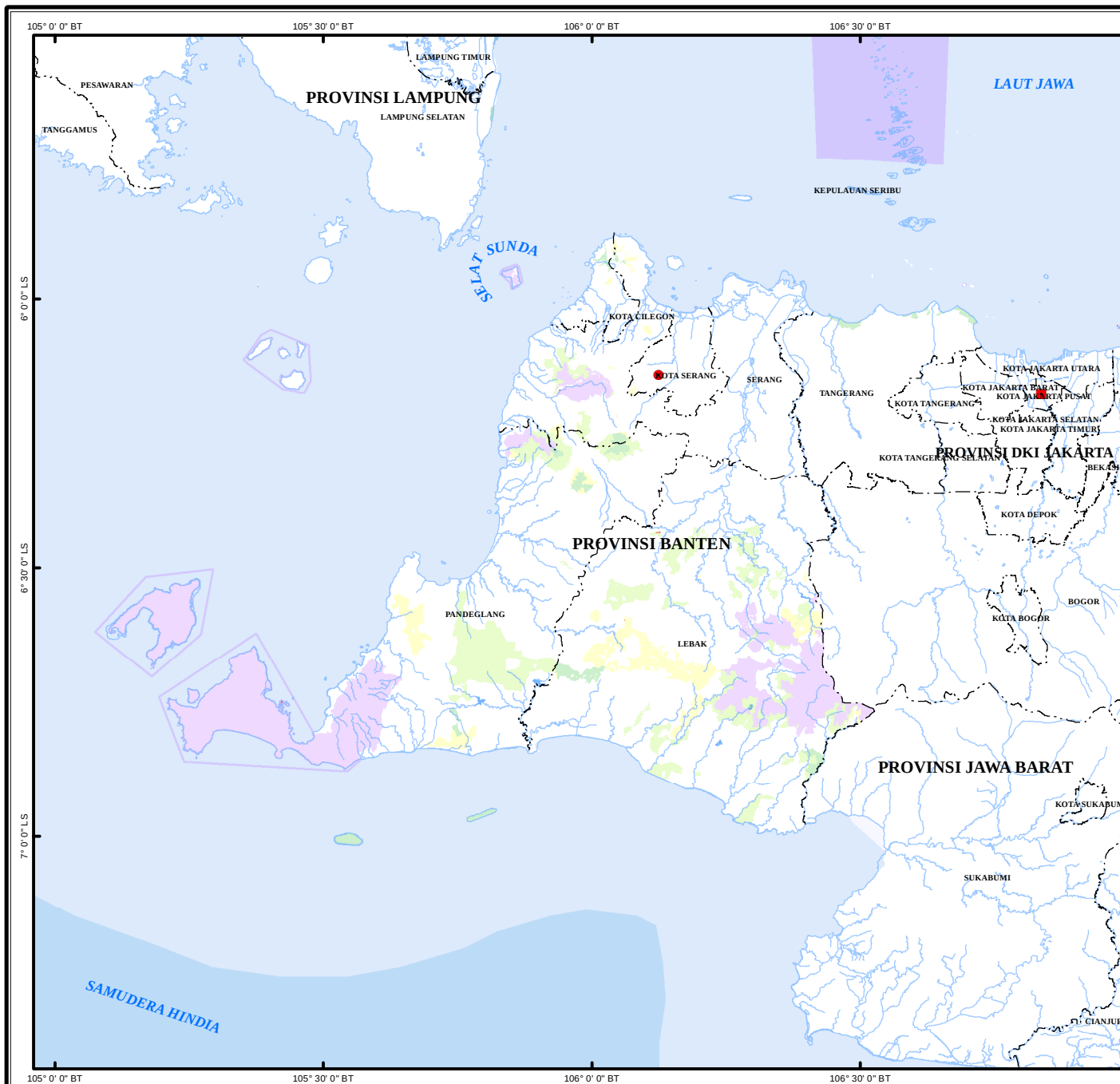
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

TABEL 3.11 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI BANTEN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	BANTEN									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	10,2	-	5,0	-	15,2	-	15,2	6,7	21,9
	- Hutan lahan kering sekunder	6,0	-	5,0	-	10,9	-	10,9	5,4	16,3
	- Hutan rawa sekunder	4,2	-	-	-	4,2	-	4,2	1,3	5,6
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	1,8	1,8	-	1,8	-	1,8
	TOTAL	10,2	0,0	5,0	1,8	16,9	0,0	16,9	6,7	23,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

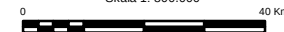
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI BANTEN

Skala 1: 800.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Negara
- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

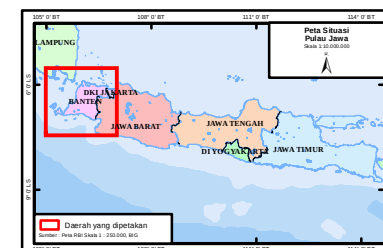
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

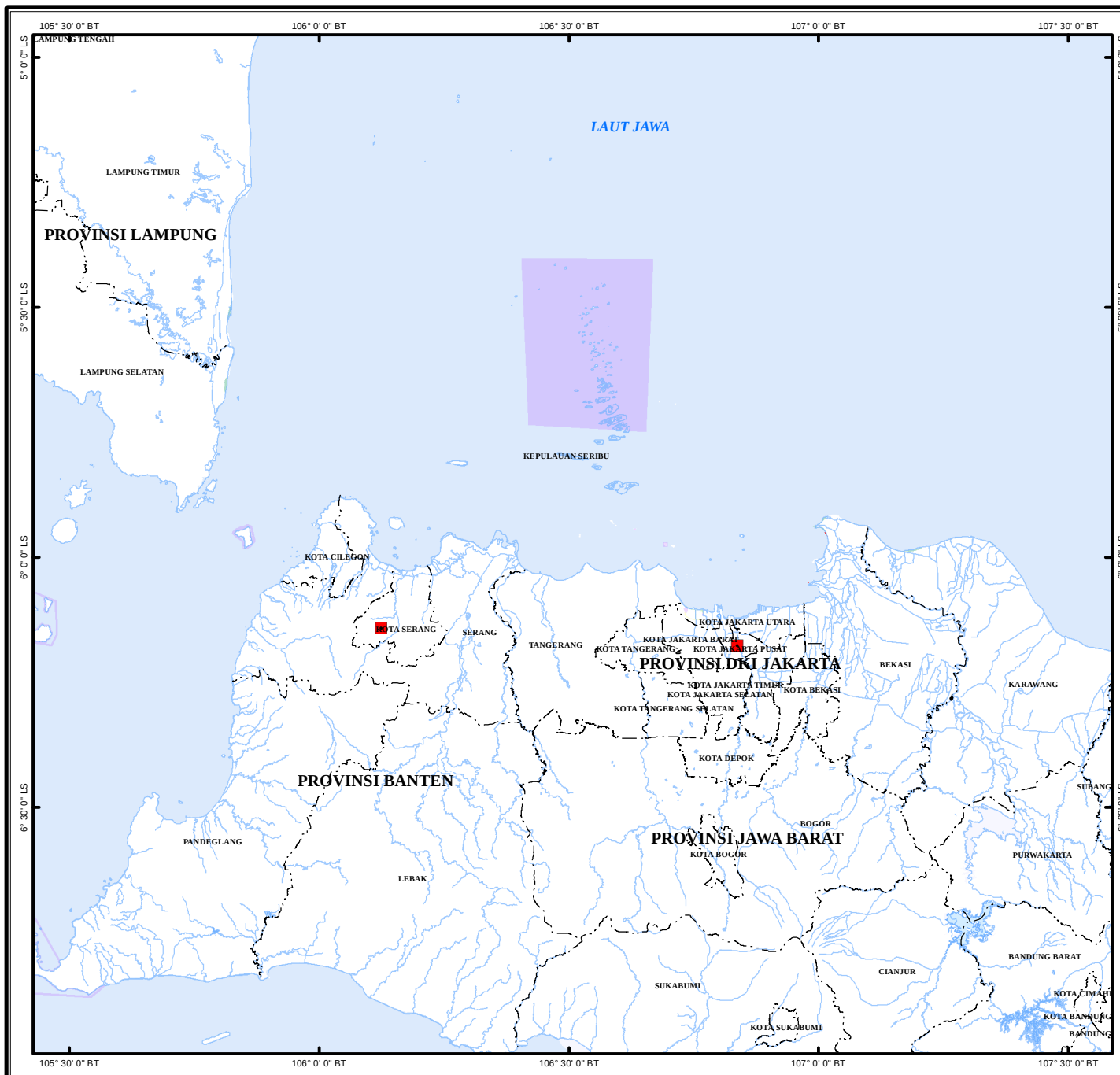
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.12 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI DKI JAKARTA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

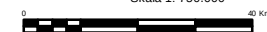
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI DKI JAKARTA

Skala 1: 750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Negara
- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.13 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAWA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	JAWA BARAT									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	19,4	-	0,5	19,9	-	19,9	9,5	29,4
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,4	-	0,5	19,9	-	19,9	9,5	29,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	0,0	19,4	0,0	0,5	19,9	0,0	19,9	9,5	29,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

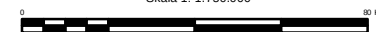
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI JAWA BARAT

Skala 1: 1.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Negara
- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

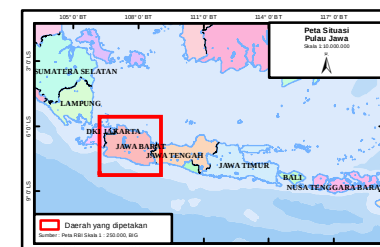
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.14 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAWA TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	41,3	41,3	-	41,3	29,4	70,7
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	41,3	41,3	-	41,3	29,4	70,7
	C. Hutan Tanaman*	-	-	7,7	86,0	93,8	-	93,8	125,5	219,3
	TOTAL	0,0	0,0	7,7	127,3	135,1	0,0	135,1	155,0	290,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI JAWA TENGAH

Skala 1: 2.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

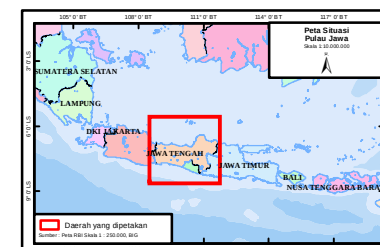
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



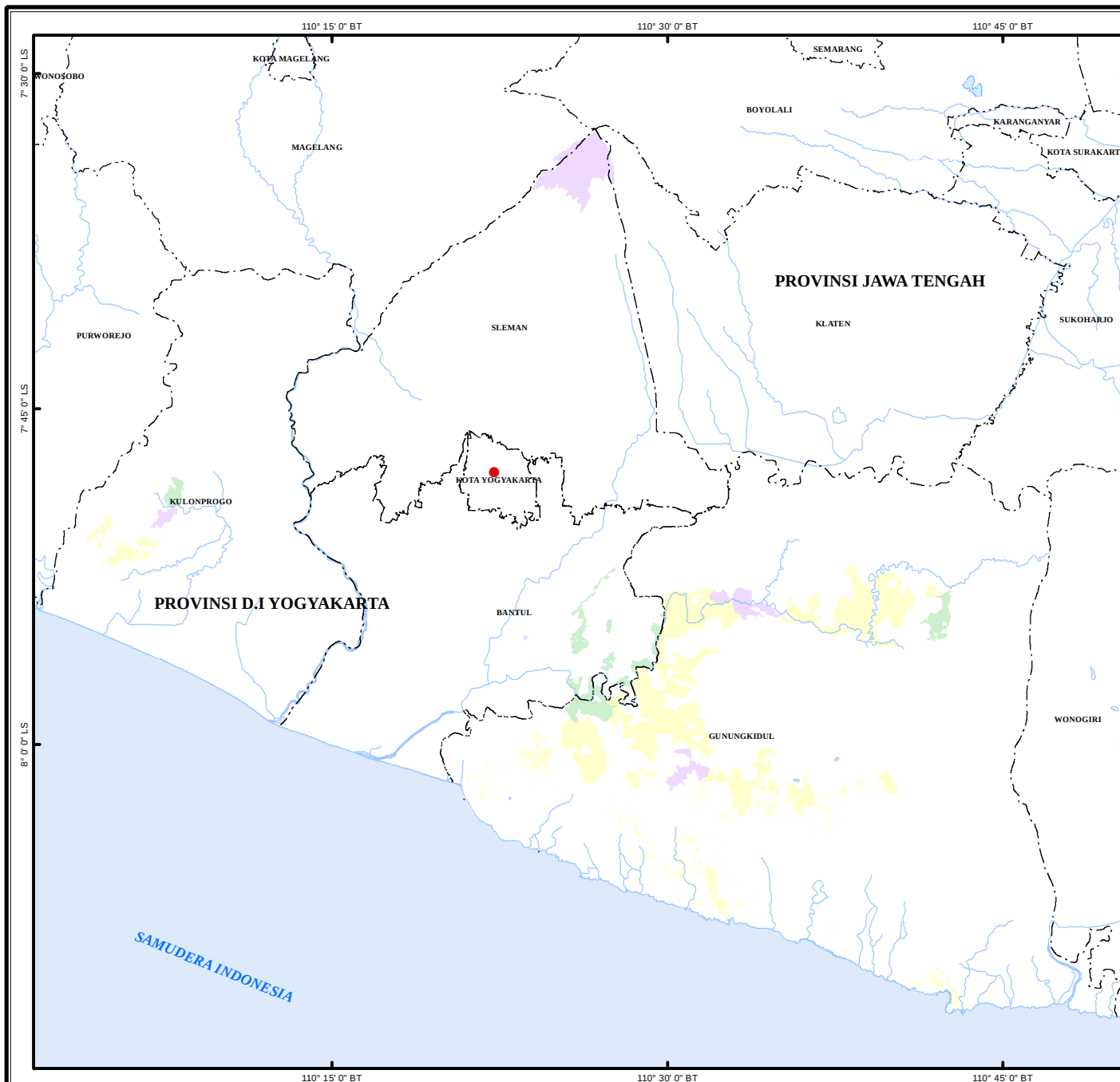
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.15 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



**PETA DEFORESTASI
TAHUN 2023**
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Skala 1: 500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

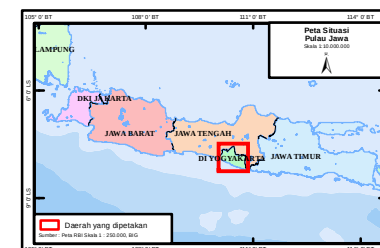
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024**

TABEL 3.16 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI JAWA TIMUR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	12,7	5,0	-	83,5	101,1	-	101,1	125,9	227,0
	- Hutan lahan kering sekunder	12,7	5,0	-	83,5	101,1	-	101,1	8,2	109,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	117,7	117,7
	C. Hutan Tanaman*	-	23,6	-	413,6	437,3	-	437,3	41,4	478,7
	TOTAL	12,7	28,6	-	497,1	538,4	-	538,4	167,3	705,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI JAWA TIMUR

Skala 1: 3.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

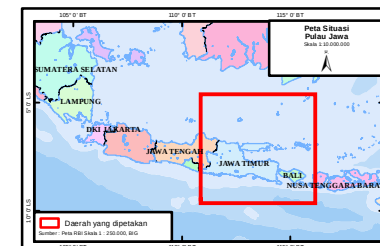
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



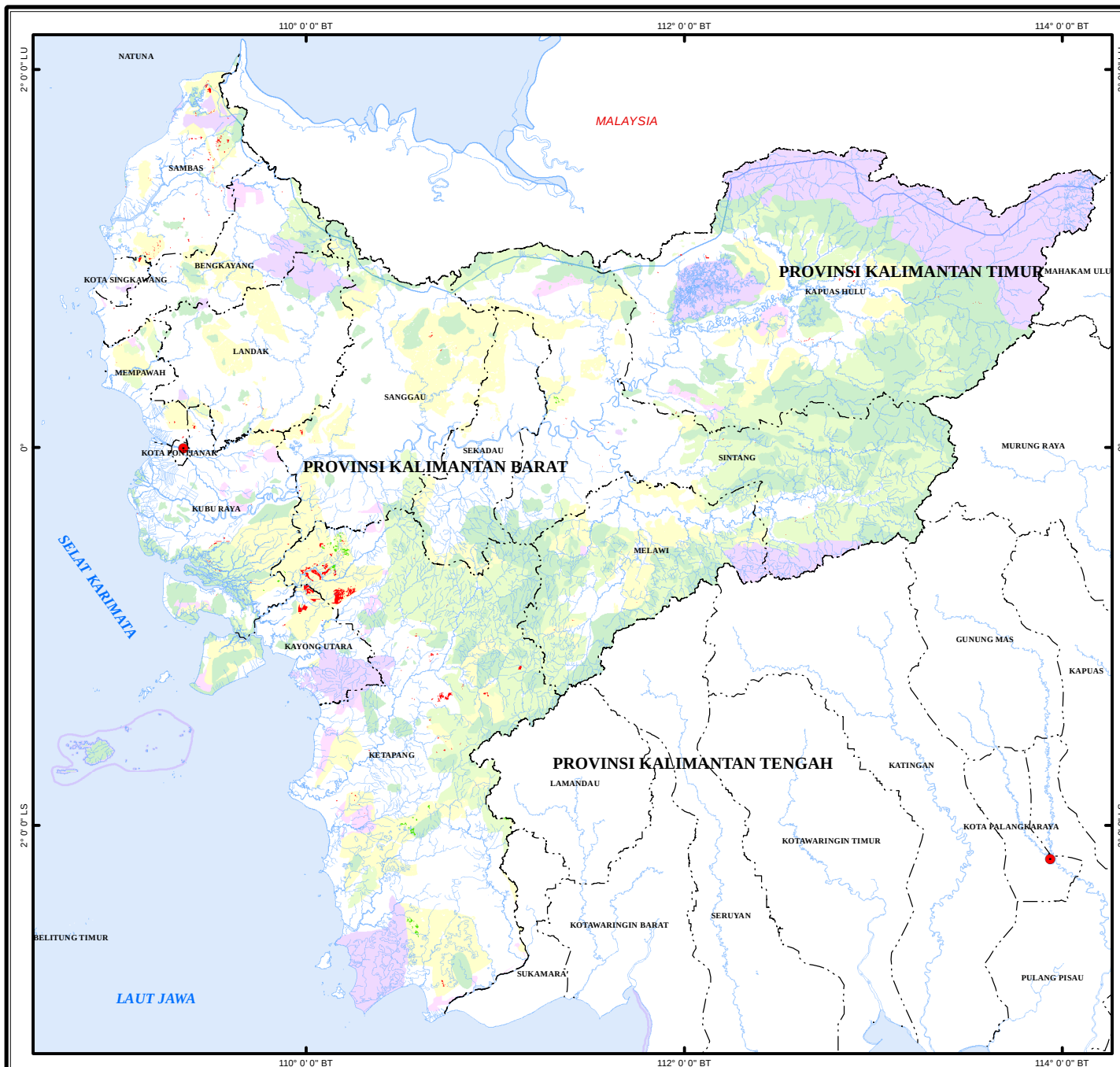
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.17 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	49,7	- 178,6	1.588,5	15.850,6	17.310,3	63,0	17.373,3	5.309,6	22.682,8
	- Hutan lahan kering sekunder	34,5	- 288,9	1.295,1	1.602,4	2.643,1	7,3	2.650,4	1.853,0	4.503,4
	- Hutan rawa sekunder	15,2	43,8	125,1	14.213,5	14.397,5	55,7	14.453,3	3.306,4	17.759,7
	- Hutan mangrove sekunder	-	66,6	168,3	34,7	269,6	-	269,6	150,1	419,7
	C. Hutan Tanaman*	-	- - 3,2	- 4.685,5	- 4.688,7	-	- 4.688,7	- 12,6	- 4.701,3	
	TOTAL	49,7	- 178,6	1.585,3	11.165,1	12.621,5	63,0	12.684,5	5.297,0	17.981,5

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

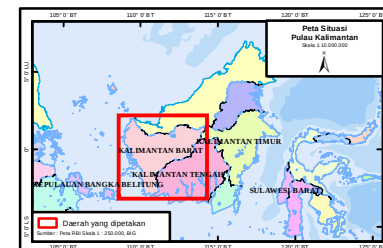
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

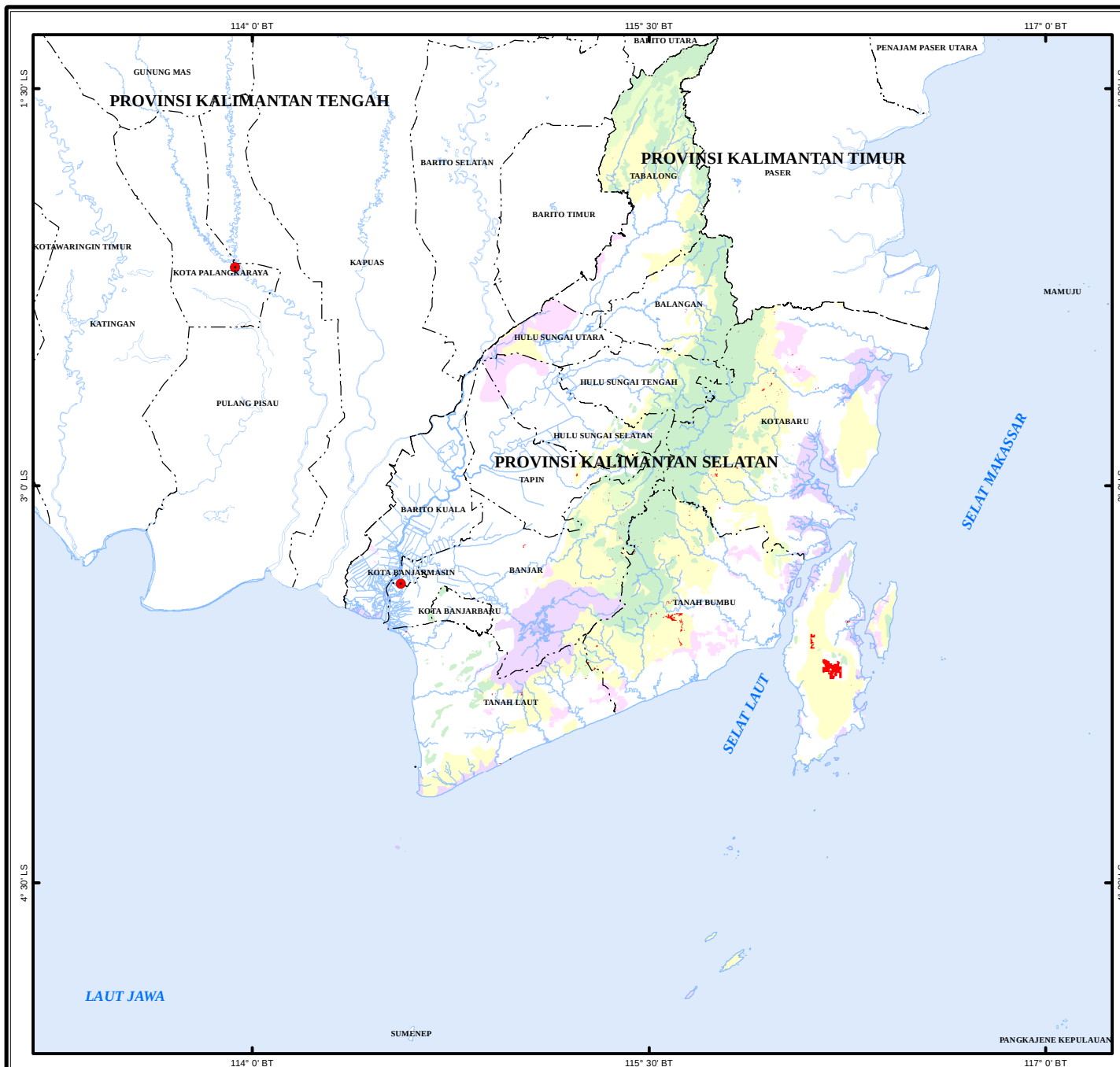
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.18 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	9,4	-	2,1	11,5	-	11,5	-	11,5
	- Hutan lahan kering primer	-	1,6	-	1,5	3,1	-	3,1	-	3,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	7,8	-	0,6	8,4	-	8,4	-	8,4
	B. Hutan Sekunder	69,2	385,3	423,6	1.579,3	2.457,4	58,6	2.516,0	4.482,4	6.998,4
	- Hutan lahan kering sekunder	28,7	385,3	423,6	1.579,3	2.416,9	49,2	2.466,1	4.285,1	6.751,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	40,5	-	-	-	40,5	9,4	49,9	197,3	247,2
	C. Hutan Tanaman*	-	-	4,2	1.055,1	1.059,3	-	1.059,3	197,7	1.257,0
	TOTAL	69,2	394,7	427,8	2.636,5	3.528,2	58,6	3.586,8	4.680,1	8.266,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

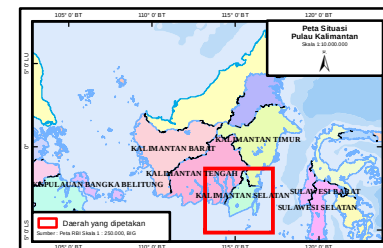
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

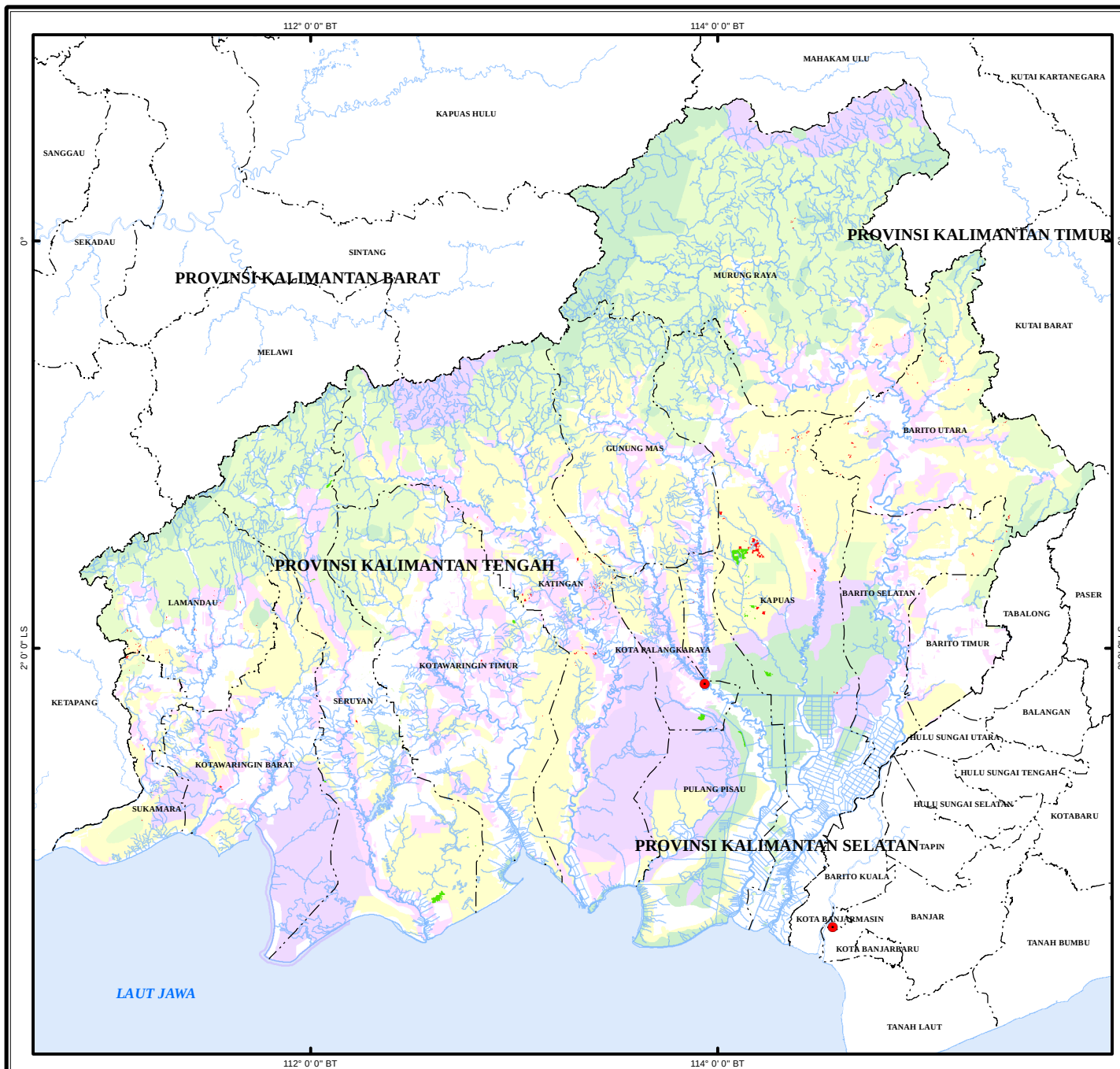
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.19 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	4,2	29,2	-	33,4	-	33,4	-	33,4
	- Hutan lahan kering primer	-	4,2	29,2	-	33,4	-	33,4	-	33,4
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	- 1.129,0	- 1.240,9	238,2	4.407,2	2.275,4	1.005,1	3.280,5	706,2	3.986,7
	- Hutan lahan kering sekunder	-	26,8	204,2	5.236,1	5.467,1	203,1	5.670,2	426,1	6.096,3
	- Hutan rawa sekunder	- 1.129,0	- 1.267,8	34,0	- 828,9	- 3.191,7	802,0	- 2.389,7	267,3	- 2.122,4
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	- 4.751,8	- 4.751,8	-	- 4.751,8	19,9	- 4.732,0
	TOTAL	- 1.129,0	- 1.236,7	267,4	- 344,7	- 2.443,0	1.005,1	- 1.438,0	726,0	- 711,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Skala 1: 3.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

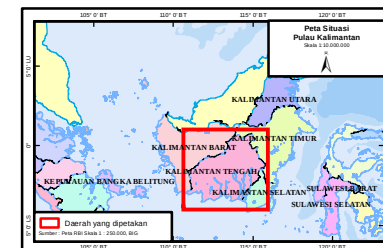
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

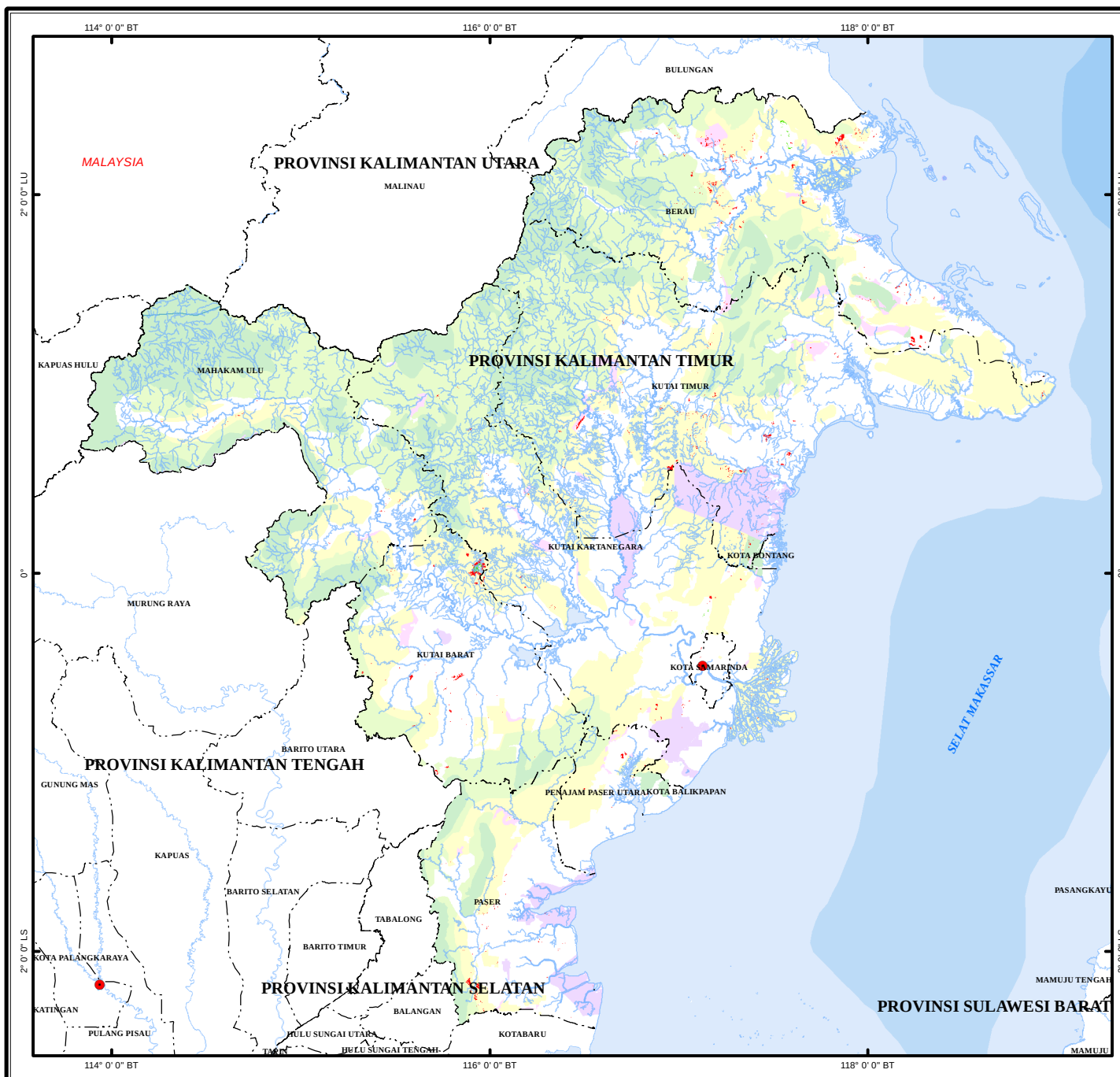
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.20 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	6,4	41,0	147,3	78,0	272,6	3,4	276,0	64,4	340,4
	- Hutan lahan kering primer	-	41,0	147,3	-	188,3	3,4	191,7	17,6	209,3
	- Hutan rawa primer	-	-	-	72,4	72,4	-	72,4	8,5	80,9
	- Hutan mangrove primer	6,4	-	-	5,6	12,0	-	12,0	38,3	50,3
	B. Hutan Sekunder	215,9	272,1	1.405,8	12.870,2	14.764,1	878,7	15.642,7	10.582,6	26.225,3
	- Hutan lahan kering sekunder	98,0	272,1	1.405,8	12.407,3	14.183,3	875,0	15.058,3	10.012,6	25.070,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	50,2	50,2	3,7	53,8	213,6	267,4
	- Hutan mangrove sekunder	117,9	-	-	412,7	530,6	-	530,6	356,4	887,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	289,9	289,9	55,7	234,2	174,7	59,5
	TOTAL	222,3	313,1	1.553,1	12.658,3	14.746,8	937,8	15.684,6	10.821,6	26.506,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

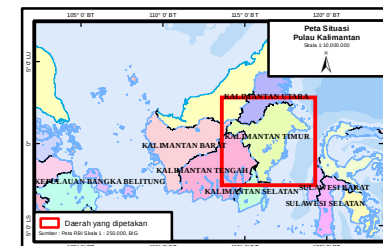
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

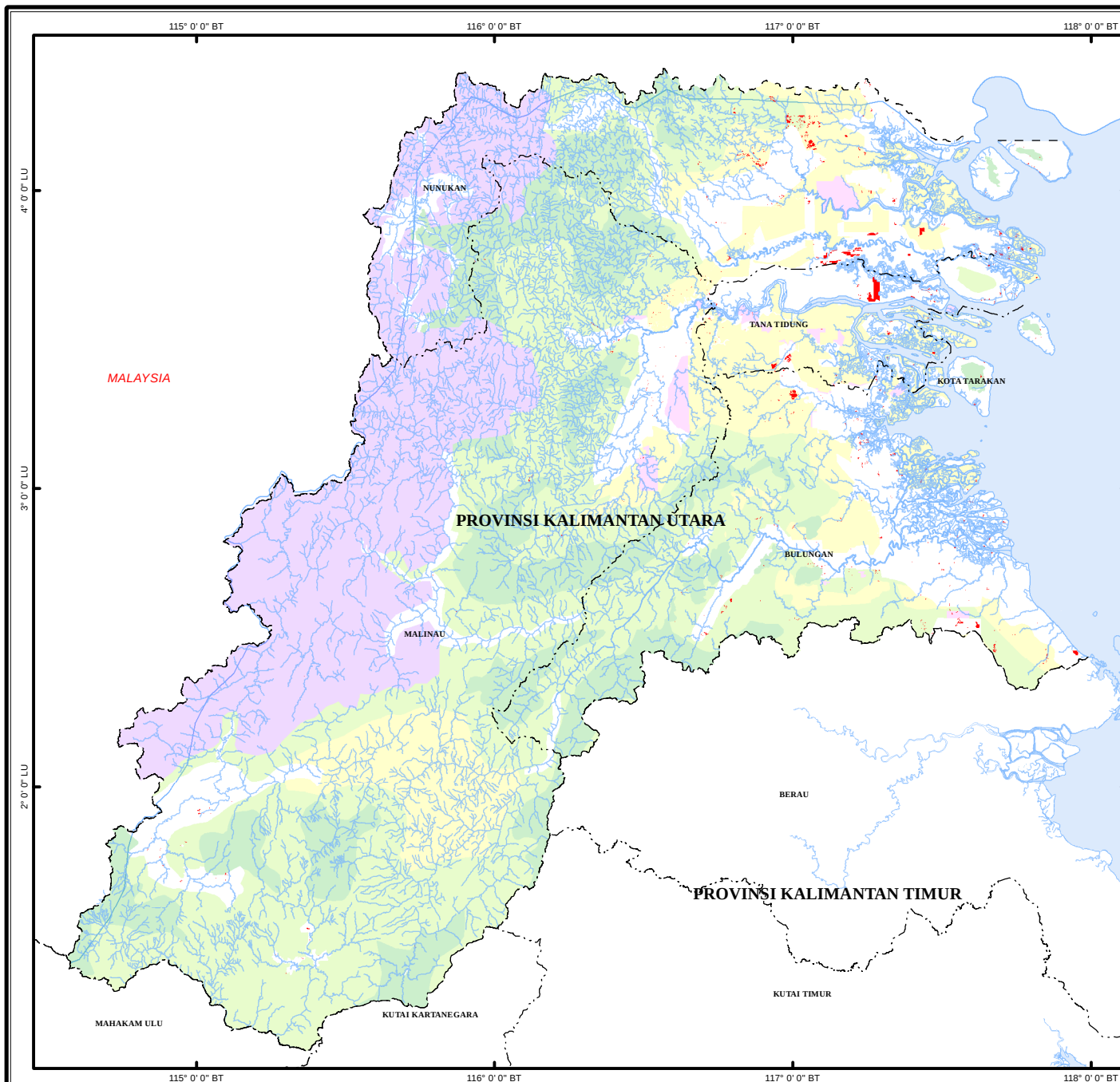
DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.21 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI KALIMANTAN UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	KALIMANTAN UTARA									
	A. Hutan Primer	17,5	80,7	158,8	1,9	258,8	-	258,8	110,8	369,7
	- Hutan lahan kering primer	17,5	80,7	158,8	1,9	258,8	-	258,8	99,8	358,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,9
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,1
	B. Hutan Sekunder	3,7	96,6	1.639,0	4.428,7	6.168,0	82,0	6.250,0	8.895,2	15.145,2
	- Hutan lahan kering sekunder	3,7	96,6	1.639,0	3.040,0	4.779,3	70,7	4.849,9	2.556,4	7.406,4
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	521,9	521,9	11,3	533,2	4.413,9	4.947,1
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	866,9	866,9	-	866,9	1.924,9	2.791,8
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	83,7	83,7	-	83,7	-	83,7
	TOTAL	21,2	177,3	1.797,8	4.514,2	6.510,5	82,0	6.592,5	9.006,1	15.598,5

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

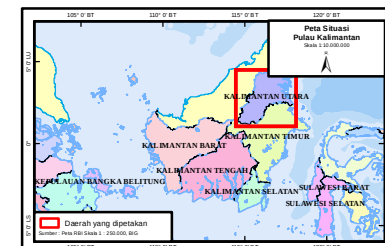
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

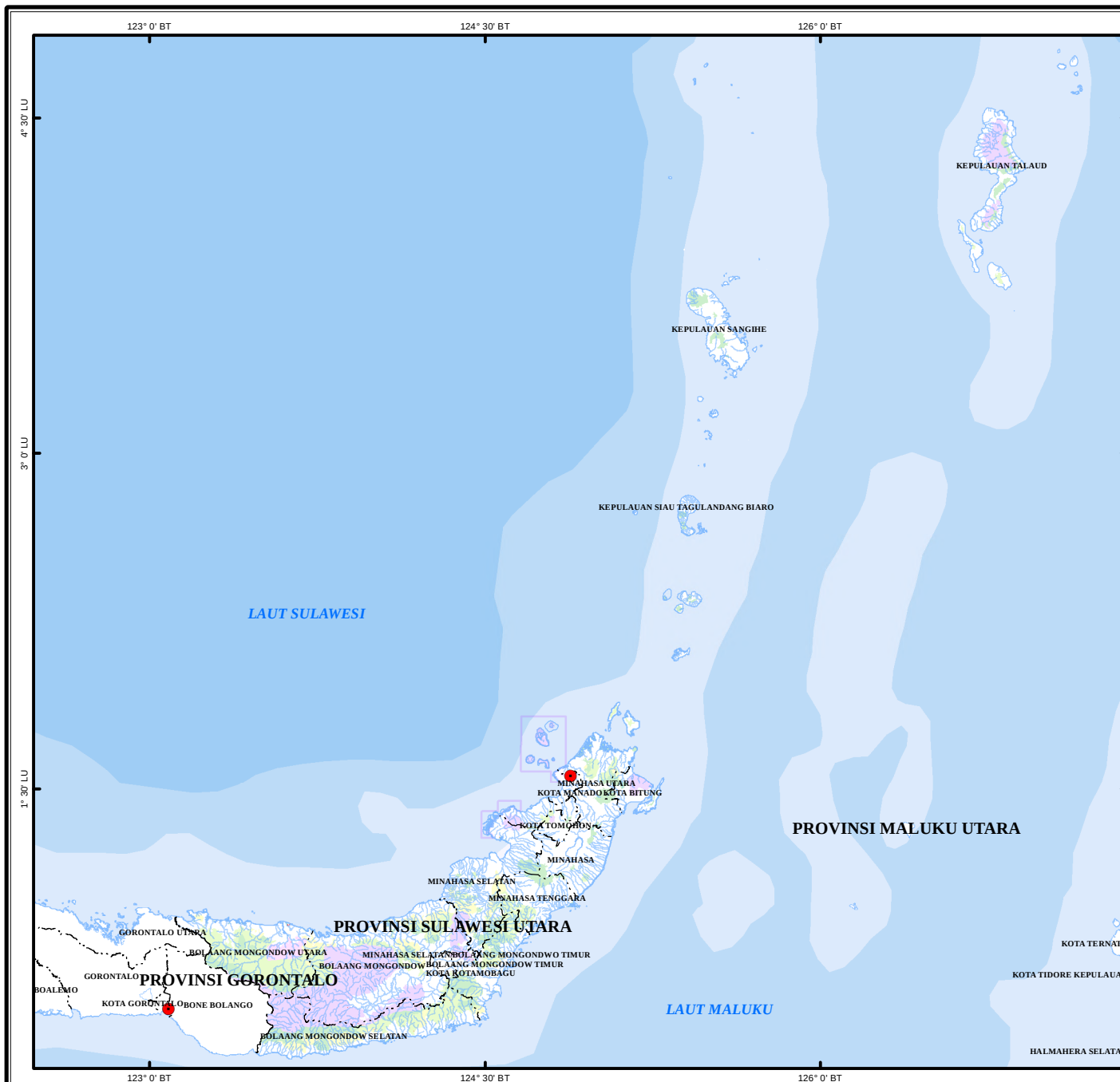
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.22 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	16,7	5,0	10,3	1,0	33,0	-	33,0	1,0	34,0
	- Hutan lahan kering primer	16,7	5,0	10,3	1,0	33,0	-	33,0	1,0	34,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	19,4	14,2	80,1	12,1	125,8	7,0	132,9	52,5	185,4
	- Hutan lahan kering sekunder	19,4	5,3	80,1	12,1	117,0	7,0	124,0	3,4	127,4
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	8,9	-	-	8,9	-	8,9	49,2	58,0
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	36,1	19,2	90,4	13,1	158,8	7,0	165,8	53,5	219,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

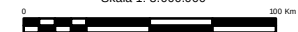
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SULAWESI UTARA

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

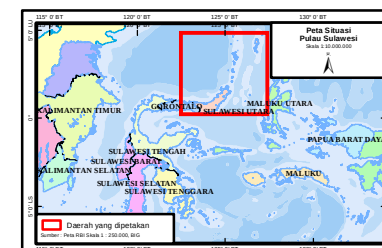
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

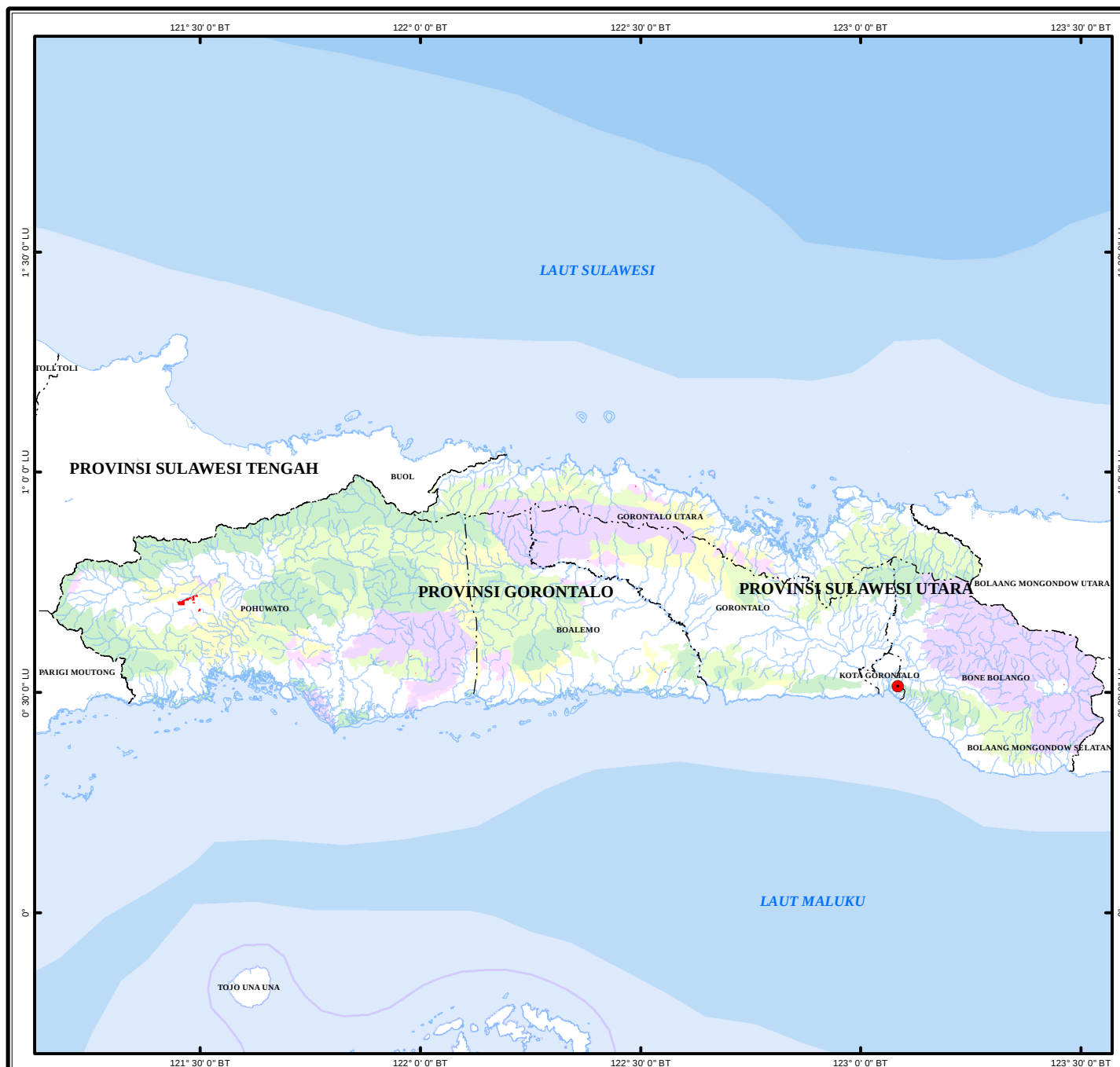
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.23 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI GORONTALO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	GORONTALO									
	A. Hutan Primer	-	-	8,2	-	8,2	-	8,2	1,5	9,7
	- Hutan lahan kering primer	-	-	8,2	-	8,2	-	8,2	1,5	9,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	4,1	18,8	32,7	0,7	17,4	10,4	27,8	481,9	509,7
	- Hutan lahan kering sekunder	4,1	19,4	32,7	0,7	16,8	10,4	27,2	479,4	506,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	0,6	-	-	0,6	-	0,6	2,4	3,1
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,1	18,8	40,9	0,7	25,6	10,4	36,0	483,4	519,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

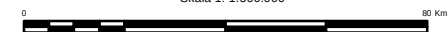
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI GORONTALO

Skala 1: 1.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

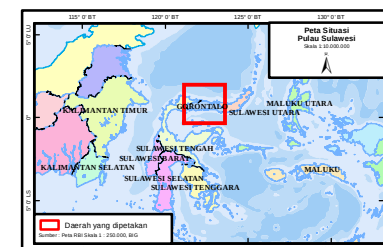
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



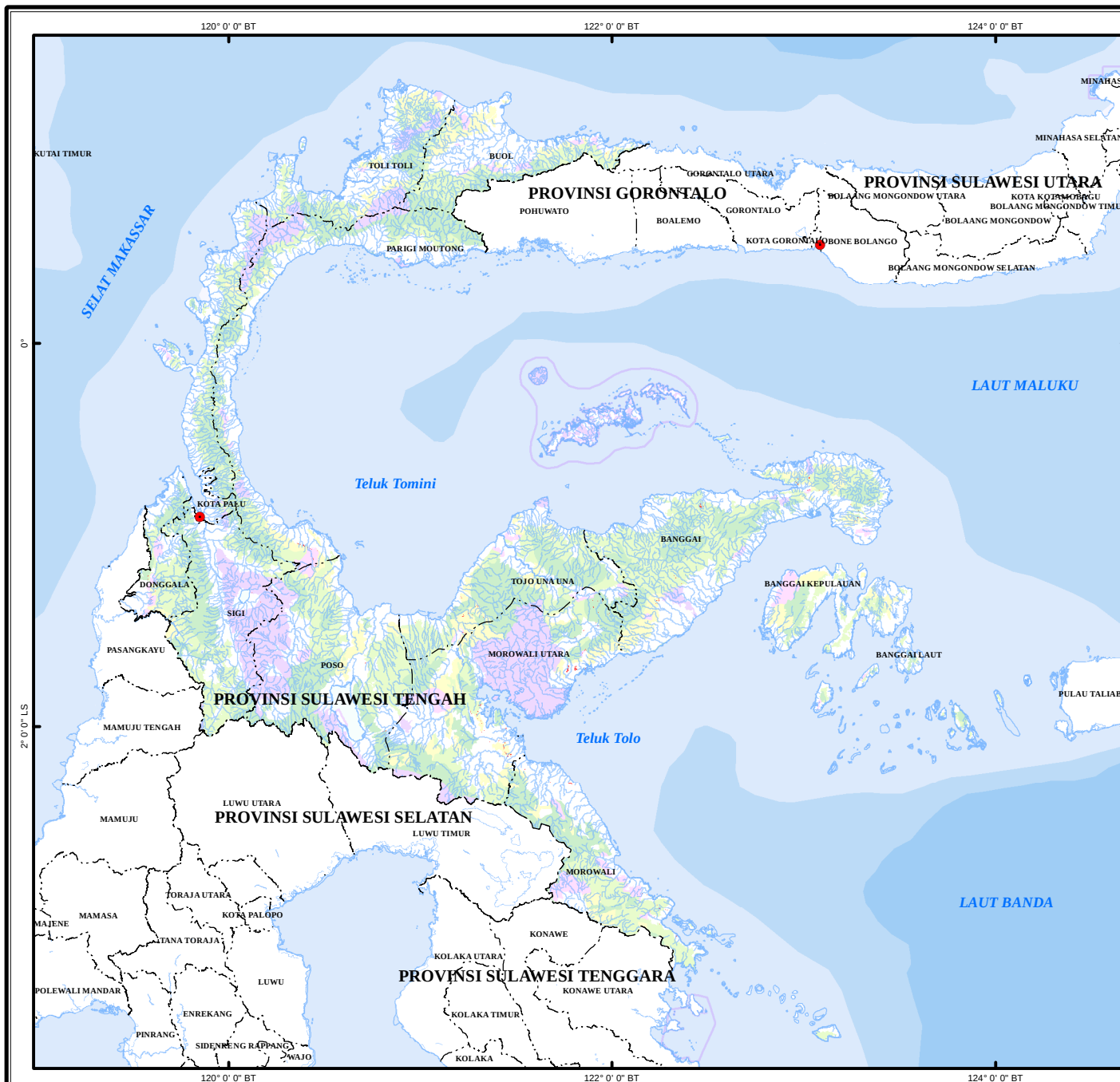
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.24 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	SULAWESI TENGAH									
	A. Hutan Primer	18,4	40,9	207,3	108,2	374,8	25,4	400,2	200,8	601,0
	- Hutan lahan kering primer	18,4	40,9	207,3	108,2	374,8	25,4	400,2	167,6	567,9
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	33,2	33,2
	B. Hutan Sekunder	77,7	269,4	379,2	384,1	1.110,4	150,5	1.260,9	1.022,8	2.283,7
	- Hutan lahan kering sekunder	70,9	269,4	379,2	384,1	1.103,7	150,5	1.254,2	998,6	2.252,8
	- Hutan rawa sekunder	6,7	-	-	-	6,7	-	6,7	-	6,7
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	24,2	24,2
	C. Hutan Tanaman*	- 19,5	-	-	-	- 19,5	-	- 19,5	-	- 19,5
	TOTAL	76,6	310,4	586,5	492,3	1.465,7	175,9	1.641,6	1.223,5	2.865,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Skala 1: 3.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

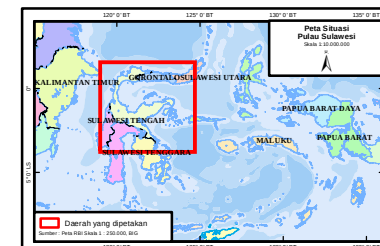
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

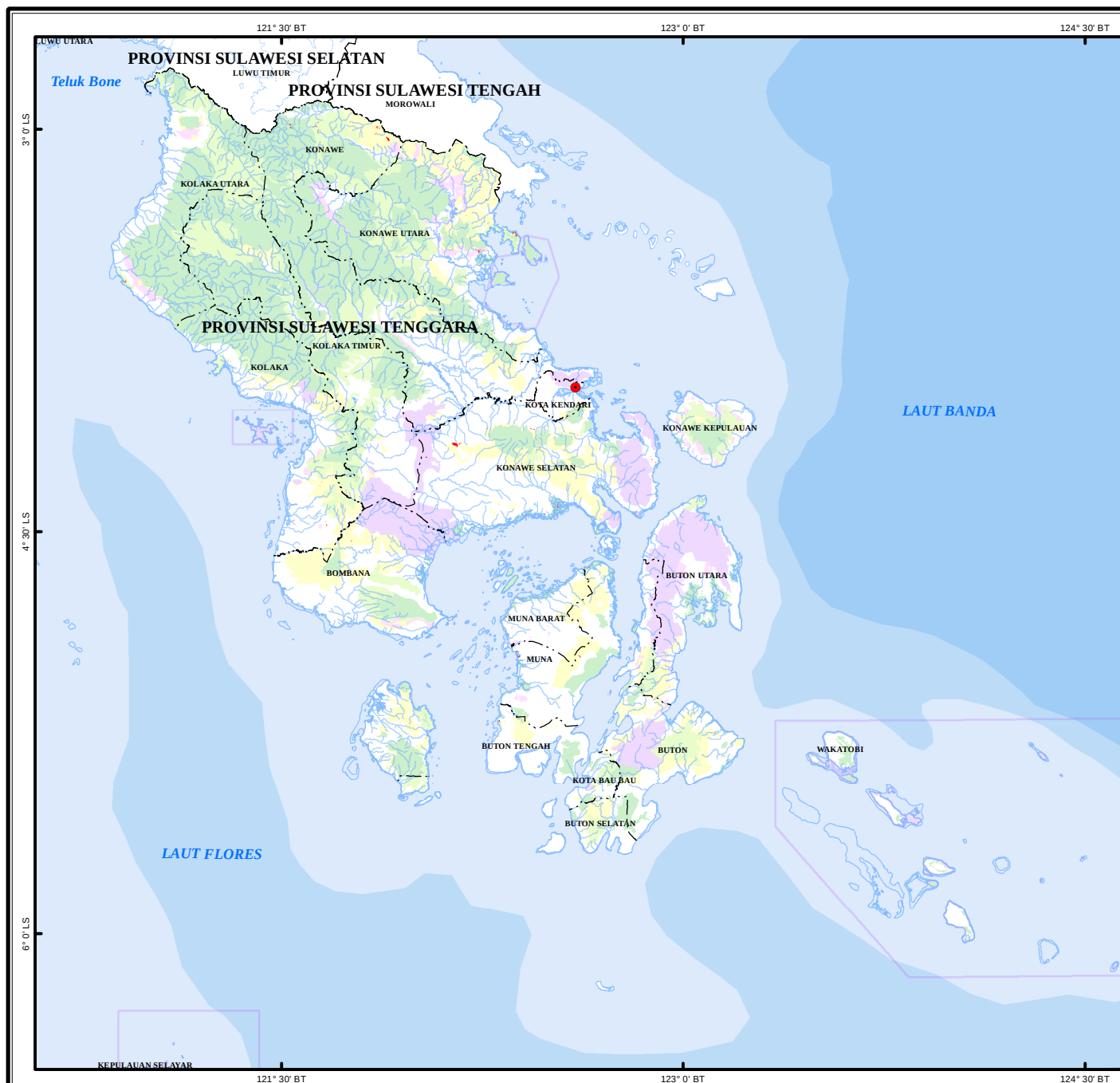
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.25 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	SULAWESI TENGGARA									
	A. Hutan Primer	-	64,9	97,0	144,7	306,6	1,6	308,2	37,9	346,0
	- Hutan lahan kering primer	-	64,9	97,0	144,7	306,6	1,6	308,2	37,9	346,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	21,5	320,5	312,2	318,9	973,0	67,7	1.040,8	556,4	1.597,2
	- Hutan lahan kering sekunder	-	79,2	312,2	318,9	710,2	63,3	773,5	505,6	1.279,1
	- Hutan rawa sekunder	21,5	-	-	-	21,5	-	21,5	-	21,5
	- Hutan mangrove sekunder	-	241,4	-	-	241,4	4,4	245,8	50,8	296,6
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	21,5	385,4	409,2	463,5	1.279,6	69,3	1.348,9	594,3	1.943,2

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

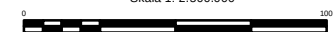
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

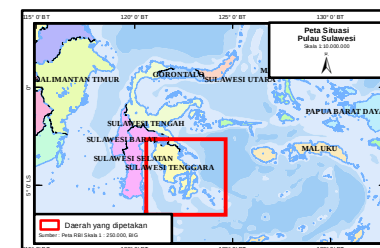
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



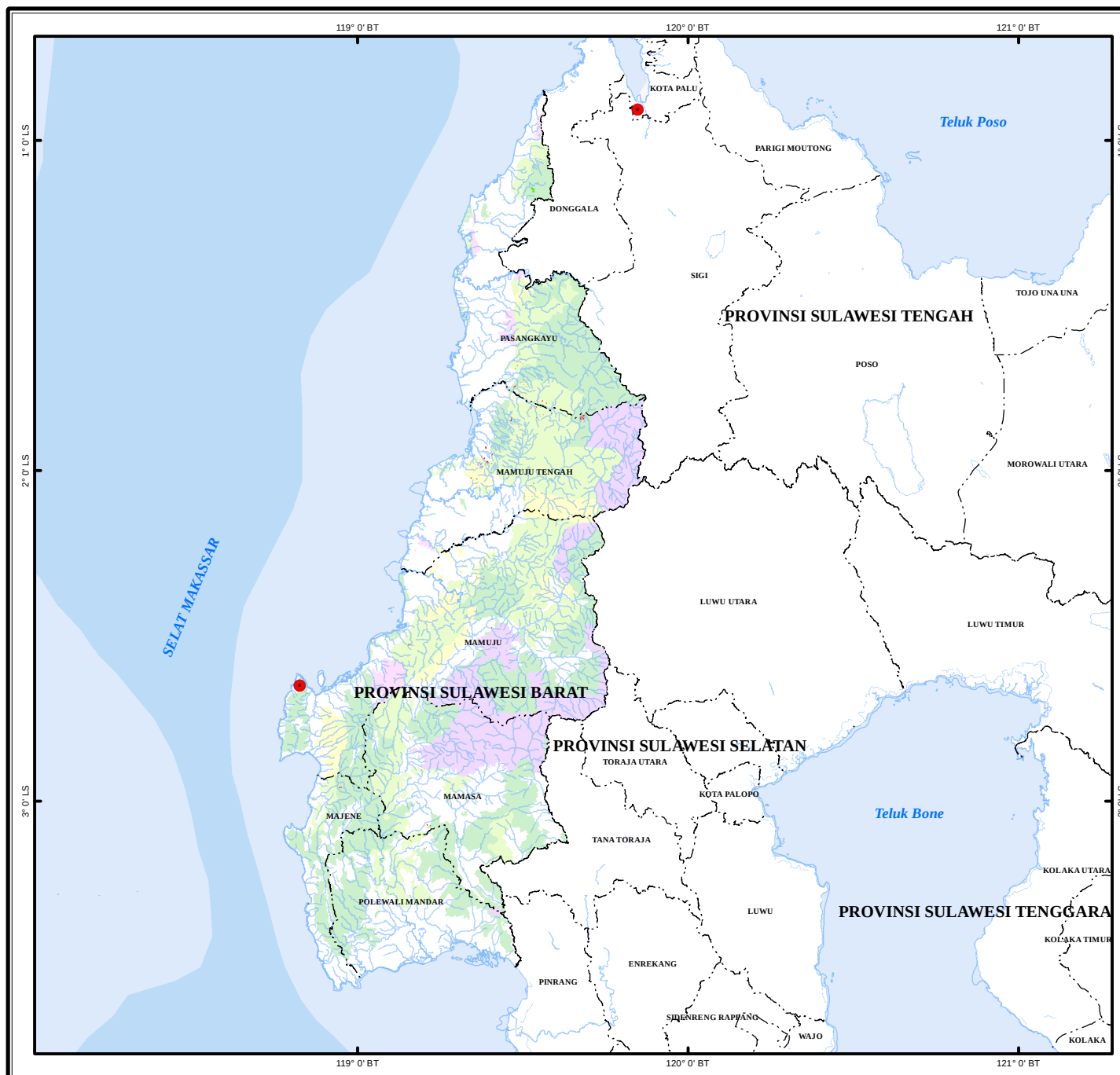
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.26 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	SULAWESI BARAT									
	A. Hutan Primer	-	106,0	4,5	-	110,5	-	110,5	-	110,5
	- Hutan lahan kering primer	-	106,0	4,5	-	110,5	-	110,5	-	110,5
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	34,7	288,2	36,7	290,2	-	290,2	101,9	392,1
	- Hutan lahan kering sekunder	-	34,7	288,2	36,7	290,2	-	290,2	101,9	392,1
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	71,3	292,8	36,7	400,7	-	400,7	101,9	502,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

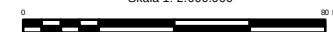
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SULAWESI BARAT

Skala 1: 2.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

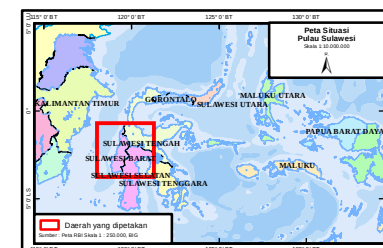
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

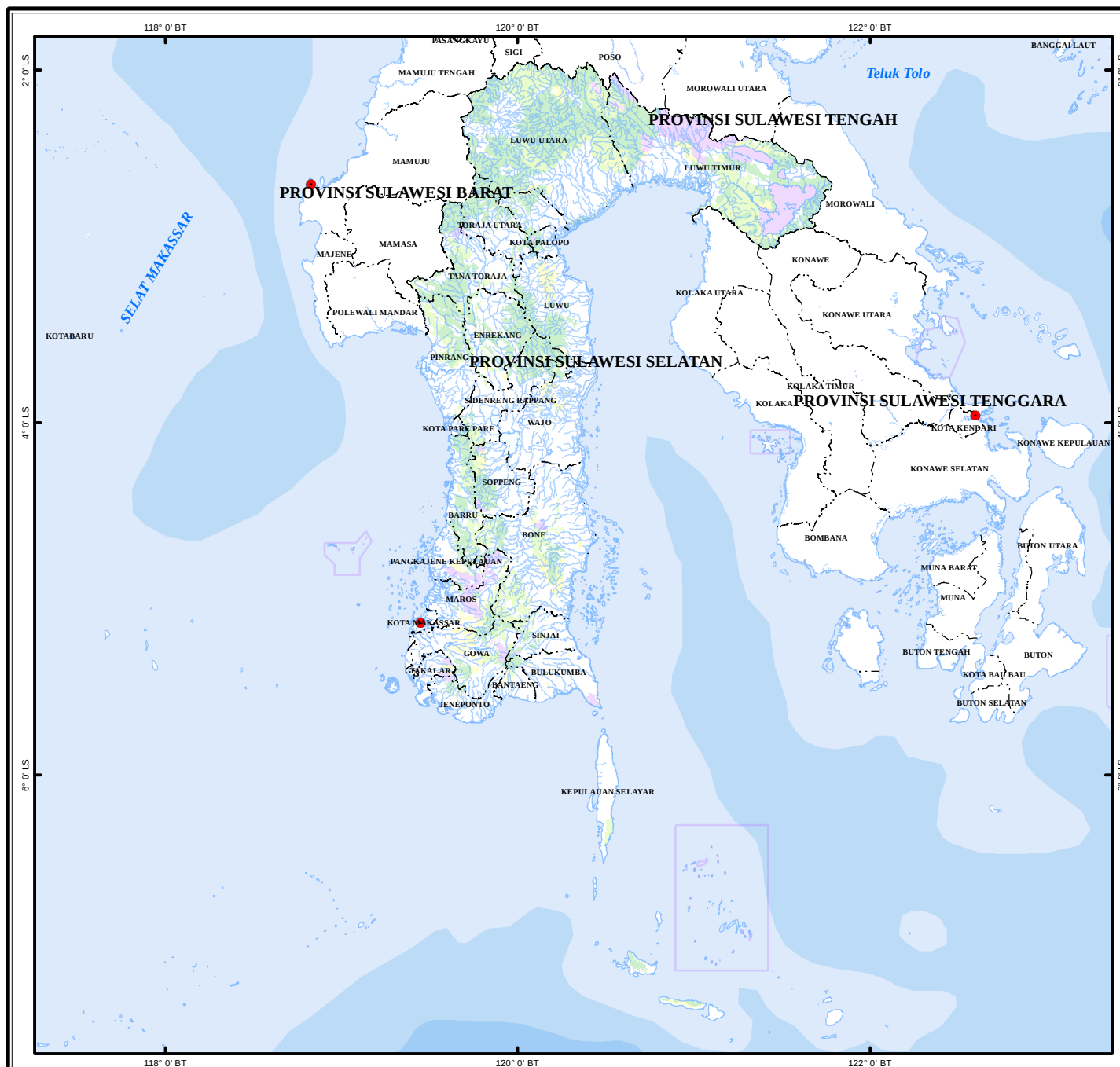
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.27 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI SULAWESI SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	SULAWESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	8,8	1,7	-	10,5	-	10,5	1,4	11,9
	- Hutan lahan kering primer	-	8,8	1,7	-	10,5	-	10,5	1,4	11,9
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	171,6	25,5	14,5	211,7	-	211,7	88,0	299,7
	- Hutan lahan kering sekunder	-	171,6	25,5	14,5	211,7	-	211,7	88,0	299,7
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	180,4	27,2	14,5	222,1	-	222,1	89,5	311,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Skala 1: 3.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

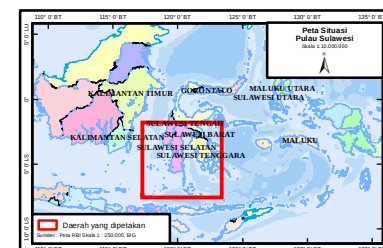
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

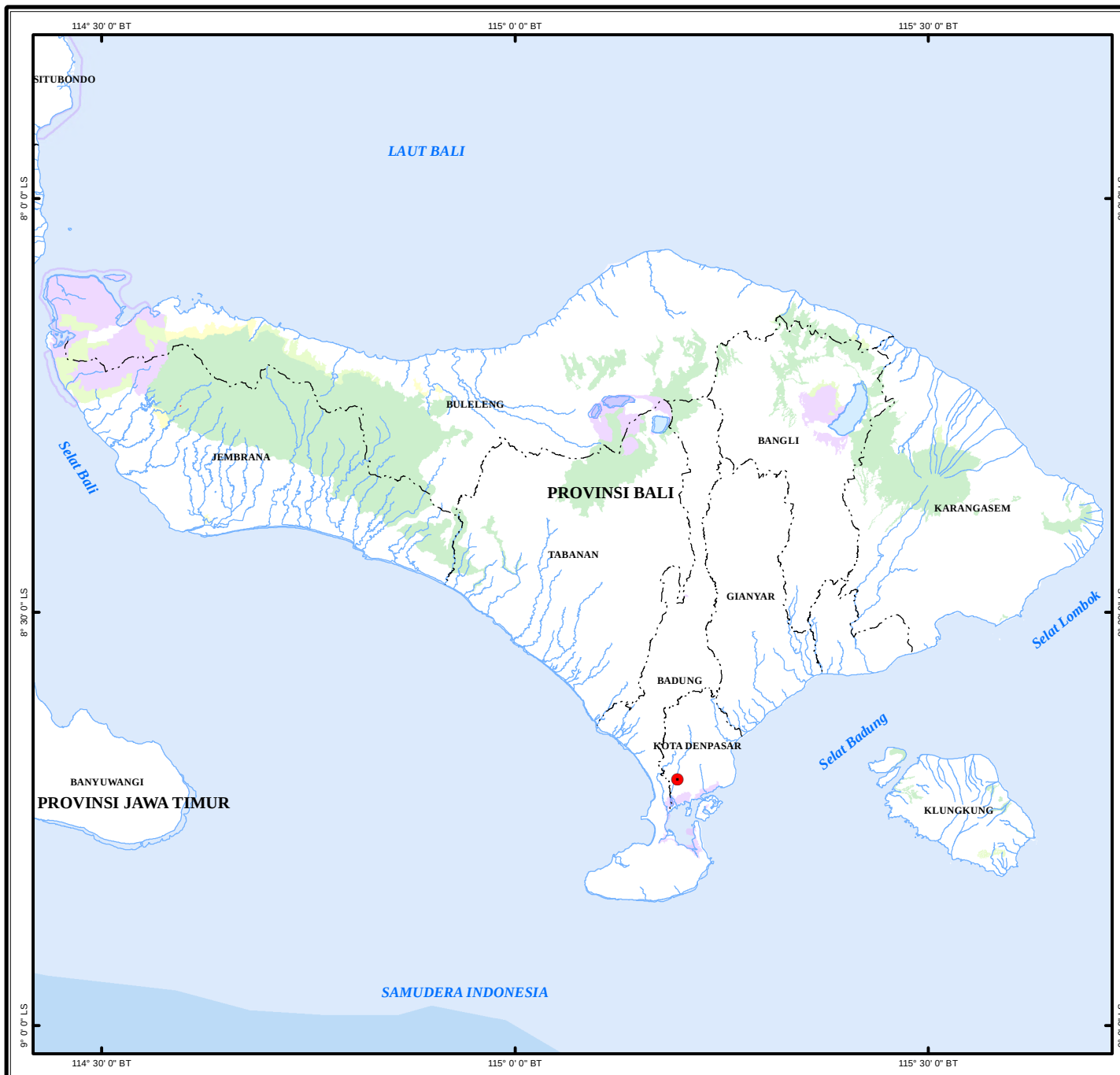
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.28 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI BALI DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	BALI									
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	3,7	2,3	-	-	6,0	-	6,0	-	6,0
	- Hutan lahan kering sekunder	-	2,3	-	-	2,3	-	2,3	-	2,3
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	3,7	-	-	-	3,7	-	3,7	-	3,7
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	3,7	2,3	-	-	6,0	-	6,0	-	6,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI BALI

Skala 1: 800.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

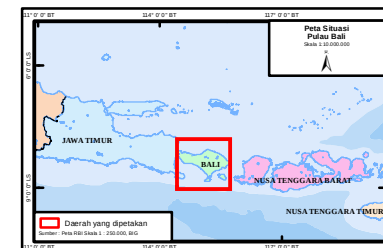
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



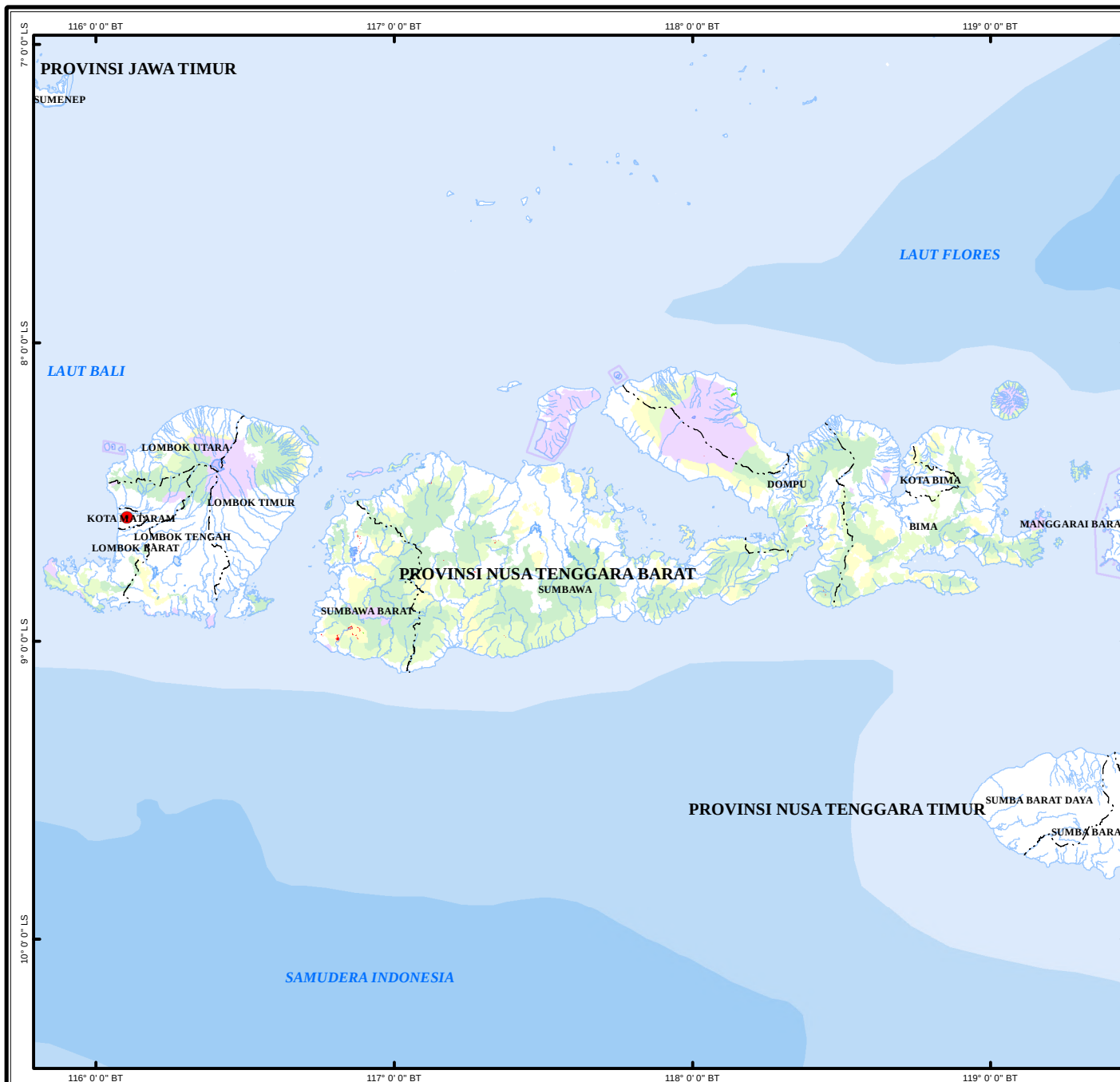
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.29 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	NUSA TENGGARA BARAT									
	A. Hutan Primer	-	23,5	25,6	95,9	144,9	-	144,9	8,1	153,0
	- Hutan lahan kering primer	-	23,5	25,6	95,9	144,9	-	144,9	8,1	153,0
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	10,6	61,3	77,5	216,7	366,1	-	366,1	190,9	557,0
	- Hutan lahan kering sekunder	10,6	63,2	77,5	216,7	368,0	-	368,0	163,7	531,7
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	- 1,9	-	-	- 1,9	-	- 1,9	27,2	25,3
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	25,3	25,3	-	25,3	- 273,3	- 248,0
	TOTAL	10,6	84,8	103,1	337,9	536,3	-	536,3	- 74,2	462,0

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

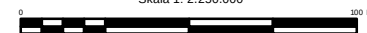
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Skala 1: 2.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

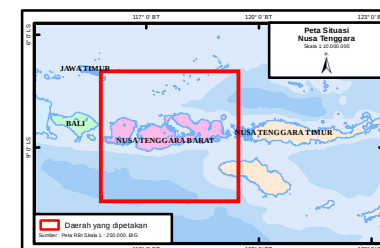
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



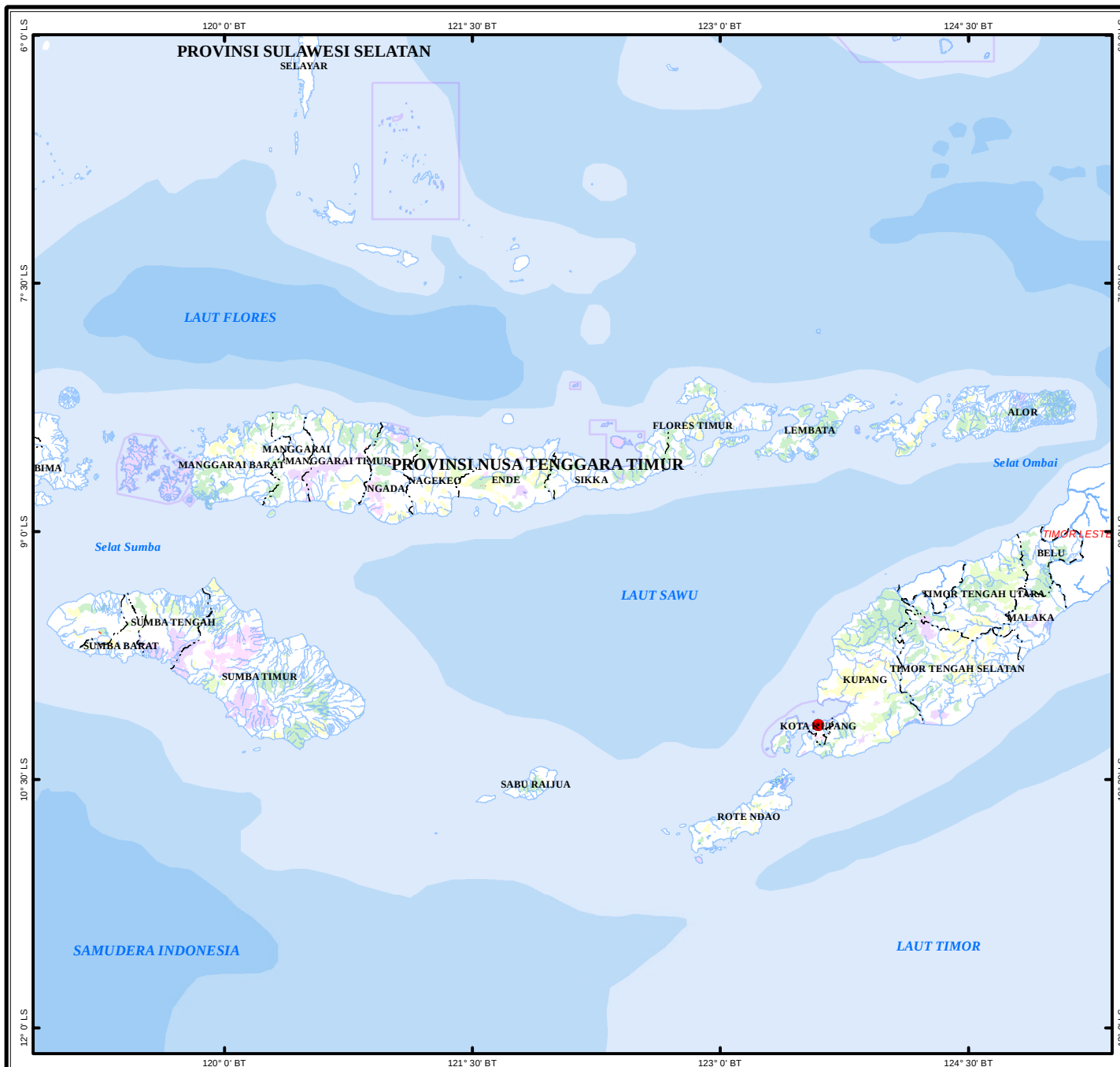
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.30 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	18,2	175,9	2,3	139,0	335,3	1,8	337,1	135,9	473,1
	- Hutan lahan kering primer	18,2	175,9	2,3	139,0	335,3	1,8	337,1	135,9	473,1
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	77,9	21,5	83,1	182,5	0,6	183,1	394,5	577,6
	- Hutan lahan kering sekunder	-	77,9	21,5	83,1	182,5	0,6	183,1	394,5	577,6
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	18,2	253,8	23,8	222,0	517,8	2,3	520,2	530,5	1.050,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

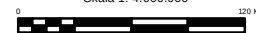
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Skala 1: 4.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

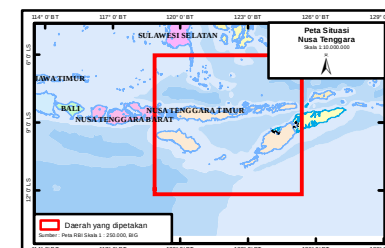
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

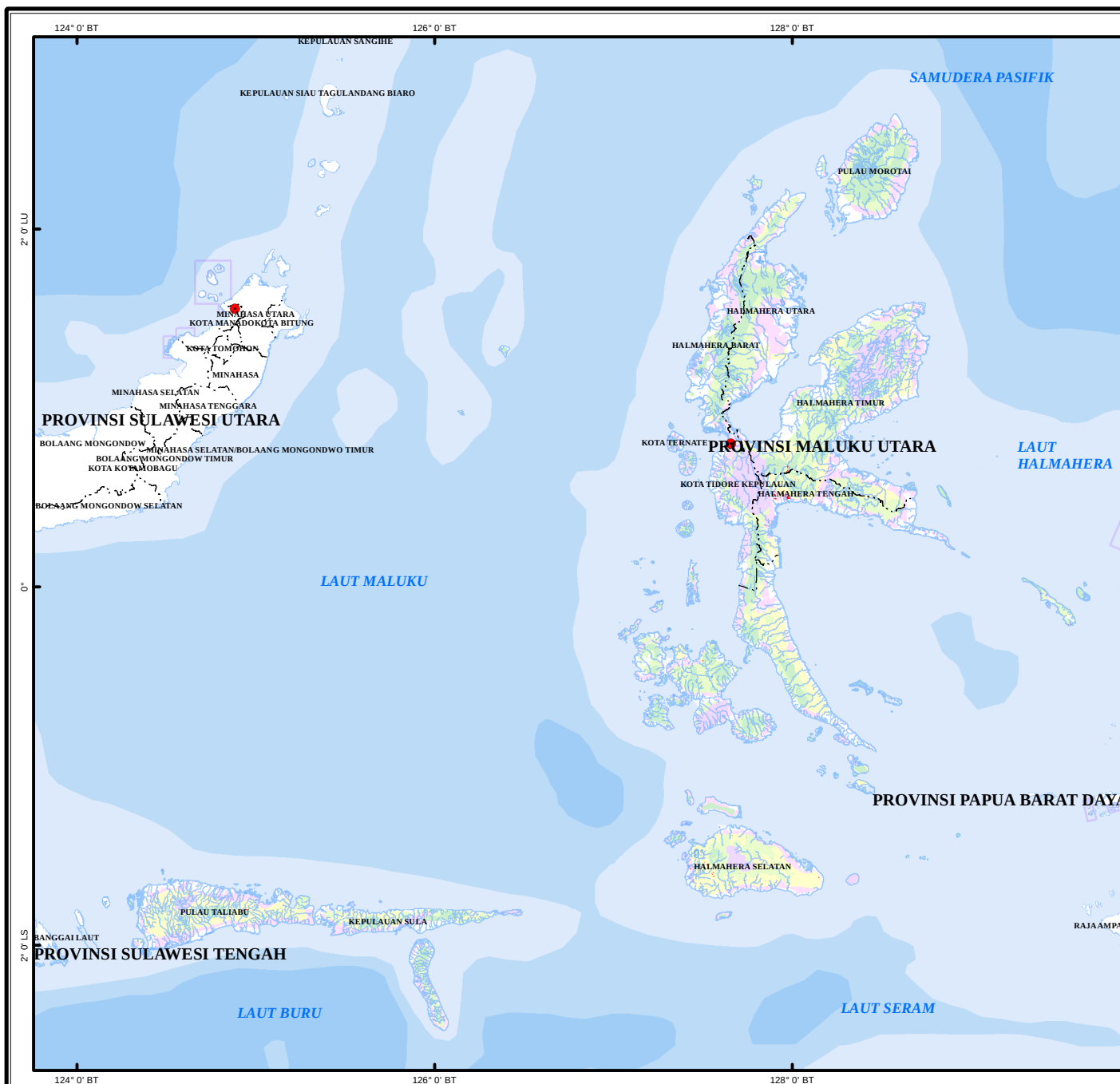
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.31 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI MALUKU UTARA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	MALUKU UTARA									
	A. Hutan Primer	-	50,5	78,2	2,5	131,1	18,3	149,4	3,2	152,6
	- Hutan lahan kering primer	-	50,2	64,1	2,5	116,8	8,8	125,6	-	125,6
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	0,4	14,0	-	14,4	9,4	23,8	3,2	27,0
	B. Hutan Sekunder	5,4	84,3	488,8	693,5	1.272,1	624,9	1.897,0	453,8	2.350,8
	- Hutan lahan kering sekunder	5,4	84,3	488,8	693,5	1.272,1	624,9	1.897,0	449,2	2.346,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,6
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	5,4	134,8	567,0	696,0	1.403,2	643,2	2.046,4	457,0	2.503,4

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI MALUKU UTARA

Skala 1: 3.750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

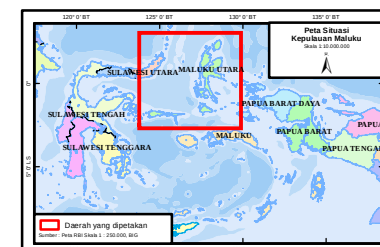
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

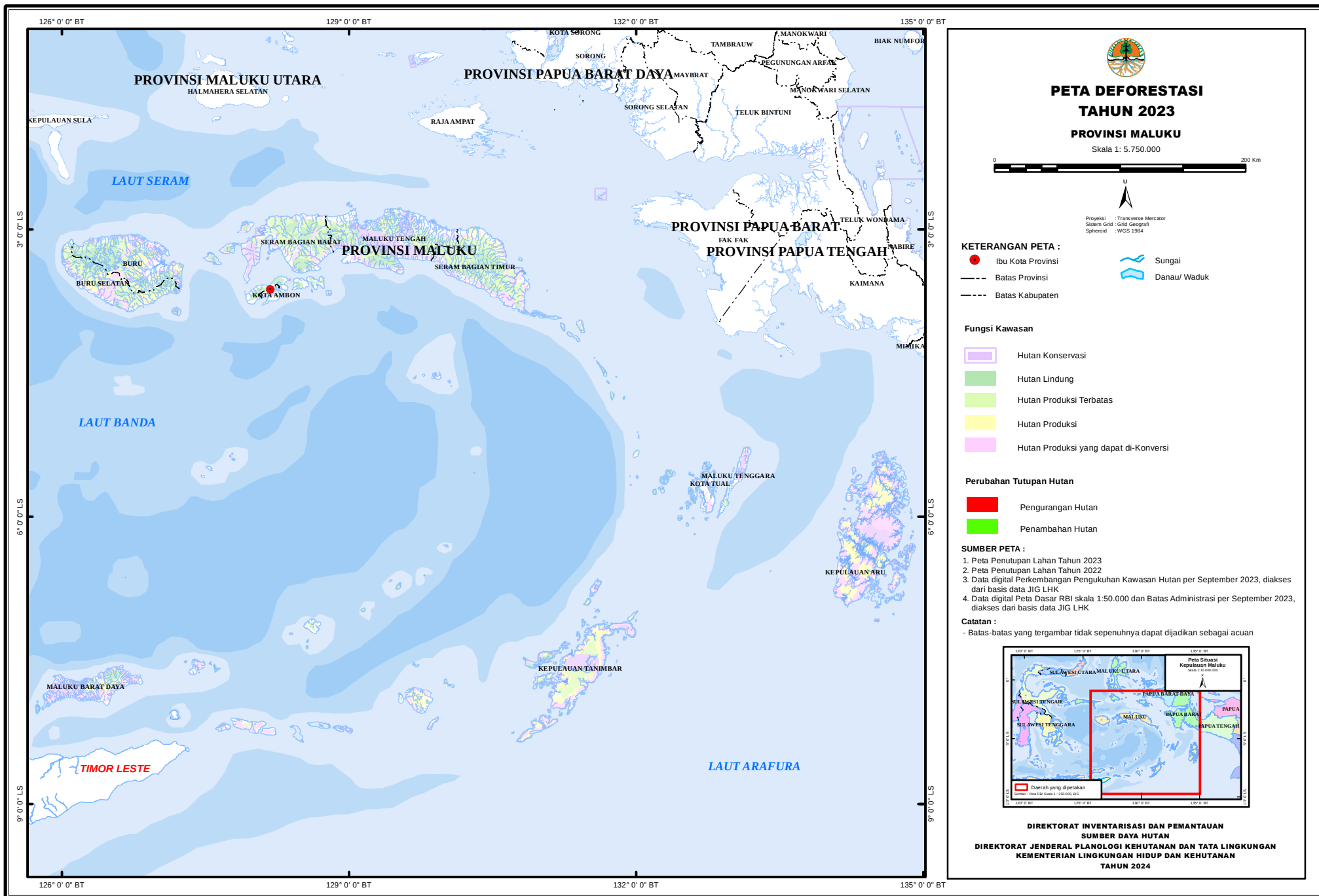
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.32 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI MALUKU DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	2,5	8,1	- 16,3	55,2	49,5	90,7	140,2	23,4	163,6
	- Hutan lahan kering sekunder	2,5	8,1	- 16,3	55,2	49,5	72,2	121,8	23,4	145,2
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	18,4	18,4	-	18,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	2,5	8,1	- 16,3	55,2	49,5	90,7	140,2	23,4	163,6

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.

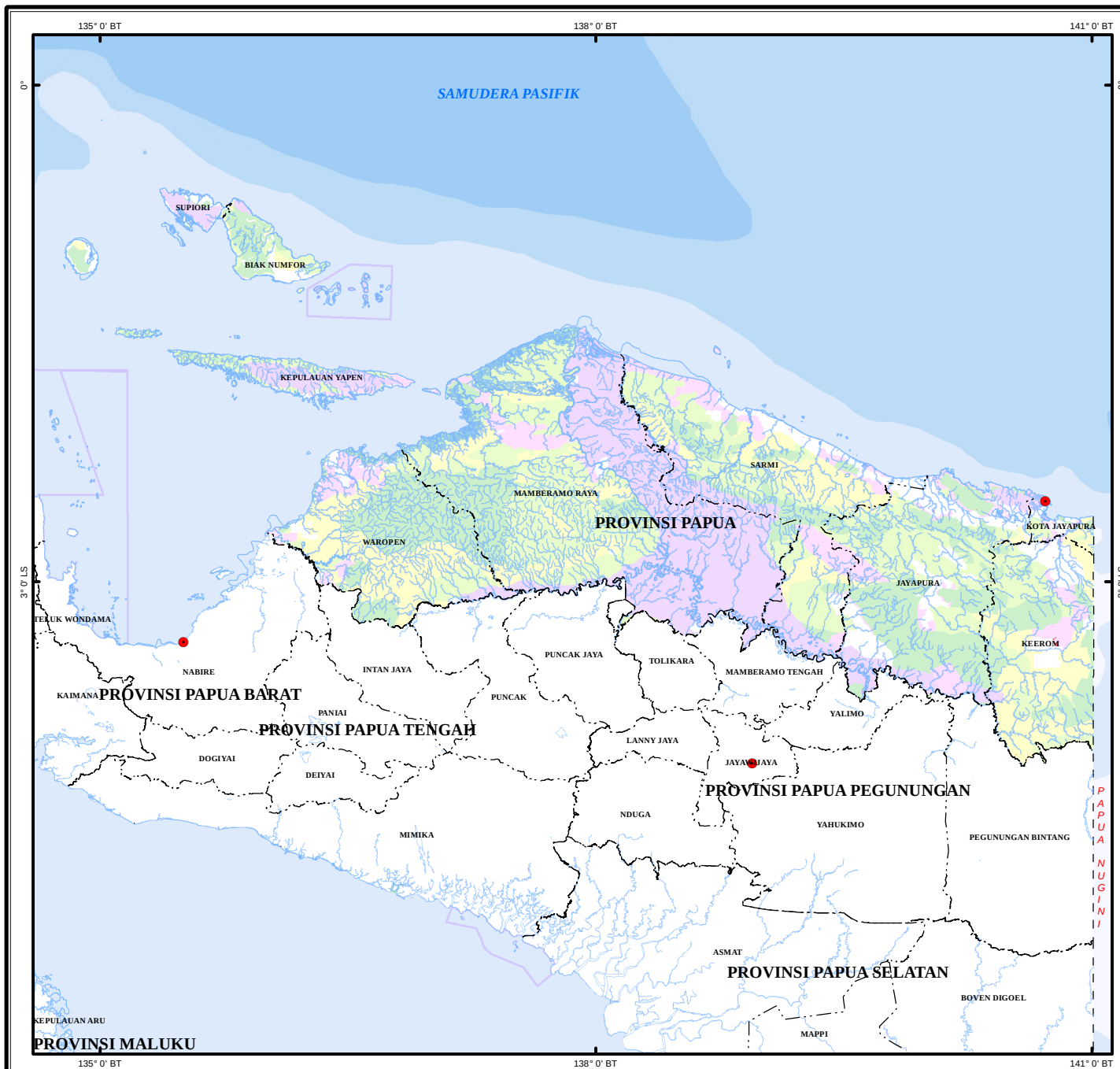


TABEL 3.33 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	12,8	77,3	33,0	123,2	5,9	129,1	13,5	142,6
	- Hutan lahan kering primer	-	12,8	77,3	33,0	123,2	5,9	129,1	11,6	140,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	115,8	16,7	69,1	4,3	205,9	137,0	342,9	267,4	610,2
	- Hutan lahan kering sekunder	115,8	16,7	61,1	2,1	195,8	137,0	332,8	253,0	585,8
	- Hutan rawa sekunder	-	-	8,0	2,1	10,1	-	10,1	14,4	24,5
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	115,8	29,5	146,4	37,3	329,0	142,9	472,0	280,9	752,9

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

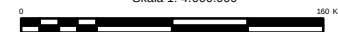
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI PAPUA

Skala 1: 4.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

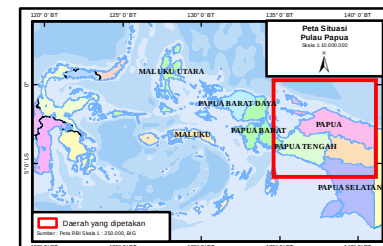
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

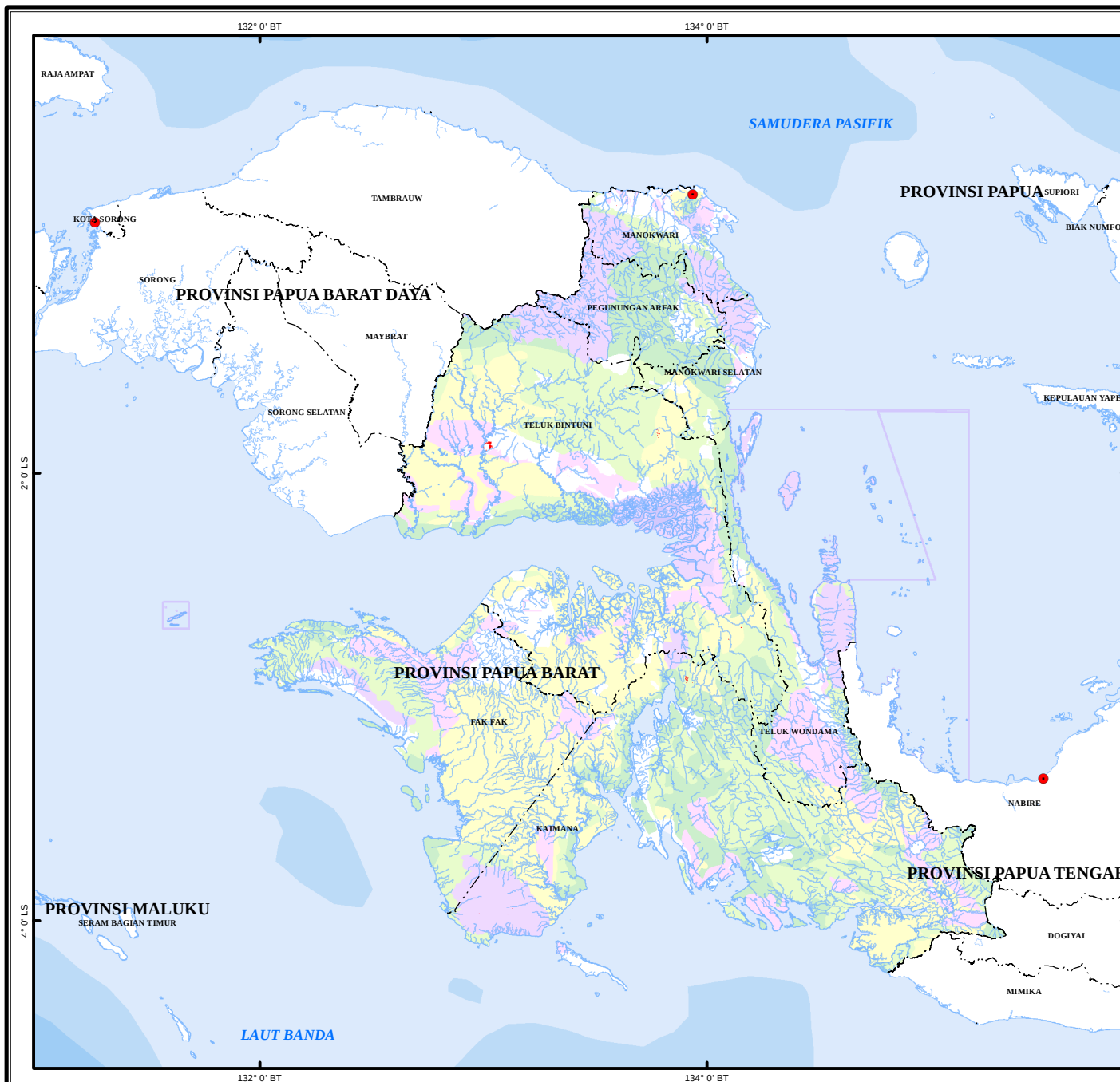
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.34 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA BARAT DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	52,4	38,1	306,8	162,5	559,8	20,4	580,2	40,4	620,6
	- Hutan lahan kering primer	52,4	35,8	306,8	159,7	554,7	20,4	575,1	32,5	607,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	1,2	1,2	-	1,2	-	1,2
	- Hutan mangrove primer	-	2,3	-	1,6	3,8	0,0	3,8	7,9	11,7
	B. Hutan Sekunder	-	17,1	29,2	66,3	112,6	24,7	137,4	684,1	821,5
	- Hutan lahan kering sekunder	-	17,1	29,2	35,6	82,0	24,7	106,7	657,2	763,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	1,8	1,8	-	1,8	27,0	28,8
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	28,9	28,9	-	28,9	-	28,9
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	52,4	55,2	336,0	228,8	672,4	45,2	717,6	724,5	1.442,1

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

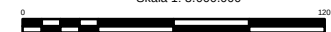
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI PAPUA BARAT

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

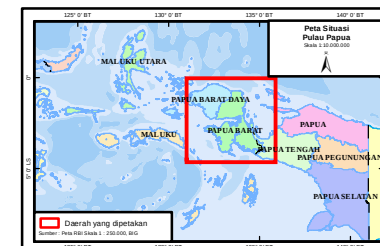
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

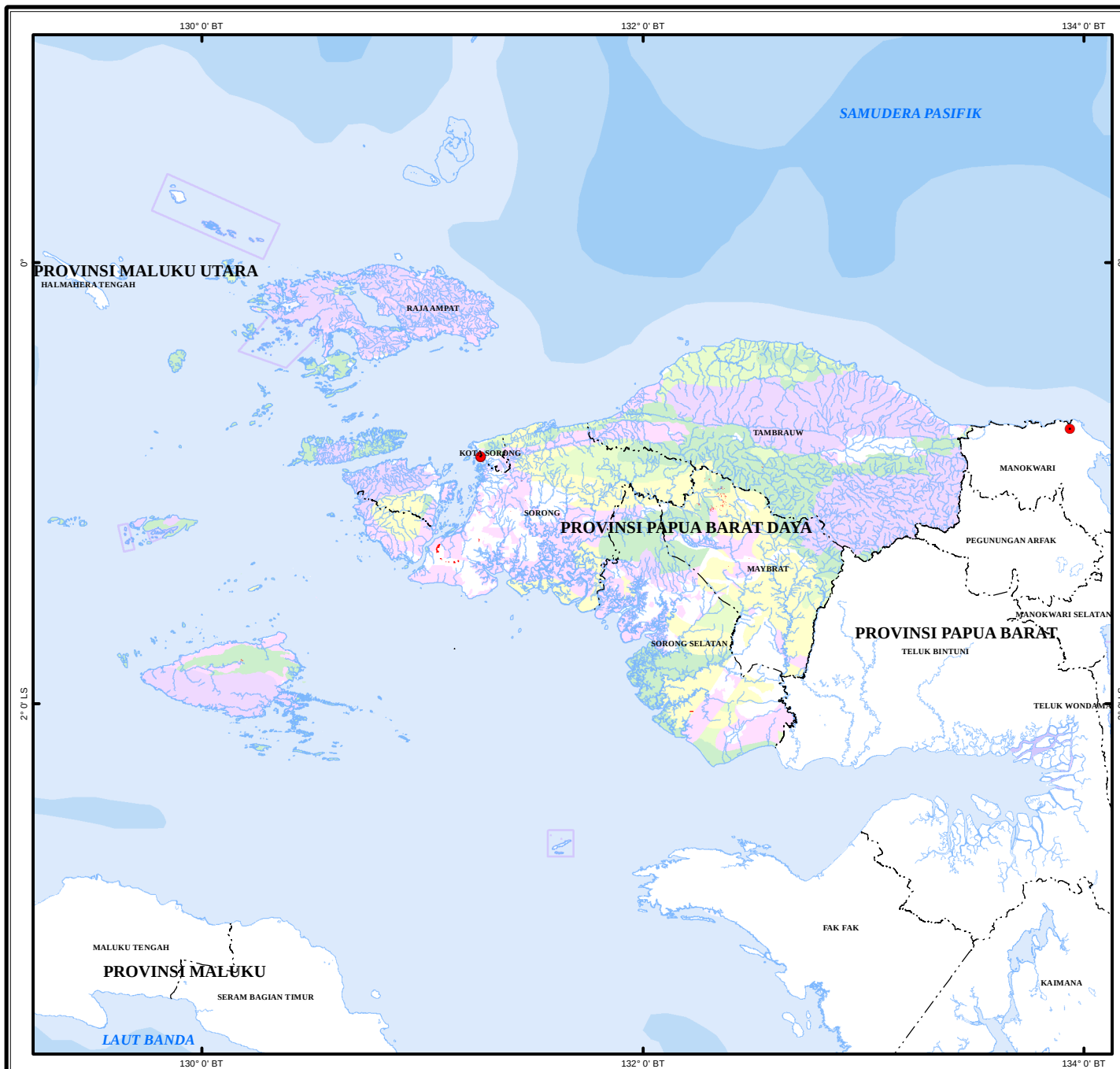
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.35 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	-	324,5	-	509,0	833,5	76,1	909,6	20,9	930,6
	- Hutan lahan kering primer	-	324,5	-	436,1	760,6	76,1	836,7	20,9	857,7
	- Hutan rawa primer	-	-	-	72,9	72,9	0,0	72,9	-	72,9
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	12,0	25,1	11,1	18,8	67,0	72,2	139,2	840,7	979,9
	- Hutan lahan kering sekunder	12,0	14,3	11,1	14,7	22,6	72,2	94,8	840,7	935,6
	- Hutan rawa sekunder	-	10,9	-	33,5	44,4	-	44,4	-	44,4
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	12,0	349,6	11,1	527,8	900,5	148,3	1.048,8	861,6	1.910,5

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

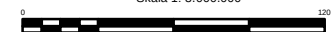
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

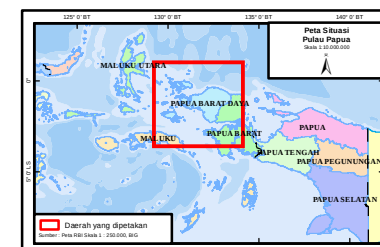
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

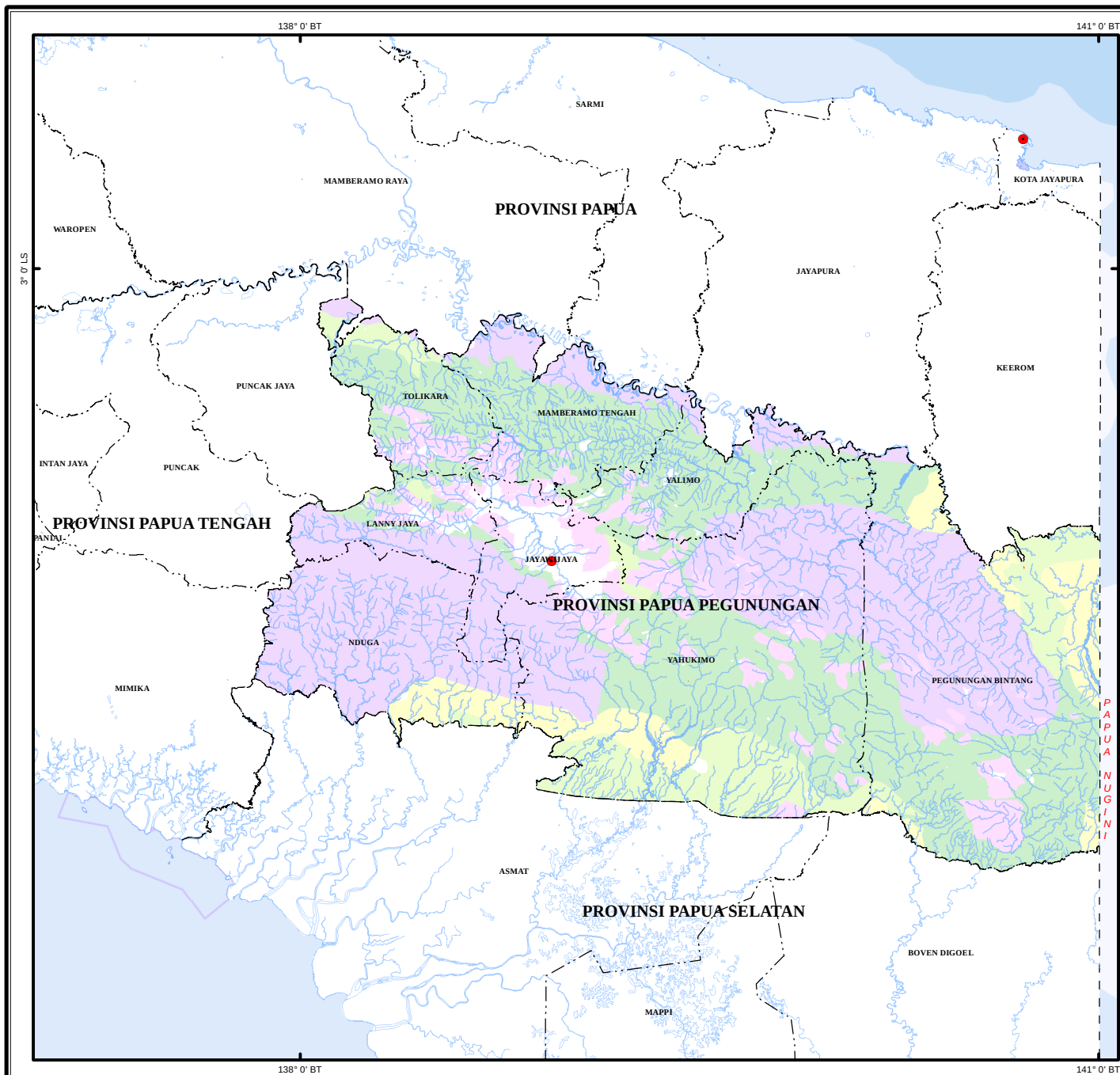
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.36 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	27,4	87,8	33,3	9,5	158,1	29,4	187,5	0,3	187,8
	- Hutan lahan kering primer	27,4	87,8	33,3	3,0	151,6	29,4	181,0	0,3	181,3
	- Hutan rawa primer	-	-	-	6,5	6,5	-	6,5	-	6,5
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	7,2	18,6	2,6	-	28,4	2,1	30,5	-	30,5
	- Hutan lahan kering sekunder	7,2	18,6	-	-	25,8	2,1	27,9	-	27,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	2,6	-	2,6	-	2,6	-	2,6
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	34,6	106,4	35,9	9,5	186,4	31,5	218,0	0,3	218,3

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

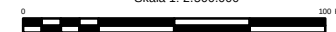
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Skala 1: 2.500.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

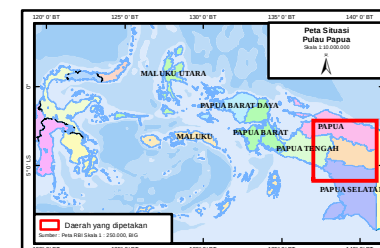
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

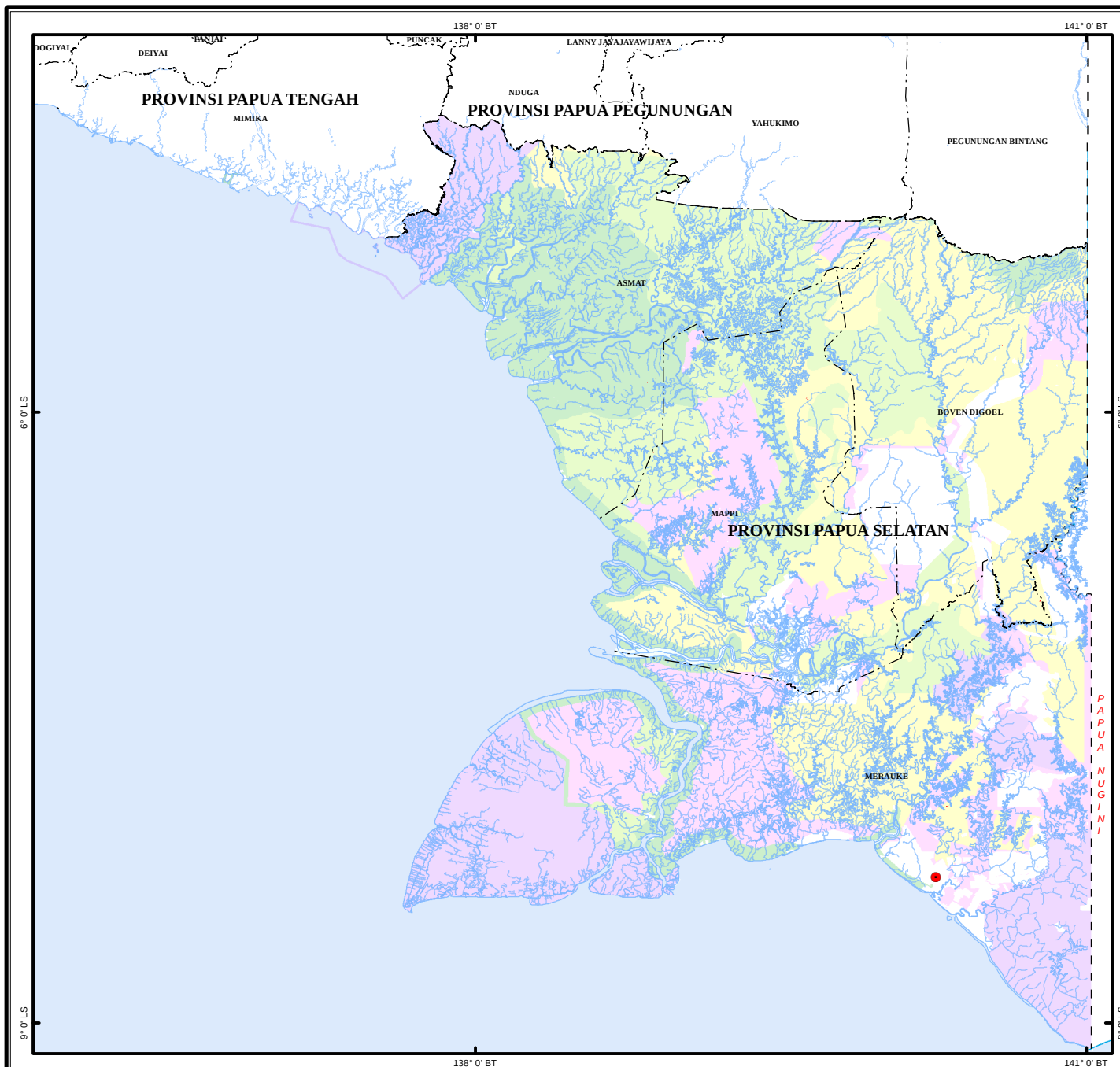
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.37 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA SELATAN DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	6,5	13,8	3,2	133,3	156,8	-	156,8	6,1	162,9
	- Hutan lahan kering primer	6,5	-	-	101,5	108,0	-	108,0	6,1	114,1
	- Hutan rawa primer	-	13,8	3,2	31,8	48,8	-	48,8	-	48,8
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Hutan Sekunder	-	-	5,7	32,8	38,5	25,8	64,3	32,9	97,2
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	13,2	13,2	14,8	28,0	32,9	60,9
	- Hutan rawa sekunder	-	-	5,7	19,6	25,3	11,0	36,3	-	36,3
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	6,5	13,8	8,9	166,1	195,3	25,8	221,1	39,0	260,1

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

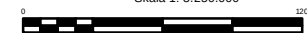
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI PAPUA SELATAN

Skala 1: 3.250.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- — — Batas Negara
- — — Batas Provinsi
- - - - - Batas Kabupaten
- ~ ~ ~ Sungai
- ~ ~ ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

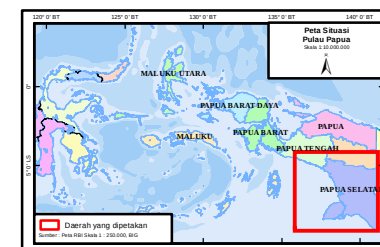
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

1. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
2. Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
3. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
4. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



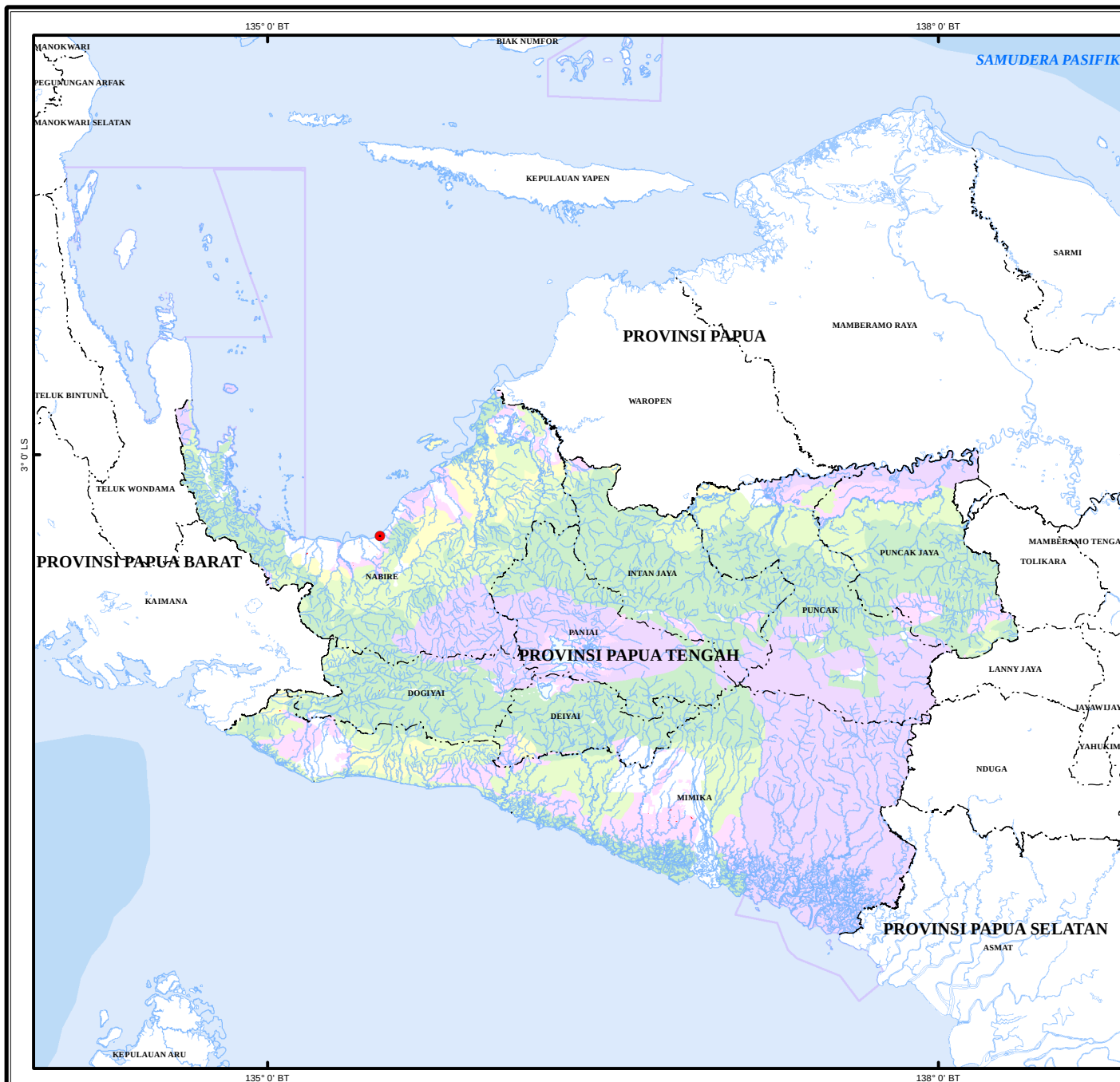
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

TABEL 3.38 ANGKA DEFORESTASI NETTO PROVINSI PAPUA TENGAH DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A. Hutan Primer	11,3	46,5	12,8	-	70,6	60,4	131,0	1,0	132,0
	- Hutan lahan kering primer	-	34,5	12,8	-	47,3	56,0	103,3	-	103,3
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	4,4	4,4	1,0	5,4
	- Hutan mangrove primer	11,3	12,0	-	-	23,3	-	23,3	-	23,3
	B. Hutan Sekunder	-	26,9	7,5	18,9	53,3	139,8	193,1	80,6	273,7
	- Hutan lahan kering sekunder	-	26,9	7,5	18,9	53,3	123,5	176,8	80,6	257,4
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	11,9	11,9	-	11,9
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	4,4	4,4	-	4,4
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	11,3	73,5	20,3	18,9	123,9	200,2	324,1	81,6	405,7

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

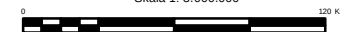
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK.



PETA DEFORESTASI TAHUN 2023

PROVINSI PAPUA TENGAH

Skala 1: 3.000.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

KETERANGAN PETA :

- Ibu Kota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- ~ Sungai
- ~ Danau/ Waduk

Fungsi Kawasan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di-Konversi

Perubahan Tutupan Hutan

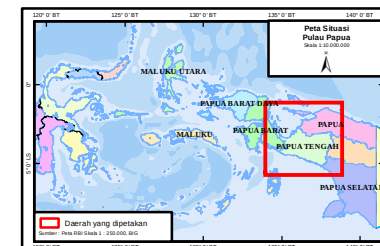
- Pengurangan Hutan
- Penambahan Hutan

SUMBER PETA :

- Peta Penutupan Lahan Tahun 2023
- Peta Penutupan Lahan Tahun 2022
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK
- Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per September 2023, diakses dari basis data JIG LHK

Catatan :

- Batas-batas yang tergambar tidak sepenuhnya dapat dijadikan sebagai acuan



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN

SUMBER DAYA HUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024